



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2005–2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, agar kegiatan pembangunan di Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah berperan penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah secara bertahap guna mempercepat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005–2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025; (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

dan

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2005-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati Kepulauan Anambas yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
13. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program bupati dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA DAN URAIAN RPJP DAERAH

Pasal 2

- (1) Sistematika RPJP Daerah disusun sebagai berikut:
 - a. BAB I (PENDAHULUAN);
 - b. BAB II (GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH);
 - c. BAB III (PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS DAN SKENARIO PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG);
 - d. BAB IV (VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG);
 - e. BAB V (ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG);
 - f. BAB VI (KAIDAH PELAKSANAAN), dan
 - g. BAB VII (PENUTUP).
- (2) Uraian RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah,
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi.

Pasal 4

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk Visi, Misi dan Arah Pembangunan.

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati;
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD, dan
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengendalian dan Evaluasi RPJP Daerah
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015 dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal, Desember 2013

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



T. MUKHTARUDDIN

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,



RADJA TJELAK NUR DJALAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2013
NOMOR 30

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan menjadi pertimbangan utama perlunya penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dalam menjamin kesinambungan pembangunan daerah. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) Tahun 2005-2025.

RPJP Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

RPJM Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025 adalah untuk (a) mendukung kelancaran koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat dan daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan serta (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	viii
Bab I Pendahuluan.....	I - 1
1.1 Latar Belakang.....	I - 1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	I - 2
1.3 Landasan Hukum.....	I - 3
1.4 Kedudukan RPJDP dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I - 6
1.5 Sistematikan Penulisan.....	I - 7
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II - 1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II - 1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II - 20
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II - 34
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II - 54
2.5 Aspek Sumber Daya Manusia.....	II - 83
2.6 Aspek Sistem Inovasi Daerah.....	II - 86
Bab III Permasalahan, Isu Strategis, dan Skenario Pembangunan Jangka Panjang.....	III - 1
3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	III - 1
3.2 Isu Strategis.....	III - 13
3.3 Skenario Pembangunan Jangka Panjang.....	III - 18
Bab IV Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang.....	IV - 1
4.1 Visi Pembangunan Jangka Panjang.....	IV - 1

4.2	Misi Pembangunan Jangka Panjang.....	IV – 5
Bab V	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang.....	V – 1
5.1	Sasaran Pembangunan Jangka Panjang.....	V – 1
5.2	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang.....	V – 6
5.3	Tahapan Pembangunan.....	V – 31
Bab VI	Kaidah Pelaksanaan.....	VI – 1
6.1	Pedoman Transisi.....	VI – 1
6.1	Prinsip Kaidah Pelaksanaan.....	VI – 1
6.2	Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi.....	VI – 2
Bab VII	Penutup.....	VII - 1

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
1.1	Kedudukan RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya.....	I - 7
2.1	Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas.....	II - 2
2.2	Peta Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.....	II - 4
2.3	Distribusi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas.....	II - 13
2.4	Diagram Proyeksi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas 2010-2025.....	II - 16
2.5	Diagram Proyeksi Penduduk dan Tenaga Kerja.....	II - 18
2.6	Diagram Distribusi Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.....	II - 20
2.7	Kondisi Fasilitas Perdagangan di Kabupaten Kepulauan Anambas.....	II - 52
2.8	Kondisi Fasilitas Peribadatan di Kabupaten Kepulauan Anambas.....	II - 53
2.9	Pemakan di Kabupaten Kepulauan Anambas.....	II - 54
2.10	Kondisi Jalan dan Kendaraan Angkutan Darat di Anambas (Tarempa)....	II - 62
2.11	Dermaga di Anambas.....	II - 67
2.12	Bandara Matak dan Pesawat F-50.....	II - 69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Jika Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sering disebut sebagai agenda pembangunan karena menyatu dengan agenda Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan oleh Kepala Daerah selama menjadi pimpinan pemerintahan, maka RPJPD merupakan koridor pemberi arah dan batasan pembangunan daerah jangka panjang yang dapat dijabarkan dalam periode pembangunan yang lebih pendek oleh Kepala Daerah terpilih.

Kabupaten Kepulauan Anambas terbentuk melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) pertama kali dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2010 untuk memilih Bupati periode 2010-2015. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015 disusun dengan mengacu pada RPJM Nasional 2010-2014 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan secara simultan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang sedang menyusun RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015, sehingga diharapkan terjadi keterpaduan kebijakan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Selain itu, RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015 sebagai tahap lima tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas harus mampu meletakkan dasar-dasar kebijakan strategis untuk pencapaian Visi Kabupaten Kepulauan Anambas 20 tahun ke depan yang dituangkan dalam RPJPD. Karena periode RPJP, baik nasional maupun daerah, harus berakhir pada tahun 2025, maka masa berlaku RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah dari tahun 2005 hingga tahun 2025 (20 tahun) yang dapat dipilah menjadi empat tahapan RPJMD sebagai berikut :

1. RPJMD ke-1 (2005–2010) Kabupaten Kepulauan Anambas masih bergabung dengan Kabupaten Natuna sehingga RPJMD-nya juga masih tergabung dengan Kabupaten Natuna, walaupun sudah dibentuk pada tahun 2008. Pada tahap peralihan ini, agendanya adalah menyiapkan pemekaran dari Kabupaten Natuna menjadi Kabupaten Kepulauan Anambas dan peralihan menuju

- pemerintahan daerah tersendiri yang memiliki otonomi yang sama dengan kabupaten induknya.
2. RPJMD ke-2 (2011–2015) diarahkan untuk menata dan meletakkan dasar-dasar pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas yang mandiri dan berdaya saing dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 3. RPJMD ke-3 (2016–2020) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan dasar-dasar pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas yang mandiri dan berdaya saing di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta penguatan daya saing perekonomian.
 4. RPJMD ke-4 (2021–2025) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.

Dokumen RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas ini merupakan payung sekaligus menjadi koridor bagi rencana-rencana pembangunan yang lebih pendek periodenya, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta *master plan* dan *road map* dari sektor-sektor pembangunan daerah. Dokumen RPJPD ini diharapkan dapat menginspirasi pembangunan melalui visi pembangunan jangka panjangnya, memberikan koridor pembangunan melalui misi pembangunan jangka panjangnya serta memberikan arahan pembangunan jangka panjang dalam penetapan prioritas dan tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Maksud dari disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025 ini adalah untuk :

1. Memberikan arah, koridor dan tujuan jangka panjang pembangunan daerah melalui Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara RPJMD 5 (lima) tahun pertama, kedua, ketiga dan keempat secara berkesinambungan.

3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antarpelaku pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam jangka panjang secara berkelanjutan.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkeadilan dalam jangka panjang secara berkelanjutan.
5. Menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan antarnegara (wilayah perbatasan), antardaerah, antarwilayah, antarsektor pembangunan dan antartingkat pemerintah dalam jangka panjang secara berkelanjutan
6. Memberikan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja 5 (lima) tahunan setiap kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.

1.2.2. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD, dimana selanjutnya RPJMD ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selain itu, RPJPD ini juga merupakan pedoman bagi penyusunan *grand design* atau cetak biru pembangunan sektoral di daerah yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan *master plan* sektoral.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum dokumen RPJPD ini adalah :

1. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4169);
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Nomor Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
22. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 229);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.4. Kedudukan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunannya wajib menyusun 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

Dari segi waktu, dokumen tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) yang terdiri dari RTRW dan RPJPD, dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang meliputi RPJMD dan Renstra SKPD, serta dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun) yang mencakup RKPD dan Renja SKPD.

RPJPD merupakan arah, tujuan dan kondisi yang diinginkan dalam jangka panjang pembangunan daerah yang dituangkan dalam visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Program Pembangunan yang disusun oleh Kepala Daerah harus berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN. RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra, Renja dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dari RKPD dan RKA SKPD inilah selanjutnya disusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hirarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh

pemerintah di bawahnya. Skema kedudukan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Kedudukan RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini disusun dalam sistematika berikut ini :

1. Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang disusunnya RPJPD, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan dan sistematika penulisan dokumen RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan mengenai, kondisi geografis daerah termasuk potensi daerah dan wilayah rawan bencana, administrasi, kependudukan, kondisi kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum seperti: pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, ketertiban dan ketenteraman, lingkungan hidup, pariwisata dan budaya, serta perlindungan sosial, kondisi daya saing daerah dan kualitas sumberdaya manusia.

3. Bab III. Isu Strategis dan Skenario Pembangunan Jangka Panjang

Bab ini menguraikan isu-isu yang digolongkan sebagai isu strategis, baik pada level internasional, regional maupun internal daerah. Isu strategis ini selanjutnya

dirumuskan fokus utamanya dan dikembangkan menjadi Skenario Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang merupakan kondisi yang diinginkan atau dicita-citakan untuk dapat dicapai pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

4. Bab IV. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang

Bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai Visi dan Misi jangka panjang pembangunan daerah.

5. Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang

Bab ini berisi mengenai sasaran pokok pembangunan jangka panjang, arah kebijakan pembangunan serta tahapan pembangunan setiap 5 (lima) tahun.

6. Bab VI. Kaidah Pelaksanaan Pembangunan

Bab ini berisi mengenai pedoman transisi, prinsip kaidah pelaksanaan serta mekanisme pengendalian dan evaluasi.

7. Bab VII. Penutup

Bab ini berisi mengenai yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait keberadaan dokumen RPJP sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Gugusan kepulauan Anambas sendiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda pernah menjadi pusat kewedanaan yang berpusat di Tarempa. Ketika itu, Tarempa adalah pusat pemerintahan di Pulau Tujuh termasuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang disebut *district* dan Jemaja wilayahnya disebut *onderdistrict* dengan ibukota Letung.

Berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia tanggal 18 Mei 1956, Provinsi Sumatera Tengah menggabungkan diri kedalam Wilayah Republik Indonesia, dan Kepulauan Riau diberi status Daerah Otonomi Tingkat II yang dikepalai Bupati sebagai kepala daerah yang membawahi empat kewedanaan sebagai berikut (i) Kewedanaan Tanjungpinang, meliputi Bintan Selatan (termasuk Bintan Timur, Galang, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur); (ii) Kewedanaan Karimun, meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur dan Moro; (iii) Kewedanaan Lingga, meliputi Lingga, Singkep dan Senayang; dan (iv) Kewedanaan Pulau Tujuh, meliputi Siantan, Jemaja, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 9 Agustus 1964 No. UP/247/5/1965, terhitung 1 Januari 1966 semua daerah administratif kewedanaan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapus.

Setelah terjadi pemekaranan wilayah Provinsi Riau, terhitung sejak disahkannya UU No.25 Tahun 2002 tanggal 24 September 2002, Kepulauan Riau resmi menjadi provinsi ke 32 di Indonesia. Kepulauan Anambas tergabung dalam Kabupaten Natuna sampai dengan tanggal 24 Juni 2008 saat disahkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau.

2.1.1. Kondisi Geografi

A. Karakteristik Lokasi

A.1. Posisi Geografi

Kabupaten Kepulauan Anambas, terletak antara 2°10' 0"-3°40' 0"LU s/d 105° 15' 0"-106° 45' 0" BT (UU No 33 Tahun 2008). Sebagai kabupaten yang terletak di beranda

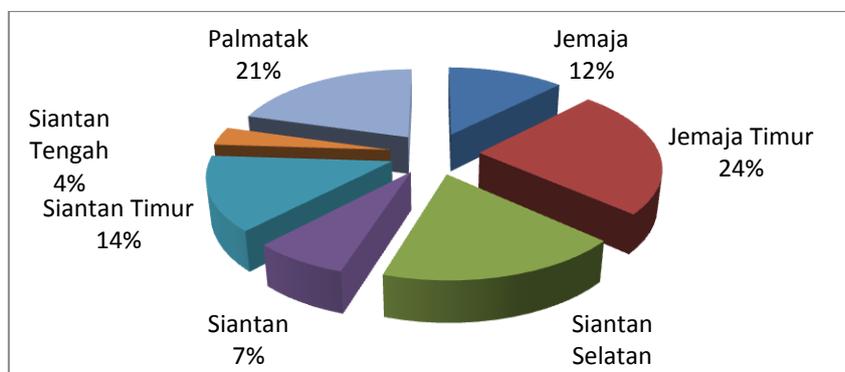
depan wilayah Indonesia, Kabupaten Kepulauan Anambas berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga lainnya yaitu (i) Laut Cina Selatan/Vietnam di sebelah utara, (ii) Kepulauan Tambelan di sebelah selatan, (iii) Laut Cina Selatan/Malaysia di sebelah barat, dan (iv) Laut Natuna di sebelah timur.

Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar di Perairan Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Dari total luas Kabupaten Kepulauan Anambas ± 46.634,95 km² hanya 590,14 km² (1,27 persen) yang merupakan daratan, selebihnya 46.033,81 km² (98,73 persen) merupakan lautan (UU Nomor 33 Tahun 2008).

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Anambas terbagi dalam tujuh kecamatan, dua kelurahan, dan 52 desa meliputi:

1. Kecamatan Siantan dengan ibukota Tarempa, terdiri atas enam desa, satu kelurahan.
2. Kecamatan Siantan Selatan dengan ibukota Air Bini, jumlah tujuh desa;
3. Kecamatan Siantan Timur dengan ibukota Nyamuk, jumlah desa enam;
4. Kecamatan Siantan Tengah dengan ibukota Air Asuk, jumlah desa enam;
5. Kecamatan Palmatak dengan ibukota Tebangladan, jumlah desa lima belas;
6. Kecamatan Jemaja dengan ibukota Letung, jumlah desa delapan dan jumlah kelurahan satu;
7. Kecamatan Jemaja Timur dengan ibukota Ulu Maras, jumlah desa empat.

Luas masing-masing kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas (persentase luasnya) dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1. Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas

Untuk melakukan pergerakan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini umumnya melalui transportasi laut, sedangkan untuk melakukan perjalanan ke provinsi dan kabupaten lain dapat dilakukan melalui transportasi laut dan udara.

Tabel 2.1. Jarak Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten dan Provinsi

No	Kecamatan	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten (mil)	Jarak ke Ibu Kota Provinsi (mil)
1	Jemaja	38.70	166.23
2	Jemaja Timur	37.37	164.15
3	Palmatak	8.26	208.41
4	Siantan	0	200.34
5	Siantan Selatan	8.19	196.80
6	Siantan Tengah	5.61	205.16
7	Siantan Timur	10.44	199.93

Sebagai kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga, maka jarak Tarempa ke negara tetangga terdekat yaitu Singapura adalah $\pm 202,29$ mil, ke Johor (Malaysia) $\pm 205,97$ mil dan Kuching (Malaysia) $\pm 318,91$ mil sedangkan jarak Tarempa ke ibu kota Jakarta $\pm 640,72$ mil.

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 238 pulau yang tersebar di tujuh kecamatan, dengan jumlah pulau terbanyak di Kecamatan Siantan Timur, Siantan Selatan dan Palmatak. Selain itu, juga terdapat 5 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Kelima pulau tersebut adalah Pulau Tokong Berlayar, Pulau Tokong Nenas di Kecamatan Palmatak, Pulau Damar, Pulau Mangkai di Kecamatan Jemaja dan Pulau Tokong Malang Biru di Kecamatan Jemaja Timur (Sumber Ranperda RTRW Kab. Kep. Anambas). Kelima pulau terluar adalah pulau-pulau yang tidak berpenghuni. Sementara itu pada tahun 2011 melalui kegiatan Penyusunan Database Pulau-pulau Gugusan Kepulauan Anambas sebagai salah satu Pengembangan Model Database Multi Tematik pulau-pulau berbasis spasial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bekerjasama dengan Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) kemudian berganti nama menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG), diketahui bahwa terdapat 17 pulau lagi yang selama ini belum terdata, dengan demikian jumlah pulau-pulau di Kepulauan Anambas adalah sebanyak 255 pulau.

A.2. Topografi dan Jenis Tanah

Secara topografi wilayah daratan setiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagian besar berbukit dengan pergunungan yang terjal yang disusun oleh batuan metamorf. Umumnya batuan-batuan yang tersingkap merupakan batuan metamorf yang berunsur partier, batuan lainnya antara lain adalah batuan sedimen, endapan alluvial, trias, permokarbon, sekis, granit, diorerm, hiporit dan erufsi kwarter. Ketinggian Wilayah cukup bervariasi yakni berkisar 3-610 meter dari permukaan laut. Sedangkan struktur tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan tanah mineral, umumnya terdiri dari jenis tanah podsolik, latosol dan alluvial. Tanah tersebut terbentuk dari bahan induk metamorf, batuan beku basa, batuan sediman dan endapan pantai, rawa, dan sungai.

Tanah-tanah yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki kesamaan di tiap kecamatan, ini dapat dibagi menurut letak geografis yaitu:

1. Daerah-daerah dengan ketinggian di atas 40 m dari permukaan laut adalah kompleks Podsolik dan Latosol.
2. Daerah-daerah dengan ketinggian antara 15 – 20 m di atas permukaan laut adalah kompleks Podsolik, Latosol, Organosol dan Glei Humus.
3. Daerah-daerah dengan ketinggian kurang dari 15 m di atas permukaan laut adalah kompleks Organosol dan Glei Humus.

Tanah-tanah di Kabupaten Kepulauan Anambas banyak didominasi oleh tanah-tanah ber pH rendah yaitu tanah mineral yang telah mengalami pencucian maupun tanah organik. Kondisi tanah-tanah seperti ini merupakan faktor pembatas bagi usaha pertanian yang mengakibatkan terjadinya penurunan produktivitas tanaman, karena diperlukan perlakuan khusus untuk mengembalikan kondisi tanah menjadi lebih baik agar dapat diusahakan.

A.3. Geologi

Secara geologi, di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat beberapa formasi yang berasal dari masa Tersier dan Kuarter. Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi atau di bawah permukaan. Formasi Geologi ini menunjukkan kelompok-kelompok batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang.

Formasi geologi yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Anambas terbagi kedalam 4 kelompok, yaitu :

- ❑ ALUVIUM : Kerakal, Kerikil, Pasir, dan Lumpur. Merupakan endapan sungai, rawa dan pantai, sebagian tersebar di P. Siantan dan P. Jemaja. Namun satuan ini tidak dapat terpetakan pada skala ini.
- ❑ GRANIT ANAMBAS : Granit, Granodiorit, dan Sienit. Umumnya berwarna kelabu, coklat dan merah muda. Di Anyer Rajah (Jemaja) dan di sebelah barat Tarempa (Siantan) granitnya mengandung pirit, arsenopirit, dan hematit. Di beberapa tempat dijumpai senolit andesit, diorit, dan bahan terkarsikkan. Granit di kepulauan Anambas diduga terdiri dari beberapa tubuh pluton kesebandingannya dengan granit sejenis di Kep. Tambelan dan Natuna.
- ❑ FORMASI MATAK : Serpih, Rijang, Batulempung, Sekis, Filit, Ampibolit, dan Batutanduk. Batuan sedimen yang berhimpunan dengan batuan malihan ini umumnya terkarsikkan dan sedikit terubah.

Batuan malih-sentuh dijumpai disekitar terobosan granit. Satuan yang terlipat cukup kuat dengan sumbu lipatan timurlaut-baratdaya, tersingkap luas di P.Matak dan P.Telaga. sekis dan ampibolit dijumpai di P. Jemaja bagian utara. P.mentalak di timur P.Bajau tersusun oleh amfibolit hitam kehijauan dan diterobos granit kelabu coklat. Satuan ini dapat disebandingkan dengan kumpulan batuan Jura akhir-kapur di Kalimantan Barat. Nama P.Matak dimana runtunan tersingkap baik dipakai untuk memberi nama satuan.

- ❑ BATUAN MAFIK DAN ULTRAMAFIK : Diorit, Andesit, Gabro, Gabro forfir, Diabas dan Basal; bersisipan Rijang radiola. Andesit berwarna gelap tersingkap di P.Matak bagian tengah dan selatan, P.Siantan tengah dan di pulau-pulau kecil di timur Siantan. Diabas tersingkap setempat di ujung selatan P.Siantan. Basal bersisipan rijang radiola dijumpai di beberapa tempat di P.Siantan bagian barat dan utara.

A.4. Hidrologi

Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 6 aliran DAS (Daerah Aliran Sungai) yaitu; DAS Bajau, DAS Jemaja, DAS Matak, DAS Mubur, DAS Siantan dan DAS Batu Garam.

A.5. Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Kepulauan Anambas sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret hingga Mei, ketika angin bertiup dari arah Utara. Sedangkan musim hujan terjadi pada bulan September hingga Februari, ketika angin bertiup dari arah Timur dan Selatan. Curah hujan rata-rata dalam satu tahun per jam berkisar ± 14.5 mm/h dengan kelembaban udara sekitar 47.25 persen dan temperatur berkisar 30 °C.

Berdasarkan arah angin musim di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dibagi dalam 4 periode yaitu periode Januari - Maret: bertiup angin Utara dan Timur laut, curah hujan sedang dengan temperatur udara sedang, periode April - Juni: bertiup angin Timur Laut/Tenggara, hujan sedikit dengan temperatur udara agak panas (lebih kurang 32°C), periode Juli - September: bertiup angin tenggara, hujan turun agak banyak dengan temperatur udara agak panas (lebih kurang 32°C), periode Oktober - Desember: bertiup angin barat/utara, hujan banyak turun pada bulan September, Oktober dan November, temperatur udara agak dingin (lebih kurang 28.9°C) dan lembab pada malam hari.

Keadaan tekanan udara dari data yang ada adalah minimum 1.004,80 mb dan maksimum 1.014,20 mb. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki lautan lepas luas. Rata-rata kecepatan angin minimum berkisar antara 2 sampai 7 knot dan rata-rata maksimum berkisar antara 10 sampai 25 knot. Hal ini sangat berpengaruh pada kelancaran transportasi terutama laut dan udara.

B. Potensi Pengembangan Wilayah

B.1. Pertanian

Dalam rangka pembangunan pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas Dinas Pertanian dan Kehutanan masih menitikberatkan pada pencapaian produksi yang optimal khususnya pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura. Luas lahan potensial yang masih dapat dikembangkan merupakan salah satu modal dasar bagi pengembangan di bidang pertanian.

Jumlah potensi lahan pertanian yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 7.185 hektar, dengan luas terbesar di Kecamatan Jemaja Timur, Jemaja dan Siantan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak lahan-lahan pertanian merupakan lahan terlantar dan menjadi lahan tidur. Kondisi ini diperburuk dengan

berpindahanya tenaga kerja di sektor pertanian menjadi tenaga kerja sektor non pertanian. Sehingga tingkat pemanfaatan lahan menjadi semakin berkurang.

Perkembangan produksi pertanian untuk tanaman dan hortikultura sangat memprihatinkan mengingat potensi lahan di Kabupaten Kepulauan Anambas cukup besar. Meskipun pertumbuhan di tahun 2009 - 2010 cukup baik namun belum sebanding dengan luas lahan pertanian yang tersedia. Masih kecilnya luas tanam dan panen merupakan kendala dimana menunjukkan indikasi lahan-lahan yang tersedia belum dimanfaatkan secara baik dan optimal. Sehingga perlu meningkatkan perluasan areal melalui pembukaan lahan baru dan optimasi lahan yang ada.

B.2. Perkebunan

Di Kabupaten Kepulauan Anambas mayoritas komoditi perkebunan yang dikembangkan terdiri dari kelapa, karet dan cengkeh yang semuanya tersebar hampir seluruh kecamatan. Hanya beberapa kecamatan yang membudidayakan komoditi kopi dan lada namun masih dalam skala kecil dan hanya untuk kebutuhan rumah tangga.

Komoditas perkebunan di Kabupaten Kepulauan Anambas didominasi tanaman kelapa, cengkeh dan karet. Pada umumnya merupakan komoditas lokal yang berumur lebih dari 10 – 20 tahun dan jarang menggunakan sarana produksi sehingga pertumbuhan dan produktivitasnya masih rendah. Mengingat lahan pertanian yang masih cukup luas sehingga perlu peremajaan melalui penanaman bibit unggul yang memiliki produktivitas tinggi.

B.3. Peternakan

Pada sektor peternakan Kabupaten Kepulauan Anambas masih memiliki peluang pengembangan bibit ternak baik ternak ruminansia maupun unggas. Potensi lahan yang masih ada memungkinkan bagi pengembangan ke arah itu. Namun tidak semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dikembangkan ternak-ternak besar seperti sapi dan kambing.

Wilayah kecamatan yang menjadi prioritas utama sebagai daerah sentra ternak besar antara lain Kecamatan Jemaja Timur, Jemaja, Palmatak dan Siantan sedangkan Kecamatan Siantan selatan, Siantan Timur dan Siantan Tengah akan diarahkan sebagai penunjang kabupaten sebagai sentra peternakan unggas.

Jika dibandingkan jumlah populasi ternak yang ada dan potensi pengembangan ternak dan HMT terlihat belum termanfaatkannya lahan-lahan sebagai daerah peternakan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini merupakan tantangan bagi Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengembangkan potensi peternakan yang ada dengan menfokuskan pada pembentukan sentra-sentra peternakan baru dengan pemanfaatan lahan dan pembinaan kelompok-kelompok tani-ternak.

Penyediaan produksi telur berasal dari ternak ayam ras petelur, ayam buras dan itik. Perkembangan produksi telur unggas di Kabupaten Kepulauan Anambas hingga tahun 2010 masih didominasi oleh ayam buras.

Berdasarkan data produksi daging dan telur pada tahun 2010, terlihat produksi pada komoditas ini masih jauh dari pemenuhan kebutuhan daging dan telur bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk itu dalam usaha pemenuhan kebutuhan akan daging dan telur bagi masyarakat perlu peningkatan produksi daging dan telur melalui peningkatan populasi jumlah ternak melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha peternakan yang ada di kelompok tani-ternak di Kabupaten Kepulauan Anambas.

B.4. Kehutanan

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki Luas wilayah Administrasi 5.901.400 Ha yang terdiri dari 5.837.012,75 Ha (98,91 persen dari luas administrasi) adalah lautan, 64.387,25 (1,09 persen dari luas administrasi) adalah daratan dan 5.949,54 Ha (0,10 persen dari luas administrasi atau 9,24 persen dari luas daratan) adalah kawasan hutan Dari luas 5.949,54 Ha kawasan hutan tersebut, berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai dengan surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 173/Kpts-II/1986 telah ditetapkan sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 2.495,78 Ha berada di pulau Jemaja dan 3.453,76 Ha di pulau Siantan.

B.5. Perikanan dan Kelautan

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas 98,65 persen merupakan wilayah lautan sehingga kondisi ini sangat mendukung bagi pengembangan usaha perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya perikanan. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya lebih memilih pembesaran ikan sebagai sektor utama dalam melakukan aktivitas perekonomian, terutama yang tinggal di kawasan

pedesaan pada umumnya memilih berdomisili di kawasan pantai dan sebagian besar bekerja sebagai nelayan.

Pada tahun 2011, jumlah rumah tangga nelayan baik nelayan tangkap maupun budidaya berjumlah 4.078 orang. Produksi perikanan tangkap sebanyak 1.454,39 ton dan produksi budidaya sebanyak 62,91 ton. Sementara, Luas baku lahan usaha budidaya tahun 2011 sebanyak 28.980 m² dengan jumlah pembudidaya sebanyak 1.716 rumah tangga. Hasil produksi perikanan tangkap selain didistribusikan di pasar ikan/depo, jumlah diekspor ke luar negeri antara lain ke Hongkong dan Singapura.

Masyarakat nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas umumnya menggunakan perahu untuk menangkap ikan, baik perahu bermotor maupun perahu tanpa motor. Jumlah Kapal Motor yang di miliki adalah 2.596 unit dan Perahu Tanpa Motor sejumlah 595 Unit, sehingga totalnya 3.191 unit (Kepulauan Anambas Dalam Angka 2011)

B.6. Industri

Untuk sektor perindustrian di Kabupaten Kepulauan Anambas pada Industri Kecil dan Menengah meliputi industri kerajinan, industri bahan bangunan, industri pengolahan makanan, industri pengolahan perikanan & pertanian. Sektor tersebut telah dikembangkan seperti usaha Kerupuk Ikan Tradisional, Pengrajin Busana dan Pengrajin Pompong Kayu, Perbengkelan, Pengrajin Souvenir. Pada tahun 2011 jumlah industri kecil yang tercatat adalah sebanyak 172 buah industri yang mampu menyerap 1544 tenaga kerja. Sedangkan industri sedang di Kepulauan Anambas tercatat sebanyak 4 buah dengan tenaga kerja sebanyak 22 orang.

B.7. Pertambangan

Jenis-jenis bahan tambang yang bisa dijumpai di Kabupaten Kepulauan Anambas, antara lain Minyak Bumi dan Gas Alam, Granit, diorit, Pasir, dan biji besi yang dijadikan sebagai sumber ekonomi. Cadangan Minyak Bumi dan Gas Alam di lepas pantai Kepulauan Anambas mencapai 326,15 MMSTB dan Gas Alam 53,06 TSCF. Sementara cadangan Sumber Daya Mineral Batu Granit sebesar (35.893.718.436,0 m³ dengan luas 14.230,0 Ha) Jenis tambang granit di Kepulauan Anambas terdapat di Kecamatan Jemaja, Siantan Selatan, Siantan, dan Palmatak (Kepulauan Anambas Dalam Angka 2011). Sedangkan Jenis tambang pasir kuarsa cadangannya mencapai 5.414.904,0 m³. Untuk mineral diorit cadangannya mencapai 2.570.809.586,0 m³

dengan luas 360,0 Ha. Sementara untuk biji besi cadangannya mencapai 172.931,68 m³, dengan luas 36,0 Ha.

B.8. Pariwisata

Salah satu misi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu menumbuhkan kembangkan kegiatan Industri dan Pariwisata yang berbasis kelautan. Oleh karenanya bidang pariwisata menjadi salah satu fokus pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kabupaten Kepulauan Anambas kaya dengan keindahan pantai dan terumbu karang. Kawasan objek wisata tersebut dapat dijumpai di sejumlah Kawasan baik pulau-pulau kecil maupun besar. Objek wisata laut/pantai seperti Terumbu Karang di Kecamatan Jemaja. Objek wisata air terjun seperti Air Terjun Ulu Maras di Kecamatan Jemaja Timur, dan Air Terjun Temburun di Kecamatan Siantan Timur. Wisata Bahari seperti Pulau Langok di Palmatak, Pantai Padang Melang di Kecamatan Jemaja dan Pulau Bawah di Kecamatan Siantan Selatan.

Guna mendukung pengembangan pariwisata, sektor perhotelan dan rumah makan/restoran juga perlu dikembangkan. Berdasarkan data Tahun 2011 di Kabupaten Kepulauan Anambas telah terdapat 22 hotel melati dan 19 rumah makan serta tiga restoran.

Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan analisa peta geologi, kawasan Kepulauan Anambas tidak termasuk dalam jalur gempa, baik gempa tektonik maupun vulkanik. Potensi bencana yang dapat dialami oleh Kabupaten Anambas antara lain :

1. Banjir

Fenomena pemanasan global tidak dapat terelakkan terutama pada wilayah kepulauan seperti Anambas. Menurut IPCC (penelitian tahun 1990) hingga tahun 2100, peningkatan muka air laut akibat pemanasan global akan berkisar antara 30 cm untuk kondisi optimis hingga 110 cm, kondisi pesimis di mana kondisi rata-rata adalah sebesar 58 cm. Pada bulan-bulan tertentu, menurut informasi kantor BMG Kabupaten Kepulauan Anambas terutama pada tahun genap, diTarempa sering terjadi banjir atau genangan air pasang.Selain itu di Kecamatan Siantan terdapat sungai yang berhulu dari mata air Pegunungan. Sementara sepanjang pathway sungai tersebut terdapat fasilitas-fasilitas perkantoran, perumahan dan jalan. Daerah 1 mil sepanjang pathway kawasan sungai tersebut merupakan daerah rawan banjir.

2. Badai Angin Puting Beliung

Letak Kabupaten Kepulauan Anambas yang berada di tengah lautan lepas dan terluas di Asia Tenggara yaitu Laut Cina Selatan memiliki potensi terjadinya badai angin terutama akibat terjadinya perubahan musim yang tidak menentu.

3. Badai Gelombang Laut atau Tsunami

Letak Kabupaten Kepulauan Anambas yang berada di tengah lautan lepas dan terluas di Asia Tenggara yaitu Laut Cina Selatan memiliki potensi terjadinya badai gelombang atau tsunami. Gelombang besar yang terjadi pada musim timur dan barat juga dapat menyebabkan terjadinya abrasi pantai terutama di wilayah pemukiman penduduk dan wilayah pesisir yang sudah mengalami kerusakan lingkungan.

4. Longsor

Potensi terjadinya longsor dapat terjadi di beberapa lokasi yang kondisi lingkungannya sudah mulai rusak akibat aktivitas masyarakat. Dari pengamatan di lapangan, terdapat beberapa tempat seperti di daerah nyamuk yang sudah mengalami longsor.

2.1.2. Demografi

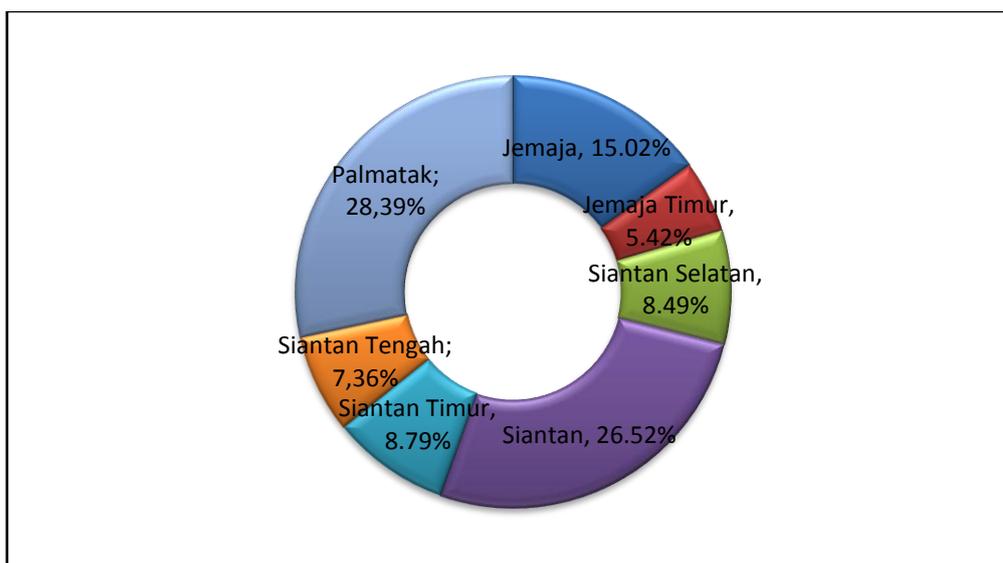
Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2011 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 39.318 jiwa atau naik 5,09 persen dari jumlah pada tahun 2010 yang berjumlah 37.411 jiwa.

Distribusi persebaran penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas terpusat di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan. Sebanyak 28,39 persen penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas berdiam di Kecamatan Palmatak (10.620 jiwa) dan 26,52 persen penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas bermukim di Kecamatan Siantan (9.920 jiwa). Sedangkan sisanya sebanyak 45,10 persen penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas tersebar di lima kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Jemaja, Jemaja Timur, Siantan Selatan, Siantan Timur dan Siantan Tengah. Luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk masing-masing kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2010 disajikan pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk(jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Jemaja	78,26	5.818	74,34
2	Jemaja Timur	154,24	2.094	13,58
3	Siantan Selatan	115,48	3.352	29,03
4	Siantan	45,39	10.529	231,97
5	Siantan Timur	88,92	3.400	38,24
6	Siantan Tengah	22,14	2.824	127,55
7	Palatak	129,94	11.301	86,97
	Kepulauan Anambas	634,37	39.318	61,98

Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2011



Gambar 2.3. Distribusi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010

Dalam Kependudukan ketenagakerjaan merupakan suatu fenomena yang perlu mendapat perhatian cukup serius. Dengan bertambahnya jumlah penduduk berarti akan meningkatkan penyediaan jumlah tenaga kerja. Bila hal tersebut tidak diiringi dengan penyerapan tenaga kerja secara optimal akan mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 61.91 persen

atau 24.342 jiwa dengan laki-laki sebanyak 41.86 persen dan perempuan sebanyak 20.05 Persen.

Tabel 2.3. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Di Kab.Kep.Anambas Tahun 2011

No	Lapangan Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian dan Perikanan	21,06	2,64	23,70
2	Industri, Pertambangan dan Penggalian	13,21	1,09	14,30
3	Perdagangan	5,37	10,73	16,10
4	Angkutan dan Komunikasi	2,93	-	2,93
4	Jasa kemasyarakatan	14,57	17,15	31,72
5	Lainnya	10,48	0,78	11,26
Jumlah				100

Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka 2011

Dari data diatas dapat dilihat bahwa lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah pada sektor jasa kemasyarakatan yakni sebesar 31,72 persen, disusul sektor pertanian dan perikanan sebesar 23,75 persen dan sektor perdagangan 16,10 persen

Karakteristik jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai pola hampir sama dengan kabupaten/ kota di Indonesia yang baru dimekarkan sehingga keberadaan jumlah penduduk dipengaruhi oleh kekuatan eksternal dibandingkan dengan pertumbuhan alamiah penduduk itu sendiri. Secara umum hampir seluruh kecamatan mengalami perkembangan penduduk yang dominan dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Hal ini dapat dipahami mengingat perkembangan pergerakan / mobilitas penduduk adalah disebabkan dominan dipengaruhi oleh penciptaan lapangan pekerjaan. Kecamatan Siantan dan Kecamatan Palmatak adalah kecamatan yang mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap pengaruh eksternal tersebut.

Adapun Kecamatan Jemaja Timur dan Kecamatan Siatan Selatan relatif mempunyai sensitivitas yang rendah terhadap pengaruh eksternal tersebut. Sensitivitas kegiatan yang terpengaruh biasanya adalah pada sektor perdagangan/jasa dan pertambangan.

Berdasarkan data perkembangan penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2010, dapat dilakukan perhitungan proyeksi penduduk tahun 2010-2025 dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 5,542 persen.

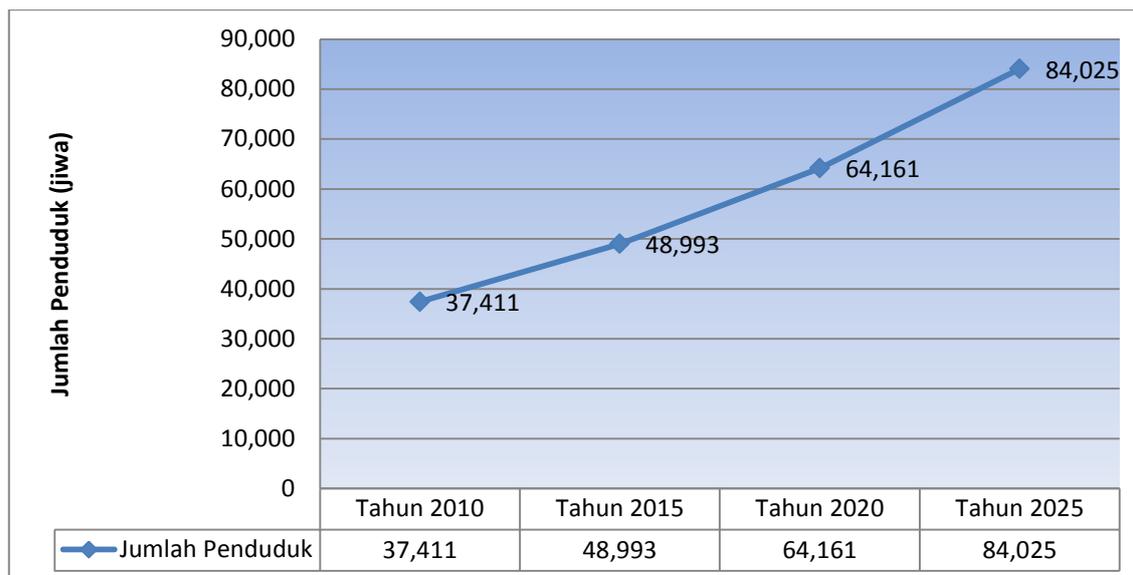
Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015 menunjukkan Kecamatan Palmatak merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan jumlah 13.908 jiwa kemudian Kecamatan Siantan menempati urutan kedua tertinggi dengan jumlah penduduk mencapai 12.991 jiwa. Kecamatan Jemaja Timur merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah dengan jumlah penduduk sebesar 2.656 jiwa.

Hasil analisis proyeksi penduduk pada tahun 2025 menyatakan perkembangan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Palmatak yaitu 23.853 jiwa atau 28,39 persen dari total jumlah penduduk pada tahun 2025, sedangkan perkembangan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Jemaja Timur atau sekitar 5,42 persen dari total jumlah penduduk pada tahun 2025. Untuk lebih jelasnya mengenai proyeksi penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.4. Proyeksi Penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010-2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			
		2010	2015	2020	2025
1	Jemaja	5.621	7.361	9.640	12.625
2	Jemaja Timur	2.028	2.656	3.478	4.555
3	Siantan Selatan	3.177	4.161	5.449	7.136
4	Siantan	9.920	12.991	17.013	22.280
5	Siantan Timur	3.290	4.309	5.642	7.389
6	Siantan Tengah	2.755	3.608	4.725	6.188
7	Palmatak	10.620	13.908	18.214	23.853
	Jumlah	37.411	48.993	64.161	84.025

Sumber: Hasil Analisis



Gambar 2.4. Diagram Proyeksi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas 2010-2025

Kecenderungan Perkembangan Penduduk

Penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas terpusat di berbagai sentra-sentra ekonomi dan pemerintahan. Daerah tersebut adalah Kecamatan Siantan dan Kecamatan Palmatak. Penduduk yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak daripada yang tinggal di pedesaan. Terdapat sekitar 54,90 persen dari populasi yang tinggal di daerah perkotaan (Kecamatan Siantan dan Kecamatan Palmatak), sedangkan sisanya tinggal di pedesaan. Pola pergerakan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas, secara lokal yaitu antara wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan. Dimana kecenderungan perkembangan penduduk tersebut didorong oleh faktor penyediaan lapangan pekerjaan dan penyediaan kebutuhan barang dan jasa yang lebih memadai di daerah perkotaan dibandingkan dengan wilayah pedesaan.

Melihat kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang berupa kepulauan, maka pemerataan fasilitas-fasilitas pelayanan sangat sulit tercapai. Hal tersebut dikarenakan belum meratanya distribusi penduduk pada tiap wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pergerakan penduduk secara regional yaitu antar kecamatan yang memiliki fasilitas-fasilitas sosial dan umum, sentra-sentra ekonomi dan perdagangan yang belum memadai di kecamatan merupakan salah satu indikator dan pendorong distribusi penduduk menjadi tidak merata.

Pada saat ini kecenderungan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami kenaikan yang cukup signifikan, berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa dari ketujuh kecamatan yang ada, perkembangan penduduk yang meningkat

terdapat di Kecamatan Siantan dan Palmatak. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2025, jumlah penduduk di kedua kecamatan tersebut pada tahun 2025 sebesar 46.133 jiwa.

Kecenderungan Struktur Penduduk dan Kesempatan Kerja

Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu potensi pembangunan yang sangat menentukan keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Permasalahan yang ditimbulkan dalam aspek ketenagakerjaan adalah apabila ternyata sumber daya manusia usia produktif banyak yang menjadi pengangguran. Hal ini tentunya mengakibatkan terbentuknya permasalahan sosial yang memerlukan perhatian tersendiri.

Dari hasil data jumlah penduduk berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat disimpulkan bahwa lapangan usaha terbesar pada tahun 2010 di Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat pada sektor pertanian dan perikanan berjumlah 6.566 jiwa. Dikarenakan Kabupaten Kepulauan Anambas dikelilingi oleh laut, maka lapangan usaha pada sektor perikanan yang menjadi andalan di Kabupaten Kepulauan Anambas itu sendiri, akan tetapi potensi perikanan harus dibudidayakan dan dikembangkan, karena jika tidak maka prosentase jumlah penduduk yang bekerja pada sektor ini akan stagnan dan cenderung menurun.

Walaupun sektor tersebut diperkirakan akan mengalami penurunan akan tetapi di sektor lain diperkirakan akan mengalami peningkatan yang dapat menyeimbangkan penurunan pada sektor tersebut, karena tergantung dari nilai ekonomisnya dan potensi yang ada. Penduduk yang dulunya bekerja di sektor yang mengalami penurunan akan pindah ke sektor yang mengalami peningkatan. Hal ini dapat dimengerti dengan adanya potensi lain yang bernilai tinggi ekonomisnya maka akan terjadi perubahan struktural dimana terjadi pergeseran struktur perekonomian dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, dan berkorelasi positif pada jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor yang mengalami peningkatan.

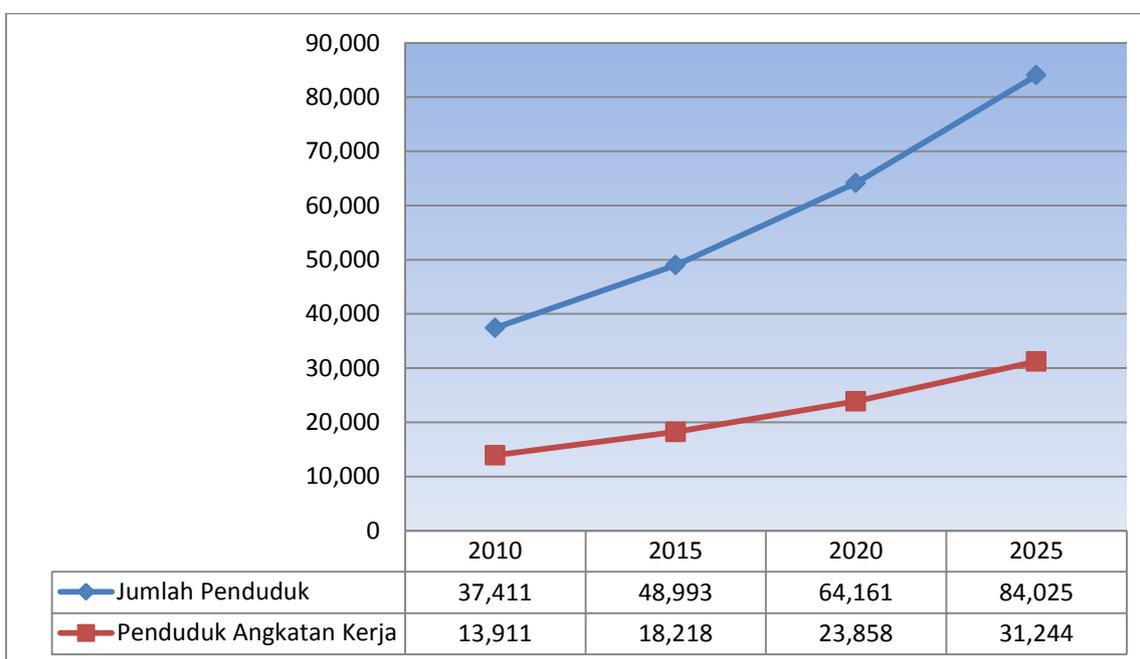
Untuk menghitung persediaan angkatan kerja maka ada dua tahapan kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu proyeksi penduduk dan proyeksi angkatan kerja. Dengan menggunakan asumsi bahwa proporsi jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk adalah tetap.

Dengan mengacu kepada asumsi, bahwa prosentase tenaga kerja sama dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 5,542 persen maka dapat diketahui jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil proyeksi penduduk, tenaga kerja untuk tahun 2010-2025 di Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat dilihat pada **tabel 2.5 dan gambar 2.5**.

Tabel 2.5 Proyeksi Penduduk dan Tenaga Kerja
di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010-2025

Deskripsi	Jumlah (jiwa)			
	2010	2015	2020	2025
Jumlah Penduduk	37.411	48.993	64.161	84.025
Penduduk Angkatan Kerja	13.911	18.218	23.858	31.244

Sumber : Hasil Analisis



.Gambar 2.5.Diagram Proyeksi Penduduk dan Tenaga Kerja
di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010-2025

Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Perkembangan penduduk disuatu daerah sangat dipengaruhi oleh perkembangan *spatial*, semakin tinggi perkembangan penduduk daerah tersebut maka semakin tinggi pula konflik *spatial* (ruang) didaerah tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa perkembangan penduduk suatu daerah sangat dipengaruhi oleh perkembangan *spatial* disekitarnya.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas relatif tersebar tidak merata ke setiap wilayahnya, hal ini merupakan pencerminan dari Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari gugusan pulau dan merupakan wilayah kepulauan. Kepadatan penduduk

yang menepati wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 dengan Kepadatan jumlah penduduk rata-rata sekitar $\pm 132,45$ jiwa/km² dan luas wilayah ± 634.37 km², yang tersebar di 7 Kecamatan, yaitu :

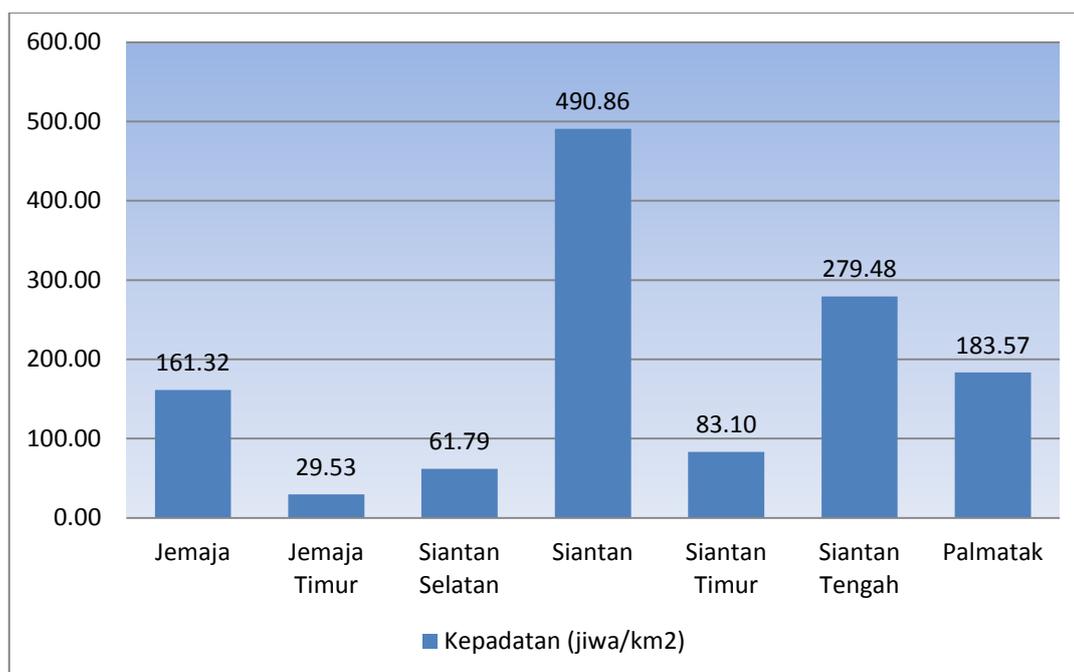
- ❑ Bahwa kepadatan penduduk di kecamatan yang termasuk klasifikasi sangat padat penduduk dengan asumsi kepadatan > 500 jiwa/km² belum ada Kecamatan yang mencapai kepadatan tersebut.
- ❑ Bahwa kepadatan penduduk di kecamatan yang termasuk klasifikasi padat penduduk dengan asumsi kepadatan 250-500 jiwa/Km² meliputi Kecamatan Siantan dengan jumlah kepadatan penduduk 490,86 jiwa/km² dan Kecamatan Siantan Tengah dengan jumlah kepadatan penduduk 279,48 jiwa/km².
- ❑ Bahwa kepadatan penduduk di kecamatan yang termasuk klasifikasi jarang penduduk dengan asumsi kepadatan < 250 jiwa/km² yang terdiri dari, Kecamatan Jemaja dengan kepadatan penduduk 161,32 jiwa/km², Kecamatan Jemaja Timur dengan kepadatan penduduk 29,53 jiwa/km², Kecamatan Siantan Selatan dengan kepadatan penduduk 61,79 jiwa/km², Kecamatan Siantan Timur dengan kepadatan penduduk 83,10 jiwa/km², dan Kecamatan Palmatak dengan kepadatan 183,57 jiwa/km².

Untuk lebih jelasnya mengenai distribusi dan kepadatan penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2010 - 2025 dapat dilihat pada **tabel 2.6. dan gambar 2.6.**

Tabel 2.6 Distribusi Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2010 – 2025

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Kepadatan (jiwa/km ²)			
			2010	2015	2020	2025
1	Jemaja	78,26	71,82	94,06	123,18	161,32
2	Jemaja Timur	154,24	13,15	17,22	22,55	29,53
3	Siantan Selatan	115,48	27,51	36,03	47,18	61,79
4	Siantan	45,39	218,55	286,21	374,82	490,86
5	Siantan Timur	88,92	37,00	48,45	63,46	83,10
6	Siantan Tengah	22,14	124,44	162,96	213,41	279,48
7	Palmatak	129,94	81,73	107,03	140,17	183,57
		634,37	58,97	77,23	101,14	132,45

Sumber : Hasil Analisis, 2010.



Gambar 2.6. Diagram Distribusi Kepadatan Penduduk
Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diuraikan menurut indikator-indikator di bawah ini.

1. Indikator Pertumbuhan PDRB

Sepanjang periode 2010-2011, PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas telah meningkat dari Rp.2.704,66 milyar menjadi Rp.2.773,71 milyar menurut harga berlaku, dan dari Rp.961.460,43 juta menjadi Rp.984.590,39 menurut harga konstan 2000. Dengan demikian, selama jangka waktu 2010-2011 pertumbuhan PDRB yang diraih kabupaten ini relatif rendah, yakni 2,41 persen. Angka ini masih jauh di bawah pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 7,06 persen untuk kurun waktu yang sama. Akan tetapi, apabila subsektor minyak bumi dan gas alam (migas) tidak diperhitungkan, maka pertumbuhan PDRB yang dicapai Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebesar 7,39 persen, cukup jauh di atas pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau yang hanya 7,06 persen.

Tabel 2.7. Perkembangan PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Lapangan Usaha, 2008-2010 (Rp juta)

Lapangan Usaha	2008		2009		2010		Pertumbuhan Rata2 (persen)
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000	
Pertanian	358.045	158.594	370.525	167.239	405.776	179.534	6,40
Pertambangan dan Penggalian	1.895.366	683.798	1.934.752	688.242	2.046.467	691.552	0,57
<i>Minyak Bumi dan Gas Alam</i>	1.893.329	682.869	1.932.478	687.219	2.043.863	690.439	0,55
<i>Penggalian</i>	2.037	930	2.274	1.023	2.604	1.113	9,40
Industri Pengolahan	7.230	5.113	8.079	5.351	8.666	5.664	5,25
Listrik, Gas dan Air Bersih	386	172	405	178	436	185	3,71
Bangunan	17.023	6.183	21.082	7.607	23.981	8.409	16,79
Perdagangan, Hotel dan Restoran	100.142	37.590	122.608	41.582	135.673	44.691	9,05
Pengangkutan dan Komunikasi	23.739	9.485	27.757	10.454	30.159	11.107	8,23
Kuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	15.529	6.060	16.235	6.427	17.258	6.567	4,12
Jasa-jasa	31.102	12.388	33.031	13.053	36.245	13.750	5,35
Produk Domestik Regional Bruto	2.448.561	919.384	2.534.475	940.133	2.704.662	961.460	2,26
PDRB Tanpa Migas	555.232	236.515	601.997	252.914	660.799	271.021	7,05
PDRB Migas	1.893.329	682.869	1.932.478	687.219	2.043.863	690.439	0,55

Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka 2010,

Laju pertumbuhan ekonomi nonmigas sebesar 7,16 persen yang diraih Kabupaten Kepulauan Anambas di atas merupakan angka tertinggi di antara tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Laju pertumbuhan ekonomi nonmigas Kabupaten Kepulauan Anambas unggul tipis atas Kota Batam yang meraih laju pertumbuhan ekonomi nonmigas rata-rata 7,20 persen setahun pada periode yang sama. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi nonmigas terendah dialami oleh Kabupaten Bintan sekitar 6,18 persen.

Proyeksi Pertumbuhan PDRB

Di dalam RPJPD 2005-2025 ini, pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas bertumpu pada sektor-sektor perikanan, pertambangan migas dan pariwisata. Ketiga sektor inilah yang menjadi faktor-faktor determinan pertumbuhan PDRB. Adapun besarnya target pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan harga konstan 2000 untuk jangka waktu 2010-2025 adalah rata-rata 6,22 persen per tahun atau rata-rata 6,56 persen per tahun tanpa migas. PDRB migas sendiri ditargetkan tumbuh rata-rata 3,0 persen setahunnya. Dengan target-target di atas serta memperhitungkan indeks harga konsumen di level Provinsi Kepulauan Riau (Batam dan Tanjungpinang) rata-rata 117,39 per tahun, maka hasil perhitungan nilai PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9.

Tabel 2.8. Proyeksi PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku, 2010-2025 (Rp juta)

Lapangan Usaha	2010*	2011**	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian	405.321	405.776	443.883	485.568	531.168	581.050	635.617	695.308	760.605	832.034	910.171	995.646	1.089.148	1.191.430	1.303.318	1.425.714
Pertambangan dan Penggalian	2.002.887	2.046.467	2.118.536	2.193.144	2.270.379	2.350.333	2.433.104	2.518.789	2.607.492	2.699.319	2.794.380	2.892.788	2.994.662	3.100.123	3.209.299	3.322.319
<i>Minyak Bumi dan Gas Alam</i>	2.000.533	2.043.863	2.115.841	2.190.353	2.267.490	2.347.343	2.430.008	2.515.584	2.604.174	2.695.884	2.790.824	2.889.107	2.990.851	3.096.179	3.205.215	3.318.092
<i>Penggalian</i>	2.435	2.604	2.787	2.984	3.194	3.419	3.660	3.917	4.193	4.489	4.805	5.143	5.505	5.893	6.308	6.753
Industri Pengolahan	8.648	8.666	9.276	9.930	10.629	11.378	12.179	13.037	13.955	14.938	15.990	17.116	18.322	19.612	20.994	22.473
Listrik, Gas dan Air Bersih	433	436	467	500	535	572	613	656	702	752	804	861	922	987	1.056	1.131
Bangunan	22.814	23.981	25.952	28.084	30.392	32.889	35.592	38.516	41.681	45.106	48.813	52.824	57.164	61.862	66.945	72.446
Perdagangan, Hotel dan Restoran	132.683	135.673	146.821	158.886	171.942	186.071	201.361	217.907	235.813	255.190	276.159	298.852	323.409	349.984	378.743	409.865
Pengangkutan dan Komunikasi	30.038	30.159	32.637	35.319	38.221	41.362	44.761	48.439	52.419	56.727	61.388	66.432	71.891	77.799	84.191	91.110
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	17.379	17.258	18.474	19.775	21.167	22.658	24.254	25.963	27.791	29.749	31.844	34.087	36.488	39.057	41.808	44.753
Jasa-jasa	35.357	36.245	38.798	41.530	44.456	47.587	50.938	54.526	58.367	62.478	66.878	71.588	76.631	82.028	87.805	93.990
Produk Domestik Regional Bruto	2.655.562	2.704.662	2.834.844	2.972.736	3.118.889	3.273.901	3.438.419	3.613.141	3.798.826	3.996.292	4.206.427	4.430.194	4.668.636	4.922.883	5.194.160	5.483.799
PDRB Tanpa Migas	655.029	660.799	719.003	782.382	851.399	926.558	1.008.411	1.097.557	1.194.651	1.300.407	1.415.603	1.541.087	1.677.785	1.826.704	1.988.945	2.165.708
PDRB Migas	2.000.533	2.043.863	2.115.841	2.190.353	2.267.490	2.347.343	2.430.008	2.515.584	2.604.174	2.695.884	2.790.824	2.889.107	2.990.851	3.096.179	3.205.215	3.318.092

Catatan : * Angka sementara.

** Angka sangat sementara

Sumber : Hasil Proyeksi.

Tabel 2.9. Proyeksi PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Lapangan Usaha
Berdasarkan Harga Konstan 2000, 2010-2025 (Rp juta)

Lapangan Usaha	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian	179.534	193.897	209.408	226.161	244.254	263.794	284.898	307.690	332.305	358.889	387.600	418.608	452.097	488.265	527.326	569.512
Pertambangan dan Penggalian	691.552	712.299	733.668	755.678	778.348	801.698	825.749	850.522	876.037	902.319	929.388	957.270	985.988	1.015.567	1.046.034	1.077.415
<i>Minyak Bumi dan Gas Alam</i>	<i>690.439</i>	<i>711.152</i>	<i>732.487</i>	<i>754.461</i>	<i>777.095</i>	<i>800.408</i>	<i>824.420</i>	<i>849.153</i>	<i>874.627</i>	<i>900.866</i>	<i>927.892</i>	<i>955.729</i>	<i>984.401</i>	<i>1.013.933</i>	<i>1.044.351</i>	<i>1.075.681</i>
<i>Penggalian</i>	<i>1.113</i>	<i>1.180</i>	<i>1.251</i>	<i>1.326</i>	<i>1.405</i>	<i>1.489</i>	<i>1.579</i>	<i>1.674</i>	<i>1.774</i>	<i>1.880</i>	<i>1.993</i>	<i>2.113</i>	<i>2.240</i>	<i>2.374</i>	<i>2.516</i>	<i>2.667</i>
Industri Pengolahan	5.664	6.004	6.364	6.746	7.151	7.580	8.034	8.517	9.028	9.569	10.143	10.752	11.397	12.081	12.806	13.574
Listrik, Gas dan Air Bersih	185	196	208	220	234	248	262	278	295	313	331	351	372	395	418	443
Bangunan	8.409	8.998	9.627	10.301	11.022	11.794	12.620	13.503	14.448	15.460	16.542	17.700	18.939	20.264	21.683	23.201
Perdagangan, Hotel dan Restoran	44.691	47.819	51.167	54.748	58.581	62.681	67.069	71.764	76.787	82.163	87.914	94.068	100.653	107.698	115.237	123.304
Pengangkutan dan Komunikasi	11.107	11.884	12.716	13.607	14.559	15.578	16.669	17.835	19.084	20.420	21.849	23.379	25.015	26.766	28.640	30.645
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6.567	6.961	7.379	7.821	8.291	8.788	9.315	9.874	10.467	11.095	11.760	12.466	13.214	14.007	14.847	15.738
Jasa-jasa	13.750	14.575	15.450	16.376	17.359	18.401	19.505	20.675	21.915	23.230	24.624	26.102	27.668	29.328	31.087	32.953
Produk Domestik Regional Bruto	961.460	1.002.633	1.045.987	1.091.659	1.139.798	1.190.562	1.244.122	1.300.658	1.360.366	1.423.457	1.490.153	1.560.695	1.635.343	1.714.371	1.798.079	1.886.785
PDRB Tanpa Migas	271.021	291.481	313.500	337.198	362.703	390.154	419.701	451.505	485.739	522.590	562.260	604.966	650.942	700.439	753.728	811.104
PDRB Migas	690.439	711.152	732.487	754.461	777.095	800.408	824.420	849.153	874.627	900.866	927.892	955.729	984.401	1.013.933	1.044.351	1.075.681

Catatan : * Angka sementara.

** Angka sangat sementara

Sumber : Hasil Proyeksi.

2. Indikator Laju Inflasi Provinsi

Laju inflasi di Provinsi Kepulauan Riau dihitung di dua kota, yakni Batam dan Tanjungpinang, sebagaimana dapat diperhatikan dalam Tabel 2.10. Selama kurun waktu 2008-2010, laju inflasi di Kota Tanjungpinang berfluktuatif. Pada tahun 2008 inflasi di kota ini mencapai 11,90 persen, lalu menurun tajam hingga 1,43 persen tahun 2009, namun setahun kemudian meningkat menjadi 6,17 persen. Begitu pula halnya dengan kecenderungan laju inflasi di Kota Batam. Untuk waktu yang sama, laju inflasi di kota ini menurun dari 8,39 persen (2008) menjadi 1,88 persen (2009) dan kemudian naik hingga angka 7,40 persen (2010).

Tabel 2.10. Laju Inflasi Provinsi Kepulauan Riau, 2008-2010

Laju Inflasi	2008		2009		2010	
	Tanjung-pinang	Batam	Tanjung-pinang	Batam	Tanjung-pinang	Batam
Indeks Harga Konsumen (IHK)	116,72	110,35	118,39	112,43	125,69	120,75
Laju inflasi bulanan (persen)	(0,10)	(0,14)	0,08	(0,12)	0,26	0,61
Laju inflasi tahun kalender (persen)	11,90	8,39	1,43	1,88	6,17	7,40
Laju inflasi tahun ke tahun (persen)	11,90	8,39	1,43	1,88	6,17	7,40

Sumber : Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau*, Juni 2011, dalam www.bi.go.id.

3. Indikator PDRB per Kapita

Berdasarkan harga berlaku, PDRB per Kapita Kabupaten Kepulauan Anambas dengan migas telah mengalami penurunan selama periode 2008-2010, yakni dari Rp72.904.226 menjadi Rp72.295.902. Sedangkan PDRB per kapita tanpa migas naik dari Rp16.531.661 menjadi Rp17.663.227. Sementara itu, menurut harga konstan 2000, PDRB per kapita dengan migas merosot sebesar -3,10 persen, tepatnya dari Rp27.374.018 menjadi Rp25.699.928. Sebaliknya, PDRB per kapita tanpa migas naik sekitar 1,43 persen, yakni dari Rp7.042.077 menjadi Rp7.244.420 (perhatikan Tabel 2.11).

Tabel 2.11. Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Kepulauan Anambas, 2008-2010 (Rp)

Dengan/Tanpa Migas	2008		2009		2010		Pertum-buhan PDRB (persen)
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000	
Dengan Migas	72.904.226	27.374.018	71.101.241	26.374.154	72.295.902	25.699.928	-3,10
Tanpa Migas	16.531.661	7.042.077	16.888.207	7.095.169	17.663.227	7.244.420	1,43

Sumber :BPS Provinsi Kepulauan Riau, *Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2010*, hlm. 249-250.

Dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas meraih PDRB per kapita dengan migas yang paling tinggi. Sedangkan PDRB per kapita tanpa migas tertinggi dicapai oleh Kota Batam.

Proyeksi PDRB per Kapita

Proyeksi PDRB per kapita Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2010-2025 dilakukan dengan cara membagi nilai PDRB hasil proyeksi (sebagaimana telah ditampilkan dalam dengan hasil proyeksi penduduk pertengahan tahun. Proyeksi penduduk pertengahan tahun dihitung dengan menggunakan angka rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas selama jangka waktu 2000-2010, yakni sebesar 3,09 persen per tahun (hasil Sensus Penduduk 2010). Adapun hasil proyeksi PDRB per kapita dapat diperhatikan dalam Tabel 2.12.

Berdasarkan hasil proyeksi selama periode 2010-2025, maka PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas akan mengalami laju pertumbuhan masing-masing sebesar 1,81 persen per tahun menurut harga berlaku dengan migas, rata-rata 1,46 persen per tahun menurut harga konstan 2000 dengan migas, rata-rata 5,07 persen setahun menurut harga berlaku tanpa migas atau rata-rata 4,36 persen setahun menurut harga konstan 2000 tanpa migas.

Tabel 2.12. Proyeksi PDRB per Kapita Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010-2025 (Rp000)

Lapangan Usaha	2010*	2011**	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dengan Migas																
Harga Berlaku	70.983	70.129	71.301	72.528	73.813	75.159	76.570	78.049	79.601	81.229	82.937	84.731	86.615	88.594	90.674	92.861
Harga Konstan 2000	26.164	26.467	26.783	27.115	27.462	27.825	28.206	28.604	29.020	29.456	29.911	30.388	30.888	31.410	31.956	32.527
Tanpa Migas																
Harga Berlaku	17.825	17.443	18.411	19.433	20.513	21.655	22.862	24.137	25.485	26.909	28.415	30.007	31.689	33.468	35.348	37.336
Harga Konstan 2000	7.375	7.694	8.027	8.375	8.739	9.119	9.515	9.929	10.362	10.814	11.286	11.779	12.295	12.833	13.395	13.983

Catatan : * Angka sementara.

** Angka sangat sementara

Sumber : Hasil Proyeksi.

4. Indikator Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Perkembangan PDRB per kapita dan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau selama jangka waktu 2008-2010 dapat dilihat pada Tabel 2.13. Dari tabel ini, dapat dihitung indeks ketimpangan regional berdasarkan formulasi Indeks Williamson, dimana hasil perhitungannya ditampilkan pada Tabel 2.14.

Tabel 2.13. Perkembangan PDRB per Kapita dan Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau, 2008-2010

Wilayah	2008			2009			2010		
	PDRB per kapita (Rp000)		Jumlah Penduduk (jiwa)	PDRB per kapita (Rp000)		Jumlah Penduduk (jiwa)	PDRB per kapita (Rp000)		Jumlah Penduduk (jiwa)
	HB	HK		HB	HK		HB	HK	
Dengan Migas									
Kabupaten Kepulauan Anambas	72.904	27.374	33.586	71.101	26.374	35.646	72.296	25.700	37.411
Provinsi Kepulauan Riau	38.116	24.081	1.537.063	39.612	23.757	1.612.965	40.128	24.372	1.685.698
Tanpa Migas									
Kabupaten Kepulauan Anambas	16.532	7.042	33.586	16.888	7.095	35.646	17.663	7.244	37.411
Provinsi Kepulauan Riau	35.036	22.971	1.537.063	36.617	22.692	1.612.965	37.097	23.348	1.685.698

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Tabel 2.14. Perkembangan Indeks Williamson Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap Provinsi Kepulauan Riau, 2008-2010

Dengan/Tanpa Migas	2008		2009		2010	
	HB	HK	HB	HK	HB	HK
Dengan Migas	0,1349	0,0202	0,1182	0,0164	0,1194	0,0081
Tanpa Migas	0,0781	0,1025	0,0801	0,1022	0,0780	0,1027

Sumber : diolah dari Tabel 2.13.

Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa sepanjang periode 2008-2010 indeks Williamson dengan migas cenderung menurun, baik berdasarkan harga berlaku (dari 0,1349 menjadi 0,1194) maupun harga konstan (dari 0,0202 menjadi 0,0081). Artinya, kesenjangan regional di Provinsi Kepulauan Riau semakin mengecil. Sementara itu, indeks Williamson tanpa migas cenderung stabil, yakni dari 0,0781 menjadi 0,0780 (menurut harga berlaku) dan dari 0,1025 menjadi 0,1027 (harga konstan). Secara keseluruhan, ketimpangan regional antara Kabupaten Kepulauan Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau relatif kecil.

5. Indikator Angka Kriminalitas yang Tertangani

Sepanjang kurun waktu 2008-2010, angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Kepulauan Anambas mencatat kenaikan dari 2,08 menjadi 3,74 untuk tindak pidana umum. Sebaliknya, untuk tindak pidana khusus terjadi penurunan dari 8,34 menjadi 4,81 (perhatikan Tabel 2.15).

Tabel 2.15. Perkembangan Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2008-2010

Perkara Kriminalitas	2008	2009	2010
Jumlah penduduk (jiwa)	33.586	35.646	37.411
Tindak Pidana Umum (kasus)			
Perkara masuk	7	9	14
Perkara diselesaikan	7	9	14
Sisa	-	-	-
Angka kriminalitas yang tertangani (indeks)	2,08	2,52	3,74
Tindak Pidana Khusus (kasus)			
Perkara masuk	28	25	18
Perkara diselesaikan	28	25	18
Sisa	-	-	-
Angka kriminalitas yang tertangani (indeks)	8,34	7,01	4,81

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, *Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2010*, diolah.

Kesejahteraan Sosial

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

Fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap

- 1) indikator angka melek huruf,

Ukuran yang paling mendasar pada tingkat pendidikan dasar adalah kemampuan baca tulis penduduk berusia diatas 15 tahun. Pada tahun 2010 jumlah penduduk diatas 15 tahun adalah 25.429 orang dari jumlah tersebut yang melek huruf adalah 91,26 persen atau 23.207 orang melek huruf atau 2.222 orang buta huruf.

Tabel 2.16. Angka Melek Huruf

IPM (Indikator Pendidikan)	Tahap RPJP			
	2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025
Angka Melek huruf	91,26 persen	94,17 persen	97,09 persen	100 persen

*dibagi proporsional

2) Angka rata-rata lama sekolah,

Adalah angka rata rata lama sekolah yang menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk berusia diatas 15 tahun. Dari hasil survey Sosial ekonomi nasional tahun 2009, angka rata rata lama sekolah adalah 5,35 tahun yang berarti rata rata penduduk hanya bersekolah hingga tingkat SD atau < 6 tahun lama bersekolah sejak awal SD.

Tabel 2.17. RLS dan Jenjang Pendidikan

IPM (Indikator Pendidikan)	Tahap RPJP			
	2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025
Angka Rata-rata lama sekolah	5,35	9	12	>12
Jenjang	SD	SMP	SMA	>SMA

3) Angka partisipasi kasar,

APS menggambarkan partisipasi anak yang bersekolah pada usia tertentu, angka partisipasi sekolah biasanya dikelompokan pada SD (7-12 tahun), SLTP (13-15 tahun) dan SLTA (16-18 tahun).

Angka partisipasi sekolah pada tahun 2010 untuk tingkat SD adalah 95,06 persen, SLTP sebesar 79,61 persen dan SLTA 53,51 persen. Pada tingkat SLTA terlihat banyak penduduk pada usianya yang tidak memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Tabel 2.18. Angka Parisipasi Kasar

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2015	2020	2025
1.	APM SD/MI	0,95	1	1	1
2.	APM SMP/MTs	0,79	0,9	0,95	1
3.	APM SMA/MA/SMK	0,53	0,7	0,8	0,9

4) Angka Pendidikan Ditamatkan,

APT adalah angka pendidikan siswa yang menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu yang mendapatkan ijazah. APT untuk melihat keberhasilan pembangunan pendidikan serta untuk melihat ketersediaan tenaga kerja. Angka pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2009 untuk tingkat SD 24,9 persen, SLTP 11,29 persen, SLTA 16,98 persen, D I/II 1,8 persen dan D IV/S I 2,04 persen. Dapat dikatakan bahwa penduduk yang lulus SD cukup dominan sehingga perlu ditingkatkan tingkat pendidikan dari SD ke yang lebih tinggi hingga SMA.

Tabel 2.19. Angka Pendidikan Ditamatkan

NO	APT	2009	2015	2020	2025
1.	SD (persen)	24,9	25	27	25
2.	SMP (persen)	11,29	15	20	30
3.	SMA (persen)	16,98	20	30	40
4.	Perguruan Tinggi (persen)	3,84	4,8	5,71	6,56

5) Angka Partisipasi Murni,

Angka pendidikan murni (APM) yaitu anak yang bersekolah tepat pada usianya, posisi pada tahun 2009 adalah untuk SD 96,93 persen, SLTP 51,93 persen dan SLTA 61,56 persen. Dilihat dari domisili siswa justru siswa yang bertempat tinggal di pedesaan memiliki prosesntase lebih tinggi dari yang bertempat tinggal di perkotaan.

6) Angka kelangsungan hidup bayi,

Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian

secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Untuk saat ini belum tersedia data yang akurat mengenai AKB di Anambas

7) Angka balita gizi buruk

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk.

8) Angka usia harapan hidup

Angka usia harapan hidup adalah angka perkiraan rata rata lama hidup masyarakat dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas setiap umur.

Angka usia harapan hidup di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 67,40 tahun, sehingga bayi yang lahir pada tahun 2010 di prediksi akan dapat berusia hingga 67,40 tahun. Sedangkan pada tahun terjadi peningkatan menjadi 67,53 tahun.

9) Persentase penduduk yang memiliki lahan,

Dikepulauan Anambas jumlah kepemilikan lahan diasumsikan dari jumlah petani yang terhadap luasan tiap komoditas yang digarap meliputi kelapa, sagu, cengkeh dan karet sebagai berikut :

Tabel 2.20. Jumlah Petani Pemilik Tanah

Uraian	Kecamatan							Total
	Jemaja	Jemaja Timur	Siantan Selatan	Siantan	Siantan Timur	Siantan tengah	Palmatak	
Kelapa	1.248	850	876	458	965	451	2.213	7.061
Sagu								-
Cengkeh	699	86	107	516	154	512	1.285	3.359
Karet	98	165	123	463	85	98	568	1.600
Jumlah Petani Yang Memiliki Tanah								12.020
Jumlah Penduduk								37.411
Rasio (persen)								32,13

Jumlah penduduk yang memiliki lahan adalah 32,13 persen dibandingkan jumlah penduduk

Tabel 2.21. Kepemilikan Tanah di Kabupaten Anambas, 2010

No	Kecamatan	Luas Tanah (Km2)	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk yang Memiliki Tanah	Persentase Penduduk Memiliki Tanah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Jemaja	78,26	5.621	2.045	36,38
2	Jemaja Timur	154,24	2.028	1.101	54,29
3	Siantan	45,39	9.920	1.437	14,49
4	Siantan Selatan	115,48	3.177	1.106	34,81
5	Siantan Tengah	22,14	2.755	1.061	38,51
6	Siantan Timur	8,92	3.290	1.204	36,60
7	Palmatak	129,37	10.620	4.066	38,29

10) Rasio penduduk yang bekerja.

Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2010 yaitu penduduk yang berusia diatas 15 tahun adalah sebesar 13.911 orang dengan perbandingan laki laki 10.996 orang dan perempuan 2.915 orang. Sehingga rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk pada tahun tersebut adalah 37,18 persen.

Tabel. 2.22. Ratio Penduduk Yang Bekerja

Indikator Pekerjaan	Persentase (persen)			
	2010	2015	2020	2025
Rasio penduduk yang bekerja	37,18	42,8	52,8	62,8

Seni, Budaya dan Olah Raga

Seni Budaya

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kualitas manusia ditentukan oleh ketangguhan budaya, sehingga pembangunan manusia pada dasarnya adalah pembangunan akhlak, watak dan perilaku budaya yang mendukung kemajuan bangsa. Saat ini fasilitas untuk mengekspresikan seni dan budaya belum banyak tersedia di Anambas, dan perlu dikembangkan dimasa yang akan datang.

Olah Raga

Olahraga adalah aktifitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya jasmani tetapi juga secara rohani (misalkan catur). Dalam membentuk jiwa sportifitas dan meningkatkan kualitas olahraga antara lain dilakukan melalui pembinaan klub olahraga pelajar di Kecamatan.

Saat ini fasilitas olahraga yang ada di Kepulauan Anambas, berupa lapangan sepakbola 12 buah, terdapat 4 buah lapangan tennis, 12 buah lapangan vollley, 4 lapangan basket, dan sebagainya. Berdasarkan fungsinya ketersediaan sarana olahraga ini adalah untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani juga untuk menyalurkan bakat dan hobi bagi masyarakatnya. Fasilitas olahraga ini menyebar di beberapa tempat, baik pada pusat

pusat kegiatan, seperti di sekolah, perkantoran, kantor dinas/polisi maupun di permukiman penduduk.

2.2. Aspek Pelayanan Umum

Secara umum layanan urusan wajib pemerintah daerah dapat dikelompokkan menjadi layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan.

2.2.1. Layanan Urusan Wajib

Pendidikan

Dari data yang berhasil dihimpun dan hasil survey lapangan, bahwa jumlah fasilitas pendidikan di wilayah Kepulauan Anambas pada tahun 2010 terdiri dari: 14 buah Taman PAUD; 14 buah TK; 58 buah SD; 15 buah SMP, dan 4 buah SMU. Berdasarkan jenis dan banyaknya fasilitas pendidikan yang ada menunjukkan, bahwa penyebaran sarana pendidikan di wilayah Kepulauan Anambas cukup baik dikarenakan pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP sudah tersebar di tujuh Kecamatan yang ada. Selain itu, di wilayah ini juga tersedia lembaga pendidikan lainnya sebagai sarana peningkatan dan pengembangan pendidikan bagi siswa di luar pendidikan formal. Untuk jenjang TK, ratio murid sekolah 49 sedangkan ratio murid guru 10. Untuk jenjang SD ratio murid sekolah 92, dan ratio murid guru 10. Untuk jenjang SMP, ratio murid sekolah 118, dan ratio murid guru 10. Untuk tingkat SMU, ratio murid sekolah 233 dan ratio murid guru 11.

Salah satu bentuk dari keseriusan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah dalam mengalokasikan dana pada APBD mini untuk bidang pendidikan. Hal ini untuk mendukung program Pemerintah (secara nasional) dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui Program BOS berupa penyaluran dana langsung ke sekolah (baik SD maupun SLTP).

Kesehatan

Sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Posyandu dengan jumlah sarana kesehatan keseluruhan sebanyak 97 buah. Dari sarana kesehatan tersebut, terdapat 1 rumah sakit yang ada di Palmatak merupakan rumah sakit swasta yang dimiliki oleh

perusahaan Conoco Philips (Concorsium), walaupun dapat melayani keperluan masyarakat umum yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Untuk melayani kepentingan masyarakatnya maka ketersediaan fasilitas kesehatan didukung pula oleh armada yang berupa ambulan 2 buah, dan 2 unit kapal speedboat untuk menjangkau dan memperlancar pelayanan sekaligus sebagai puskesmas keliling. Selain itu, didukung dan ditunjang oleh tenaga medis yang menyebar di setiap puskesmas maupun rumah sakit dan poliklinik. Selain itu terdapat 7 Puskesmas, 21 Pustu, dan 1 Balai Pengobatan. Banyaknya tenaga kesehatan yang ada, yaitu 3 orang dokter spesialis, 20 orang dokter umum, 7 orang dokter gigi, 55 orang bidan, dan 117 perawat.

Pekerjaan Umum

Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu sumber bagi kehidupan manusia untuk keperluan hidup dan penghidupan sehari-hari. Dalam kebutuhan sehari-hari, keperluan air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang terdapat di Kecamatan Jemaja dan Siantan. Kedua lokasi PDAM tersebut baru mampu melayani 1.129 pelanggan PDAM, serta 1.135 rumah Non PDAM. Sistem pelayanan air bersih ini dilakukan dengan membuat bak-bak penampungan sementara yang selanjutnya didistribusikan melalui pipa/selang ke rumah-rumah penduduk.

Air Limbah

Secara umum sistem pengelolaan air limbah yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari air limbah yang berupa lumpur tinja dan air limbah yang dihasilkan oleh sisa buangan rumah tangga. Sistem pengolahan air limbah di Kabupaten Kepulauan Anambasmenggunakan sistem pengolahan sanitasi setempat (*on site sanitation*) dan belum memiliki pengolahan air limbah terpusat. Pembuangan air limbah domestik dikelola sendiri oleh sebagian masyarakat dengan membangun tangki septik, effluen dari tangki septik kemudian dibuang ke saluran yang ada, laut, sungai. Bagi sebagian masyarakat yang belum mempunyai tangki septik, masih menggunakan laut dan sungai atau anak sungai serta kolam, ke kebun sebagai prasarana untuk buang air besar.

Sampah

Sistem pengangkutan dan pelayanan sampah yang dikelola oleh Dinas PU belum seluruh sampah yang ada dapat diangkut dikarenakan terbatasnya armada dan tenaga yang tersedia.

Terdapat tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di beberapa lokasi yang ada, baik pasar, perumahan, perkantoran serta sekolah. Dari setiap TPS tersebut sampah-sampah diangkut oleh petugas Dinas PU menggunakan truk-truk pengangkut sampah dan gerobak melewati jalur-jalur yang dapat dilalui oleh truk dan gerobak ke tempat pembuangan akhir (TPA) di atas tebing - Kecamatan Siantan.

Drainase

Sistem drainase di Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya masih belum baik dan belum merata ke seluruh kawasan. Daerah yang telah memiliki saluran drainase antara lain sepanjang jalan utama, kompleks perumahan, serta daerah perkantoran. Di samping itu pada umumnya saluran drainase tersebut masih bersatu dengan saluran pembuangan air limbah. Saluran di jalan-jalan utama Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki jenis tertutup dengan kondisi baik, dan di beberapa jalan dengan jenis terbuka.

Di beberapa kawasan teridentifikasi kondisinya buruk karena tidak mengalir dengan baik, sehingga menggenang bahkan meluap ke permukaan jalan yang ada. Hal ini terlihat dengan adanya lokasi rawan banjir dan adanya lokasi genangan yang terdapat di beberapa kawasan.

Perumahan dan Permukiman

Secara umum kondisi perumahan dan permukiman di Kabupaten Kepulauan Anambas relatif baik, meskipun masih terdapat kantong-kantong kawasan perumahan yang kondisinya cukup memprihatinkan, seperti permukiman nelayan. Kepadatan bangunan rumah di wilayah ini bervariasi, kepadatan perumahan padat berada pada pusat-pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang mengelompok dalam suatu kawasan. Sedangkan kepadatan sedang hingga rendah berada di wilayah perdesaan yang menyebar pada blok-blok kawasan.

Dari pengamatan lapangan diketahui, bahwa jumlah bangunan rumah umumnya berada dan mengikuti jaringan jalan yang membentuk pola grid dan pola linier. Bangunan yang membentuk pola grid umumnya berada di kawasan perkotaan yang dibentuk oleh pola jaringan jalan, sehingga kondisi dan tata letak bangunan teratur dan tertata rapih. Pada bangunan dengan pola grid ini kepadatan bangunan cukup padat dengan struktur bangunan umumnya terbuat dari papan dan beratapkan seng, walaupun ada beberapa bangunan dengan struktur beton/tembok. Sedangkan bangunan dengan pola linier umumnya mengikuti jaringan jalan dan berada pada kawasan perdesaan serta kawasan tertentu, seperti di pinggiran pantai.

Penataan Ruang

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai kabupaten baru, maka aktivitas pembangunan yang sedang pesat berkembang harus segera ditata dan disusun koridornya sehingga jelas bagi masyarakat dimana mereka harus mengembangkan aktivitasnya. Dokumen yang memuat aturan mengenai rencana penataan ruang adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai acuan utama penyusunan Rencana Tata Ruang yang lebih rinci. Status dokumen RTRW saat ini masih pada tahap pembahasan. Dokumen RTRW merupakan tanggung jawab Bappeda untuk menyusun dan mengendalikannya.

Untuk penataan kawasan yang lebih rinci, umumnya dilaksanakan oleh SKPD terkait dengan mengacu pada RTRW yang telah disahkan. Beberapa Rencana Penataan Ruang yang akan disusun oleh SKPD diantaranya adalah :

Penataan Ruang Kawasan Perkantoran

Penataan Ruang Kawasan Waterfront

Penataan Ruang Kawasan Minapolitan

Penataan Ruang Kawasan Agropolitan

Perencanaan Pembangunan

Penyelenggaraan Perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten. Perencanaan Pembangunan disusun mengacu pada UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dirumuskan dari tingkat Nasional

(RPJPN dan RPJPD), tingkat provinsi (RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi) dan tingkat Kabupaten (RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten). Dari rencana-rencana inilah diturunkan Rencana Kerja Tahunan yang dibiayai melalui DPA.

Status dokumen rencana pembangunan (RPJPD) Kabupaten Anambas hingga saat ini adalah masih pada tahap pembahasan, sedangkan RPJMD telah disahkan melalui Perda No.8 Tahun 2011 tentang RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015.

Perhubungan

Sistem transportasi sangat berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan sistem pertahanan keamanan yang dapat menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi, serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat. Sistem transportasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi transportasi darat, laut dan udara.

Kendaraan sepeda motor ini merupakan sarana transportasi utama yang terjadi di berbagai wilayah, baik sebagai sarana angkutan pribadi maupun angkutan umum (ojek). Moda angkutan umum lainnya adalah gerobak motor, dimana angkutan ini hanya dipergunakan untuk mengangkut barang dagangan atau material lainnya dari suatu tempat (pasar, pelabuhan) ke tempat tujuan yang dikehendaki. Transportasi darat sebagai angkutan umum yang terjadi saat ini juga hanya melayani pergerakan penumpang dari bandara Matak ke pelabuhan Payalaman waktu tempuh hanya \pm 10 menit

Untuk memperlancar arus pergerakan barang dan orang, baik antar wilayah, antar pulau, maupun untuk menjangkau antar daerah di luar Kabupaten Kepulauan Anambas maka transportasi laut merupakan salah satu moda pergerakan yang digunakan. Saat ini tersedia transportasi laut, berupa KM. Bukit Raya, Kapal Perintis, ferry dan Speed Boat, serta kapal pompong. Sementara alat transportasi yang menghubungkan antar kecamatan umumnya masyarakat menggunakan motor rakyat (perahu) yang terbuat dari kayu.

Untuk sarana pergerakan manusia dan barang yang melakukan pergerakan antar daerah dilayani oleh 1 buah KM. Bukit Raya (1 kali dalam 2 minggu), kapal perintis (1 kali dalam sebulan), ferry (2 – 3 kali dalam 1 minggu tergantung cuaca). Rute KM Bukit Raya dan Kapal Perintis adalah dari Anambas (Tarempa dan Jemaja) – Tanjung Pinang dan

Anambas – Natuna. Sedangkan rute ferry hanya Anambas – Tanjung Pinang. Intensitas penumpang turun sekitar 7 (tujuh) ribu orang dan penumpang yang naik sekitar 11 ribu orang.

Untuk angkutan penumpang dan barang antar kawasan atau antar kecamatan dengan jarak pendek maupun jarak jauh dilayani oleh kapal motor kecil dengan jenis speedboat dan pompong, serta perahu perahu rakyat. Transportasi laut ini umumnya beroperasi 2 (dua) kali dalam setiap harinya dikarenakan factor alam, seperti cuaca dan ombak. Namun demikian, perjalanan dengan transportasi laut ini dapat dilakukan setiap saat melalui sistem carter.

Transportasi udara merupakan sarana pergerakan dari Kabupaten Kepulauan Anambas ke Kabupaten lain maupun ke Provinsi lainnya. Bandara untuk melayani penerbangan dari dan ke Kabupaten ini berada di Matak - Kecamatan Palmatak dan merupakan bandara khusus milik BP Migas yang dioperasikan oleh Conoco Philips yang dapat juga digunakan sebagai bandara umum (domestic). Panjang Run Way 1.200 m dan Lebar Run Way 30 m. Rute penerbangan dapat melalui berbagai jalur seperti: jalur Bandara Matak ke Bandara Raja Haji Fisabilillah (Tanjungpinang), Bandara Hang Nadim (Batam), Bandara Sultan Syarif Qasim II (Pekanbaru) dan Bandara Halim Perdana Kusuma (Jakarta).

Pengoperasian bandar udara Matak dengan cakupan pelayanan penerbangan domestik. Maskapai penerbangan umum yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas awalnya adalah Riau Airline (RAL), tetapi saat ini dioperasikan oleh Sky Aviation sedangkan penerbangan yang digunakan oleh PT. ConocoPhillips, hanya untuk keperluan dan kepentingan perusahaan. Dalam operasionalnya, kegiatan penerbangan dari bandara Matak ke Tanjungpinang/Batam atau sebaliknya sudah bisa dilaksanakan 6kali dalam setiap minggunya.

Lingkungan Hidup

Peran kantor lingkungan hidup untuk menjaga pembangunan secara berkelanjutan dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan seperti memonitor pencemaran, membina dan menangani masalah persampahan dan sanitasi lingkungan (eksekusinya oleh Dinas PU) serta menjamin kelestarian lingkungan seperti tersedianya Ruang Terbuka Hijau dan kelestarian hutan dan satwa langka yang dilindungi.

Pertanahan

Pelayanan sertifikat pertanahan di Anambas sebelumnya masih ditangani oleh BPN Kabupaten Natuna. Secara bertahap, perannya akan dialihkan ke Kantor Pertanahan di kabupaten Anambas.

Kependudukan dan Catatan Sipil

Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Anambas baru terbentuk dan sudah mulai berperan dalam melayani masyarakat dalam hal kependudukan dan pencatatan sipil.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peran perempuan dalam mendukung perekonomian keluarga saat ini cukup besar. Di Kabupaten Anambas, peran perempuan dalam mendukung perekonomian keluarga sudah cukup besar. Demikian juga peranannya di pemerintahan. Walaupun demikian, kualitas peran perempuan dimasa yang akan datang perlu ditingkatkan melalui sejumlah program pemberdayaan perempuan.

Anak-anak di Kabupaten Anambas perlu didorong untuk terus bersekolah, walaupun banyak diantaranya harus membantu keluarganya dengan bekerja. Program wajib belajar perlu digalakkan, selain untuk meningkatkan kualitas SDM dimasa datang, juga dapat melindungi anak untuk dipekerjakan pada usia yang terlalu muda.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Sejak reformasi berjalan, program keluarga berencana dan keluarga sejahtera seakan ditinggalkan yang mengakibatkan penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pendekatan penanganan keluarga berencana dan keluarga sejahtera perlu digalakkan kembali untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Anambas.

Sosial

Adat Istiadat

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Anambas terletak di daerah kepulauan sehingga dalam hal adat istiadat masyarakat setempat juga memiliki ciri masing-masing sesuai

dengan kondisi daerahnya. Macam-macam corak adat yang ada meliputi corak Melayu, Jawa, Minang, Batak, dan Keturunan China.

Dengan perkembangan Kabupaten Kepulauan Anambas yang sangat pesat, tentunya akan membawa dampak yang komprehensif. Salah satu masalah yang timbul adalah meningkatnya arus urbanisasi penduduk dari wilayah sekitar. Hal tersebut bila tidak diimbangi dengan persiapan sumber daya manusia lokal maka dikhawatirkan akan menyebabkan konflik sosial akibat terjadinya kesenjangan atau disparitas sosial. Dengan banyaknya para pendatang mengakibatkan kebutuhan tempat tinggal semakin meningkat, sehingga menumbuhkan permukiman-permukiman liar yang merusak tata ruang kota. Penyebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan tidak seimbangny pemerataan hasil pembangunan, sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan terhadap gejolak sosial.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah, hal ini disebabkan konsep pembangunan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selama ini cenderung *top-down* dengan kekuatan, kemampuan dan kemauan masyarakat masih belum sepenuhnya diperhitungkan.

Perkembangan selanjutnya nampak pada usaha pemerintah, dengan segala daya upaya mengajak masyarakat untuk ikut andil secara langsung dalam rangka pemenuhan kebutuhannya, hal ini ditengarai dengan bergulirnya program-program pembangunan dengan konsep pembangunan dengan partisipasi masyarakat. Secara bertahap berbagai keputusan tingkat desa yang langsung berhubungan dengan masyarakat setempat dapat ditangani oleh desa yang bersangkutan. Hal tersebut mengindikasikan sudah adanya usaha untuk memberdayakan masyarakat hingga sampai ke tingkat desa.

Ketenagakerjaan

Penduduk Anambas sebagian besar memiliki matapecaharian sebagai nelayan dan bertani, kemudian sektor jasa dan penggalian

Kualitas tenaga kerja di Anambas saat ini masih belum memadai dengan rata-rata lama sekolah tahun 2010 adalah 5,98 tahun, dan pada tahun 2011 menjadi 6,38 tahun.

Penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja (data 2010) adalah 13.911 orang, terdiri dari 10.996 jiwa laki-laki, dan 2.915 jiwa perempuan.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan usaha kecil belum banyak berkembang di Anambas. Dari data statistik (2010) baru ada 3 unit KUD dan 24 non KUD. Untuk meningkatkan jumlah dan kualitas koperasi yang mampu mendorong tumbuhnya UKM-UKM baru perlu usaha cukup keras terutama dalam hal menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat Anambas.

Penanaman Modal

Penanaman modal di Anambas yang sangat dominan adalah disektor migas. Dengan adanya investasi migas berskala internasional, maka untuk menarik investasi internasional di sektor lain, khususnya pariwisata (bahari) sangat memungkinkan. Penanaman modal dari dalam negeri, atau dari masyarakat juga perlu mendapat perhatian dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian serta meningkatkan roda perekonomian berbasis sumberdaya lokal. Dalam rangka mengintensifkan penanaman modal daerah khususnya di luar sektor Migas, maka pada tahun 2011 berdasarkan Perdasarkan Perda No.6 Tahun 2011 telah dibentuk Kantor Penanaman Modal Daerah.

Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

Warisan budaya yang dimiliki masyarakat anambas sangat kaya akan ragam dan pesonanya. Namun demikian banyak peninggalan budaya yang hampir punah karena tidak dilestarikan. Usaha untuk melestarikan serta mengangkat potensi budaya lokal sangat penting terutama dalam rangka mendorong tumbuhnya sektor wisata di Anambas.

Aktivitas kepemudaan dan olah raga sudah cukup berkembang walaupun dengan sarana yang sangat minim. Usaha untuk mengembangkan aktivitas kepemudaan dan olah raga harus didukung oleh fasilitas, sarana dan anggaran yang memadai guna mendorong tumbuhnya calon-calon pemimpin masa depan yang berkarakter.

Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Sebagai wilayah yang terletak di perbatasan, rasa kebangsaan harus ditumbuhkan sejak awal. Rasa memiliki satu bangsa, bahasa dan satu tanah air akan meningkatkan rasa aman dan damai dalam keseharian masyarakat Anambas, karena didukung oleh rasa saling hormat-menghormati dalam perbedaan suku ras dan agama. Politik dalam negeri harus dibina dan dikembangkan untuk menumbuhkan jiwa demokrasi dan rasa memiliki serta fasilitas bagi masyarakat untuk ikut serta dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Otonomi daerah

Otonomi daerah dijalankan berdasarkan pada UU yang berlaku. Pada masa transisi, saat ini otonomi daerah Kabupaten Anambas masih terus dibenahi, khususnya dalam melengkapi peraturan dan kelembagaannya.

Pemerintahan umum

Fasilitas pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas yang ada saat ini terpusat di Kecamatan Siantan, bahkan antara kantor-kantor tersebut dapat dijangkau dengan mudah dan berjalan kaki. Lokasi kantor-kantor tersebut juga mengelompok pada kawasan-kawasan tertentu karena lahan dan bangunan kantor belum ada. Beberapa kantor sebagai fasilitas pemerintahan yang ada meliputi : Kantor Bupati, Kantor DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Kehutanan; Dinas Kesehatan, Dinas Sosial; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pendapatan Daerah; Badan Lingkungan Hidup; dan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Inspektorat. Sedangkan fasilitas pemerintahan untuk tingkat kecamatan (Kantor Kecamatan, Kantor Desa/Kelurahan) berada di masing-masing wilayahnya.

Fasilitas Pemerintahan lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah fasilitas pertahanan dan keamanan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan, baik di

wilayah daratan maupun wilayah kelautan. Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wilayah pesisir (sebut kelautan) yang terdiri dari beberapa gugusan pulau, baik pulau terluar maupun pulau terdepan, yang tersebar di beberapa wilayah sehingga perlu menjaga dan mengamankan wilayahnya dari gangguan dan ancaman maupun tindakan kejahatan lain untuk kelangsungan dan keamanan wilayah.

Masalah keamanan lain yang perlu mendapat perhatian adalah bahaya kebakaran yang diakibatkan oleh kelalaian manusia yang setiap saat dapat mengancam dan terjadi, baik di kawasan permukiman, perkantoran, pendidikan maupun kawasan perdagangan, serta fasilitas lainnya. Saat ini sarana keamanan untuk menjaga bahaya kebakaran baru tersedia di kawasan bandara Matak - Kecamatan Palmatak, dan fasilitas ini dimiliki oleh perusahaan Conoco Phillips, yang berjumlah 2 unit mobil pemadam kebakaran.

Administrasi Keuangan Daerah,

Administrasi keuangan daerah saat ini masih pada tahap pembenahan aturan dan kelembagaannya sesuai dengan perundangan yang berlaku

Perangkat Daerah

Perangkat daerah saat ini masih pada tahap pembenahan aturan dan kelembagaannya sesuai dengan perundangan yang berlaku

Kepegawaian dan Persandian

Kepegawaian dan persandian saat ini masih pada tahap pembenahan aturan dan kelembagaannya sesuai dengan perundangan yang berlaku

Ketahanan Pangan

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan daerah, maka sektor-sektor seperti pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan memegang peranan penting untuk dikembangkan. Selain itu, sistem transportasi dan logistik perlu ditata dengan baik. Saat ini rencana transportasi lokal (Tatralok) belum disusun, demikian pula masterplan agropolitan dan minapolitan.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa telah dilaksanakan diseluruh desa di Kabupaten Anambas. Usaha pemberdayaan masyarakat ini perlu didukung oleh semua pihak, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun swasta. Peran swasta dalam pemberdayaan masyarakat melalui CSR dirasakan sangat bermanfaat.

Statistik

Kantor Statistik saat ini masih pada tahap pembenahan aturan dan kelembagaannya sesuai dengan perundangan yang berlaku. Saat ini beberapa data dasar yang diperlukan seperti Kepulauan Anambas Dalam Angka sudah diterbitkan sejak tahun 2009.

Kearsipan

Kearsipan saat ini masih pada tahap pembenahan aturan dan kelembagaannya sesuai dengan perundangan yang berlaku

Komunikasi dan informatika

Jaringan telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Anambas telah menjangkau hampir di seluruh Kecamatan. Beberapa perusahaan telekomunikasi dan operator telepon seluler yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain : Telkom, Indosat, Telkomsel, dan Excelindo telepon seluler. Namun untuk Kecamatan Palmatak, Siantan Tengah dan Siantan Timur hanya memiliki jaringan Indosat yang mampu dijangkau. Kabupaten Kepulauan Anambas juga telah memiliki satelit internet tersendiri, namun masih dalam tahap pembenahan. Selain itu, di Kabupaten Kepulauan Anambas juga sudah memiliki jaringan internet melalui V-Satelit, serta kantor pos dan giro untuk melayani jasa pengiriman barang atau surat menyurat.

Selain itu, fasilitas komunikasi lainnya yang ada berupa Kantor Pos dan Giro, untuk melayani surat menyurat yang diperlukan oleh penduduk maupun untuk keperluan pemerintahan, dimana fasilitas ini tersebar di setiap Kecamatan.

Perpustakaan

Perpustakaan daerah saat ini masih pada tahap pembenahan aturan dan kelembagaannya sesuai dengan perundangan yang berlaku

2.2.2. Layanan Urusan Pilihan

Pertanian

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan peningkatan produksi dan produktifitas pertanian guna meningkatkan ketahanan pangan di masa yang akan datang. Upaya yang dilakukan adalah dengan cara intensifikasi pertanian, yaitu upaya meningkatkan produktifitas dan mutu hasil pertanian dengan melalui penerapan teknologi tepat guna, memberikan pelatihan bagi petani serta pelatihan bagi petugas penyuluh pertanian. Selain itu juga dilakukan ekstensifikasi pertanian yaitu dengan memperluas lahan/areal tanam.

Jenis lahan pertanian yang dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah jenis tanaman pangan yang dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok yaitu : tanaman bahan makanan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Tanaman bahan makanan meliputi jenis padi-padian, jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Jenis sayur-sayuran meliputi sawi, ketimun, terong, paria dan tomat. Sedangkan jenis buah-buahan meliputi nenas, durian, dan pisang. Selain tanaman padi, juga dikembangkan tanaman jenis palawija yaitu jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah.

- **Produksi Bahan Makanan (Padi dan Palawija)**

Produksi komoditas pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah umumnya dihasilkan di Kecamatan Jemaja, Jemaja Timur dan Pal matak. Luas tanaman padi di tahun 2010 adalah 45 ha dengan luas panen 41 ha dan produksi 246 ton per tahun. Disamping padi terdapat palawija seperti jagung (luas panen 37 ha, produksi 166,5 ton), ubi kayu (luas panen 153 ha, produksi 4.800 ton) dan ubi jalar (luas panen 21 ha, produksi 525 ton).

- **Sayuran**

Komoditas sayur-sayuran di Kabupaten Kepulauan Anambas (tahun 2010) mencakupi kacang panjang (61 ton), sawi (55 ton), bayam (69 ton), kangkung (550 ton), cabe besar 920 ton), mentimun (70 ton), dan terung (35 ton).

- **Buah-Buahan**

Pada tahun 2010 buah-buahan yang diproduksi : nanas (luas 10 ha, produksi 1.000 ton), durian (luas 165 ha, produksi 412,5 ton), pisang (luas 149 ha, produksi 4.670 ton), dan jeruk (luas 1 ha, produksi 3,5 ton).

Sektor Perkebunan

Hasil produksi perkebunan pada tahun 2010 meliputi : kelapa (luas panen 7.383 ha, produksi 2.041 ton), karet (luas panen 1.799 ha, produksi 1.151 ton), cengkeh (luas panen 1.989 ha, produksi 293 ton)

Sektor Peternakan

Kondisi peternakan belum memberikan kontribusi secara signifikan pada penambahannilai perekonomian di Kabupaten Kepulauan Anambas, salah satu penyebabnya adalah sistem pengelolaan peternakan masih bersifat tradisional. Berdasarkan data 2010, populasi sapi potong 2.295 ekor, kambing 248 ekor, ayam buras 9,398 ekor, itik 911 ekor, sedangkan produksi daging dari sapi potong 16.320 kg, kambing 703,2 kg. Produksi telur ayam buras 1.640,7 kg, itik 91 kg.

Kehutanan

Secara Umum, Tutupan lahan di Kabupaten Kepulauan Anambas di bedakan menjadi beberapa jenis penggunaan, diantaranya : Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Mangrove, Pemukiman, Kebun Campur, Sawah, Semak Belukar dan Lahan Terbuka. Sampai saat ini (2010) tercatat hutan produksi seluas 5.949,54 ha dan hutan yang dapat dikonversi seluas 54.438 ha.

Energi dan Sumberdaya Mineral

Kelistrikan

Sarana penerangan yang berupa jaringan listrik untuk menunjang dan mendukung aktivitas sehari-hari di Kepulauan Anambas ini dilayani oleh Unit Pelayanan Terpadu (UPT) PLN ke setiap rumah melalui gardu gardu induk maupun gardu pembagi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT PLN, Kecamatan dan hasil survei lapangan menunjukkan, bahwa seluruh rumah maupun kegiatan jasa dan perdagangan serta aktivitas lainnya telah menggunakan fasilitas listrik yang disalurkan oleh PLN maupun milik pribadi melalui jaringan kabel yang sejajar dengan jaringan jalan.

Pemenuhan kebutuhan penerangan listrik di Kabupaten Kepulauan Anambas dilayani oleh Unit Pelayanan Terpadu (UPT) PLN yang memiliki 1 pembangkit. Dari jumlah daya yang tersedia, sebagian besar pelanggan berasal dari rumah tangga serta perkantoran (bisnis). Sisanya diserap oleh lembaga sosial, industri, pemerintahan serta multiguna. Kondisi wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari pulau-pulau menyebabkan banyak desa yang belum terjangkau listrik oleh PLN. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan listrik di desa-desa tersebut menggunakan mesin (gengset/diesel) dan listrik tenaga surya. Bagi penduduk yang tidak memiliki diesel maka memanfaatkan tetangga disekitarnya melalui penyambungan kabel langsung ke rumah-rumah, itupun terbatas jam pemakaiannya hanya pada sore hingga malam hari. Selanjutnya dari malam hingga pagi masih ada yang menggunakan lampu tempel berbahan bakar minyak tanah. Jumlah pelanggan PLN saat ini adalah 2.783 dengan daya terpasang sekitar 2.406 kW (2,4 MW)

Pertambangan

Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil memiliki potensi sumber daya alam mineral dan energi yang relatif cukup besar dan bervariasi baik berupa galian A (strategis), bahan galian B (vital) maupun bahan galian golongan C.

Jenis-jenis bahan tambang yang bisa dijumpai di Kabupaten Kepulauan Anambas, antara lain Minyak Bumi dan Gas Alam, Granit, Pasir, yang dijadikan sebagai sumber ekonomi.

Cadangan Minyak Bumi dan Gas Alam yang besar di lepas pantai Kepulauan Anambas (Minyak Bumi sebesar 326,15 MMSTB dan Gas Alam 53,06 TSCF dan Cadangan Sumber Daya Mineral Batu Granit sebesar (19.991.561.061,23 m³) dengan luas 14.230 ha yang dimanfaatkan sebagai material bangunan.

Pariwisata



Salah satu misi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu menumbuh

kembangkan kegiatan Industri dan Pariwisata yang berbasis kelautan. Oleh karenanya bidang pariwisata menjadi salah satu fokus pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kabupaten Kepulauan Anambas kaya dengan keindahan pantai dan terumbu karang. Kawasan objek wisata tersebut dapat dijumpai di sejumlah Kawasan baik pulau-pulau kecil maupun besar. Objek wisata laut/pantai seperti Terumbu Karang di Kecamatan Jemaja. Objek wisata air terjun seperti Air Terjun Ulu Maras dan Air Terjun Temurun. Wisata Bahari seperti Pulau Langok di Palmatak, Pantai Padang Melang di Kecamatan Jemaja dan Pulau Bawah di Kecamatan Siantan Selatan.

Guna mendukung pengembangan pariwisata, sektor perhotelan dan rumah makan/restoran juga perlu dikembangkan. Berdasarkan data Tahun 2008 telah terdapat 15 hotel melati dan 33 rumah makan serta 4 restoran di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 2.23. Kawasan Objek Wisata Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Kepulauan Anambas

Kecamatan	Objek Wisata	Jenis Wisata
Siantan Selatan	Air Terjun Air Bunyi	Wisata Alam Wisata Bahari
Siantan Tengah	Pulau Temawan, Air Nangak Story (Keramat Siantan)	Wisata Alam, Wisata Bersejarah
Siantan Timur	Air Terjun Temburun, Pulau Temuruk	Wisata Alam Wisata Bahari
Palmatak	Pulau Kelong, Pulau Batu Alam, Pulau Durai, Pulau Pahat, Pulau Semut, Pulau Penjalin Pulau Langok, Pulau Renge, Phanoarama Pulau Putik	Wisata Bahari
Jemaja	Pulau Ayam, Pantai Padang Melang, Panorama Bawah Laut (Terumbu Karang), Pulau Bawah, Pulau Kuku, Pulau Keramut	Wisata Bahari Wisata Alam
Jemaja Timur	Air Terjun Ulu Maras, Pantai Kusik, Air Raya Story	Wisata Alam Wisata Bersejarah

Sumber : Profil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010

Kelautan dan Perikanan

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas 98,65 persen merupakan wilayah lautan sehingga kondisi ini sangat mendukung bagi pengembangan usaha perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya perikanan. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya lebih memilih pembesaran ikan sebagai sektor utama dalam melakukan aktivitas perekonomian, terutama yang tinggal di kawasan pedesaan pada umumnya memilih berdiam di kawasan pantai dan sebagian besar bekerja sebagai nelayan.

Pada tahun 2010, jumlah nelayan baik yang bekerja sebagai penangkap ikan berjumlah 2.255 orang. Produksi perikanan tangkap sebanyak 1080,40 ton. Hasil produksi perikanan tangkap selain perdagangan luar daerah, didistribusikan di pasar ikan/depo, jumlah pasar ikan/depo sebanyak 1 unit.

Luas lahan usaha budidaya tahun 2010 sebanyak 40.000 m² dengan jumlah pembudidaya sebanyak 232 rumah tangga dan produksi sebesar 67,46 ton.

Tabel 2.24 Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 (Ton)

No.	Kecamatan	Tangkap	Budidaya	Jumlah
1	Jemaja	77,80	55,20	93,00
2	Jemaja Timur			
3	Siantan Selatan			
4	Siantan	53,60	36,13	90,00
5	Siantan Timur	949,00		949,00
6	Siantan Tengah		31,33	31,33
7	Palatak			
Produksi		1.080,40	82,66	1.163,06

Sumber : Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2010

Ekosistem pesisir dan laut merupakan hubungan integral dari komponen hayati dan non hayati yang saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Ekosistem pesisir secara keseluruhan di lokasi pengamatan cukup bervariasi.

Ekosistem mangrove termasuk ekosistem yang paling produktif, hal ini dipengaruhi oleh dua faktor utama seperti fluktuasi pasang surut dan kimia air laut. Tingginya kandungan organik di perairan hutan mangrove, memungkinkannya sebagai tempat pemijahan (*Spawning ground*), pengasuhan (*nursery ground*), dan pembesaran atau mencari makan (*feeding ground*).

Padang lamun dapat ditemukan pada daerah perairan dangkal yang masih tembus cahaya matahari, substrat lunak, kondisi perairan yang jernih, sirkulasi oksigen dan pembawa nutrisi dari substrat yang cukup. Padang lamun hanya ditemukan di beberapa pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Siantan dan Jemaja.

Sumber Daya Perikanan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, potensi sumberdaya ikan di Perairan Kepulauan Anambas dan sekitarnya diestimasi berjumlah 62.853,4 ton/tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 50.282,7 ton/tahun. Potensi tersebut diasumsikan berada pada perairan 0-12 mil. Dari seluruh potensi sumberdaya ikan yang ada, potensi terbesar adalah potensi cumi-cumi yaitu 20.848,2 ton/tahun, berikutnya jenis ikan pelagis kecil dengan potensi sebesar 17.450,7 ton/tahun dan lobster sebesar 10.346,9 ton/tahun.

Perairan lokasi kegiatan yang termasuk bagian dari wilayah perairan Laut Cina Selatan, merupakan daerah penyebaran salah satu jenis mamalia laut, yaitu berasal dari kelompok lumba-lumba hidung botol (*Tursiops sp*).

Perdagangan Jasa

Kegiatan perdagangan dan jasa di Kabupaten Kepulauan Anambas yang ada terdiri dari perdagangan skala kecil dan menengah, serta skala besar. Perdagangan skala kecil seperti: warung/kios; sedangkan perdagangan skala menengah meliputi: pasar, pertokoan, jenis ritel/swalayan, dan perdagangan skala besar seperti penjualan hasil tangkapan ikan ke berbagai wilayah hingga mancanegara.

Untuk kegiatan perdagangan dengan jenis pasar terdapat pasar tradisional yang ada, yaitu Pasar Baru di Siantan dan Pasar ikan. Pasar tradisional ini menjual kebutuhan sehari-hari penduduk dengan jenis sembako juga sayur-sayuran, dimana pemenuhan kebutuhan pasar ini merupakan hasil kegiatan petani di kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas seperti dari Kecamatan Jemaja dan Siantan. Sedangkan

pasar ikan seperti pada umumnya kegiatan perdagangan yang dilakukan adalah menjual ikan hasil tangkapan para nelayan untuk dikonsumsi oleh masyarakat juga untuk kegiatan ekspor ke berbagai Negara tetangga.

Masyarakat yang bergerak atau memiliki mata pencaharian utama sebagai pedagang pada tahun 2010 berjumlah 1.546 orang



Beberapa fasilitas perdagangan yang ada menempati areal tertentu sehingga mudah dijangkau

Gambar 2.7. Kondisi Fasilitas Perdagangan di Kabupaten Kepulauan Anambas

Industri

Untuk sektor perindustrian di Kabupaten Kepulauan Anambas pada Industri Kecil dan Menengah meliputi industri kerajinan, industri bahan bangunan, industri pengolahan makanan, industri pengolahan perikanan & pertanian. Sektor tersebut telah dikembangkan seperti usaha Kerupuk Ikan Tradisional, VCO, Pengrajin Busana dan Pengrajin Pompong Kayu, Perbengkelan, Pengrajin Souvenir. Saat ini sektor industri baru menyumbang 0,59 persen dari PDRB. Jumlah industri kecil yang tercatat sebesar 114 buah industri yang mampu menyerap 479 tenaga kerja. Industri sedang berjumlah 3 buah dengan tenaga kerja 16 orang.

Transmigrasi

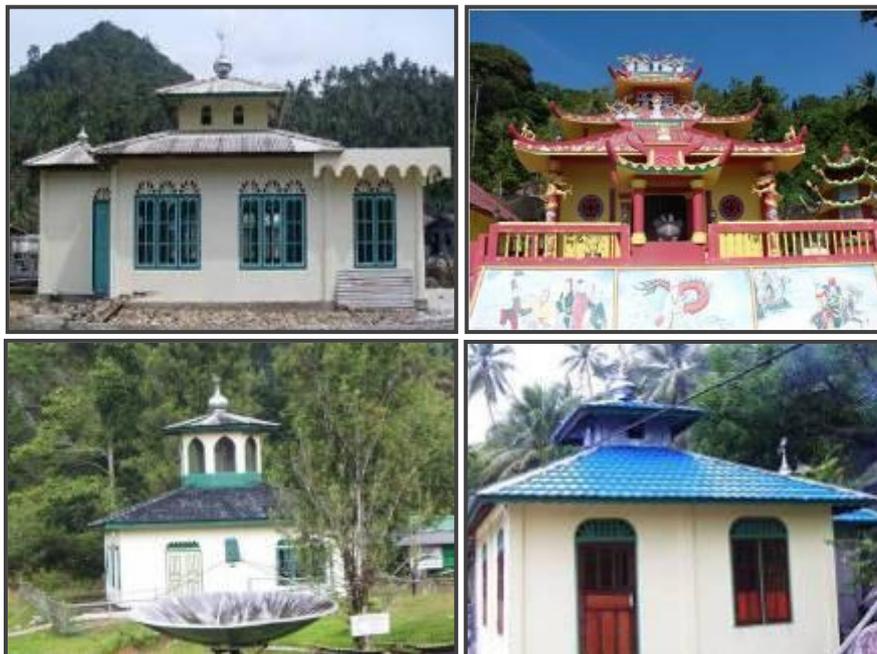
Pemukiman transmigrasi sudah ada di Kabupaten Anambas sejak masih bergabung dengan Natuna. Lokasi pemukiman transmigrasi adalah di Jemaja, dimana produk

beras dari Jemaja ini sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan beras di Kabupaten Anambas. Selain transmigrasi yang diinisiasi oleh pemerintah, juga terdapat transmigrasi swakarsa. Pemukiman para bendatang ini umumnya menempati lahan di perbukitan yang jauh dari laut, karena lahan yang dekat laut umumnya sudah ditempati oleh penduduk asli.

Jumlah penduduk saat ini yang masih dibawah 50.000 jiwa serta potensi ekonomi yang cukup besar akan mengundang transmigrasi swakarsa yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, jika pengembangan potensi unggulan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini menuntut pengelolaan dan penataan kawasan pemukiman bagi pendatang yang lebih baik sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan yang negatif.

Peribadatan

Fasilitas peribadatan sebagai wahana penggemblengan dan peningkatan mental dan keimanan masyarakat telah tersedia dan mampu melayani kebutuhannya. Jenis sarana yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas berupa 78 unit Masjid dan 30 unit Mushola/Surau dengan kondisi baik yang lokasinya menyebar di seluruh kecamatan. Disamping itu, tersedia pula 7 unit Gereja dan 2 unit Wihara yang berada di Siantan dan Siantan Tengah, dimana semua fasilitas peribadatan yang ada tersebut kondisinya baik.



jenis fasilitas peribadatan yang ada menyebar ke berbagai desa secara merata namun untuk Wihara hanya ada di kecamatan Siantan dan Palmatak

Gambar 2.8 Kondisi Fasilitas Peribadatan di Kabupaten Kepulauan Anambas

Dari banyaknya fasilitas peribadatan untuk pemeluk agama Islam ini tidak menimbulkan tingkat kecemburuan bagi pemeluk agama lain, sehingga konflik antar pemeluk agama juga tidak terjadi di wilayah ini.

Pemakaman

Berdasarkan fungsinya, taman pemakaman ini sudah tersedia di beberapa tempat walaupun tidak menyebar ke setiap Kelurahan/desa yang ada, dimana lokasinya berada di pinggiran jalan dan pada kawasan permukiman penduduk. Dilihat dari kondisinya, taman pemakaman ada yang dikelola dengan baik dan tertata dengan rapih sehingga tidak menimbulkan kesan kesemrawutan dan/atau “angker” bagi penduduk yang akan melakukan ziarah kubur atau bagi penduduk di sekitarnya. Namun masih ada keberadaannya tidak ditata dan dikelola dengan baik dan rapih, bahkan dalam perawatannya kurang diperhatikan. Lokasi taman pemakaman yang kurang perawatan dan pemeliharaan berada di pinggiran jalan dan beberapa tempat di kawasan permukiman penduduk yang dimiliki oleh keluarganya.



lokasi tempat pemakaman umum yang ada di beberapa tempat dengan kondisi kurang perawatan dan kurang tertata dengan baik

Gambar 2.9 Pemakaman di Kabupaten Kepulauan Anambas

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya, domestik, atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.3.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut:

A.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

(Angka konsumsi RT per kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Tabel 2.25 Pengeluaran Rata - rata (Rp) Nominal dan Persentase Pengeluaran Makanan Per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2009

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata - rata	
	Nominal	Persen
Makanan	337.974	63,75
JUMLAH	530.192	100

Rasio Konsumsi RT per kapita	64 persen	
------------------------------	-----------	--

Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Kepulauan Riau, diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2009

Untuk Provinsi, proyeksi angka konsumsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.26 Proyeksi Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2008 s.d 2021 – 2025
Provinsi Kepulauan Riau

NO	Uraian	2008 - 2010	2011 – 2015	2016 – 2020	2021 - 2025
1.	Total Pengeluaran Konsumsi Makanan RT	366.074			
2.	Jumlah Pengeluaran RT	681.998			
3.	Rasio (1./2.)	54 persen			

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2009

A.2. Nilai tukar petani

NTP merupakan nilai tukar (*term of trade*) antara barang/produk pertanian dengan barang-barang konsumsi dan faktor produksi yang dibutuhkan petani yang dinyatakan dalam persen. NTP berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani (It) dan barang dan jasa yang dikonsumsi petani (Ib). Apabila harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik dengan persentase lebih besar dari persentase kenaikan barang dan jasa yang dibayar petani, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka NTP naik dan dengan sendirinya pendapatan petani naik relatif lebih besar dari kenaikan pengeluaran atau terjadi surplus.

Secara umum ada tiga macam pengertian NTP yaitu:

- a. $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya; dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.
- b. $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas/break even. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.

c. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya.

Tabel 2.27 Nilai Tukar Petani di Sektor, Subsektor, Kelompok, dan Sub Kelompok

No.	Sektor, Sub Sektor, Kelompok, Sub kelompok	Bobot
A	Indeks Harga Yang Diterima Petani (It)	10.000
I.	Indeks Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan (TBM)	3.013
1	Indeks kelompok padi	1.423
2	Indeks kelompok palawija	1.244
3	Indeks kelompok sayuran	159
4	Indeks kelompok buah-buahan	186
II.	II. Indeks Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR)	6.987
1	Indeks kelompok TPR	6.987
B	Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib)	10.000
I.	Indeks Kelompok Konsumsi Rumah Tangga (KRT)	6.299
1	Indeks sub kelompok makanan	3.440
2	Indeks kelompok perumahan	1.349
3	Indeks kelompok pakaian	514
4	Indeks kelompok aneka barang dan jasa	996
II.	Indeks Kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	3.702
1	Indeks sub kelompok non faktor produksi	964
2	Indeks sub kelompok upah	2.355
3	Indeks sub kelompok lainnya	189
4	Indeks sub kelompok barang modal	194
C	Nilai Tukar Petani	0,999999

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2009

A.3. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

(Persentase Konsumsi RT untuk non pangan)

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.

Tabel 2.28. Pengeluaran Rata - rata (Rp) Nominal dan Persentase Pengeluaran Makanan Per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata - rata	
	Nominal	Persen
Bukan Makanan	192.218	36,25
Perumahan	71.431	13,47
Barang & Jasa	81.689	15,41
Pakaian	15.363	2,9
Barang Tahan Lama	13.108	2,47
Lainnya	10.626	2
JUMLAH	530.192	100
Rasio non Konsumsi RT per kapita	36 persen	36 persen

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Kepulauan Riau, diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2009

A.4. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 9 (sembilan) sektor.

Tabel 2.29. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku Menurut Sektor Tahun 2010 (dalam juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan 2000	
		Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
1	Pertanian	405.776,24	405.776,24	179.533,66	179.533,66
2	Pertambangan dan Pengolahan	2.046.467,49	2.604,38	691.522,04	1.112,61

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan 2000	
		Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
3	Industri Pengolahan	8.665,73	8.665,73	5.664,14	5.664,14
4	Listrik, Gas & Air Bersih	435,93	435,93	185,41	185,41
5	Bangunan dan Konstruksi	23.981,26	23.981,26	8.409,20	8.409,20
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	135.673,08	135.673,08	44.691,46	44.691,46
7	Pengangkutan & Komunikasi	30.158,77	30.158,77	11.107,35	11.107,35
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	17.258,45	17.258,45	6.567,48	6.567,48
9	Jasa-jasa	36.245,01	36.245,01	13.749,69	13.749,69
	Jumlah Total	2.704.661,96	660.798,85	961.460,43	271.021,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010

A.5. PDRB Perkapita

PDRB perkapita diperoleh dengan cara penghitungan pendapatan regional netto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun pertengahan. Dari jumlah PDRB perkapita atas harga berlaku, dapat diketahui mengenai nilai PDRB per satu orang penduduk, sedangkan PDRB perkapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian perkapita penduduk.

PDRB perkapita Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2010 menurut harga berlaku dengan migas adalah Rp. 72,30 juta, sedangkan tanpa migas adalah Rp. 17,66 juta. Jika dihitung atas dasar harga konstan tahun 2000 maka PDRB perkapita dengan migas adalah sebesar Rp. 25,7 juta sedangkan tanpa migas sebesar Rp. 7,24 juta.

2.3.2. Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Anambas memerlukan prasarana transportasi, komunikasi yang cukup bervariasi., dibandingkan wilayah daratan. Hal ini disebabkan karena untuk pergerakan orang saja dari satu desa ke ibukota kabupaten harus menggunakan lebih dari 1 moda transportasi, demikian pula untuk mengangkut hasil produksi pertanian ke pusat pemasaran perlu dilakukan menggunakan lebih dari 1 moda transportasi.

Selain sarana dan prasarana transportasi, banyaknya pulau kecil yang tersebar hingga perbatasan wilayah NKRI membutuhkan sistem komunikasi dan informasi yang baik untuk mengimbangi kesulitan transportasi yang ada. Fasilitas komunikasi berbasis web (internet) sangat menunjang untuk pengembangan ekonomi (bisnis) di kawasan kepulauan seperti Anambas.

Salah satu permasalahan pembangunan di daerah yang terdiri dari pulau-pulau kecil adalah ketersediaan listrik dan air bersih. Beruntung sekali di Kepulauan Anambas terdapat pulau-pulau dengan ketersediaan air yang berlimpah. Namun demikian, jika tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kelangkaan dimasa-masa yang akan datang. Ketersediaan listrik di kawasan kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk pulau-pulau yang hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga saja, maka pilihan untuk mengembangkan listrik tenaga surya adalah sangat tepat. Untuk wilayah yang cukup padat, pengembangan pembangkit listrik yang dikelola secara komersial dapat dilakukan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan listriknya.

B.1. Transportasi

B.1.1. Transportasi Darat

Kepulauan Anambas yang terdiri dari pulau-pulau kecil baru melakukan pemekaran dari Kabupaten Natuna sejak tahun 2008. Dengan tipologi pulau-pulau berbukit dan lahan datar hanya terbatas disepanjang pantai, maka pemukiman yang terbentuk terdapat di pesisir dan masyarakatnya mengandalkan transportasi laut untuk mobilitasnya. Kelompok pemukiman dipesisir yang cukup besar untuk menjadi pusat perdagangan jasa masih sangat terbatas, dimana yang terbesar adalah di Tarempa. Kota Tarempa yang pada awalnya hanya mengandalkan transportasi air kian berkembang dan meluas sehingga sudah saatnya dilakukan penataan sistem transportasi daratnya. Selain di Tarempa, di Pulau Jemaja dan PalMatak juga memungkinkan dikembangkan sistem transportasi daratnya.

1. Panjang Jalan

Kondisi jalan darat saat ini di Kepulauan Anambas sangatlah terbatas baik dari panjang jalannya maupun kualitas perkerasannya. Di Tarempa, jalan-jalan yang ada belum layak untuk dilalui oleh kendaraan roda empat, dan hanya dilalui oleh kendaraan roda dua saja. Sebagian besar jalan yang ada menggunakan perkerasan tanah dan semen.

Jalan dengan status sebagai jalan negara hanya ada di Siantan dan PalMatak saja dengan panjang total 45 km dan terdiri dari jalan tanah.

Jalan provinsi terdapat hampir disemua kecamatan, kecuali di Siantan Timur, Siantan Tengan dan Pal matak. Dari 130 km jalan provinsi 105 km diantaranya adalah jalan tanah dan 25 km adalah jalan semen.

Total panjang jalan kabupaten di Kepulauan Anambas adalah 161.015 km yang terdiri dari 56,709 km jalan tanah dan 104,306 km jalan semen. Jalan yang ada saat ini hanyalah jalan dengan perkerasan seadanya, sedangkan pola jaringan jalannya masih terbatas linier sepanjang garis pantai, kecuali di Jemaja.

Tabel.2.30. Panjang Jalan

No.	Kecamatan	Panjang Jalan Total (km)		
		Tanah	Semen	Jumlah
1	Jemaja	2,000	13,530	15,530
2	Jemaja Timur	3,500	18,900	22,400
3	Siantan Selatan	2,752	5,648	8,400
4	Siantan	18,717	33,611	52,328
5	Siantan Timur	4,120	4,332	8,452
6	Siantan Tengah	1,865	2,350	4,215
7	Palமாக	23,755	25,935	49,690
Total	2010	56,709	104,306	161,015

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010

Untuk pengembangan kedepan, perlu ditata sistem jaringan jalannya yang mampu menghubungkan tempat-tempat penting ke pelabuhan sebagai simpul yang menghubungkan pergerakan antar pulau.

2. Jumlah Kendaraan

Jalan-jalan di Kepulauan Anambas sebagian besar hanya mampu dilalui oleh kendaraan roda 2 (sepeda motor). Dari data statistik, kendaraan hanya ada di Jemaja, Siantan, Siantan Timur dan Palmatak sebanyak 631 unit yang terdiri dari 28 kendaraan roda 4 dan 603 kendaraan roda 2.

Tabel.2.31. Jumlah Kendaraan

No.	Kecamatan	Mobil	Sepeda Motor	Total Darat
1	Jemaja		110	110
2	Jemaja Timur			-
3	Siantan Selatan			-
4	Siantan	15	462	477
5	Siantan Timur		14	14
6	Siantan Tengah			-
7	Palmatak	13	17	30
Total	2010	28	603	631

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010



Gambar.2.10. Kondisi Jalan dan Kendaraan Angkutan Darat di Anambas (Tarempa)

3. Ratio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan

Jika dibandingkan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan, maka terlihat penambahan kendaraan dari tahun 2009 – 2010 cukup tinggi sedangkan panjang

jalannya tidak berubah sehingga perubahan rasionya dari 0,56 (2009) menjadi 0,53 (2010)

Tabel.2.32. Ratio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan

No.	Kecamatan	Panjang (Km)	Kend (Unit)	Ratio
1	Jemaja	39	110	0,35
2	Jemaja Timur	65		
3	Siantan Selatan	35		
4	Siantan	103	477	0,22
5	Siantan Timur	13	14	0,93
6	Siantan Tengah	2		-
7	Palatak	80	30	2,67
Total	2010	337	631	0,53
	2009	337	600	0,56

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010

B.1.2. Transportasi Laut

Sebagai wilayah kepulauan, peran transportasi laut di Kabupaten Anambas cukup penting, bahkan mobilitas penduduk lebih didominasi oleh pergerakan di air dibandingkan di darat. Sejumlah dermaga baik yang besar, sedang maupun kecil tersebar diseluruh kecamatan di Anambas melayani arus penumpang dan bongkar muat barang. Armada kapal yang melayani masyarakat juga bervariasi, mulai dari angkutan antar pulau di dalam kabupaten hingga angkutan skala nasional yang melayani antar provinsi.

1. Prasarana Transportasi Laut



Dermaga yang cukup besar di Kepulauan Anambas terdapat di Kecamatan Siantan 3 unit, Kecamatan Jemaja 1 unit dan kecamatan Palatak 1 unit. Dermaga dengan ukuran sedang tersebar di hampir semua kecamatan kecuali di Siantan Tengah. Sedangkan dermaga kecil

terdapat di beberapa kecamatan yang memiliki pemukiman/permukiman. Dari 107 unit dermaga, 15 diantaranya cukup besar, 52 ukuran sedang dan 40 ukuran kecil. Jika dilihat dari fasilitas pelabuhannya, maka fasilitas yang ada saat ini sangat minim sehingga sulit untuk dapat melayani bongkar muat barang secara baik. Hampir disemua dermaga pelabuhan tidak memiliki fasilitas lapangan penumpukan dan peralatan bongkar muat barang. Demikian juga terminal penumpang belum tersedia dengan baik, sehingga calon penumpang tidak memiliki ruang tunggu pada saat menunggu kapal bersandar.

Pelabuhan sebagai simpul internal meliputi pelabuhan penyeberangan yang melayani kebutuhan pelayanan jasa penyeberangan antar pulau dalam satu Kabupaten yang terdapat di beberapa wilayah, seperti: Pelabuhan Tarempa; Dermaga Nyamuk dan Dermaga Batu Belah di Kecamatan Siantan Timur; Dermaga Air Asuk di Kecamatan Siantan Tengah; Dermaga Payalaman di Palmatak; dan Dermaga Jemaja; dan dermaga kecil lainnya yang ada dan melakukan operasi kegiatan penyeberangan. Dari beberapa pelabuhan dan dermaga tersebut sehingga dapat dibuat simpul-simpul penyeberangan, yaitu: Pelabuhan Tarempa di Siantan sebagai simpul bagian Tengah, Pelabuhan Payalaman di Palmatak pada bagian Utara, dan Dermaga Letung di Jemaja pada bagian Barat.

Untuk pengembangan simpul transportasi secara eksternal akan dibedakan berdasarkan jenis pelabuhannya, yaitu:

- 1) Pelabuhan Tarempa di bagian Tengah, pelabuhan ini merupakan pintu masuknya penumpang dan barang dari luar wilayah melalui laut, terutama dari Kalimantan dan wilayah lainnya.
- 2) Pelabuhan Payalaman (Palmatak) di bagian Utara, pelabuhan ini merupakan pintu masuk penumpang dan barang dari luar melalui udara sehingga akan mendorong percepatan pergerakan barang dan penumpang di Kabupaten Anambas.
- 3) Pelabuhan Antang di Siantan di bagian Tengah, pelabuhan ini merupakan pelabuhan bongkar muat barang, khususnya hasil penangkapan ikan dan pengolahan ikan (*cold storage*) yang didukung dengan sarana prasarana pengolahan perikanan.
- 4) Pelabuhan Letung di bagian Barat, pelabuhan ini merupakan pintu masuknya barang, terutama hasil tangkapan ikan, yang berbatasan dengan wilayah lain dan dapat melakukan pengiriman keluar negeri.

- 5) Pelabuhan Khusus Pertambangan, pelabuhan ini merupakan yang pelabuhan khusus yang dikelola oleh Perusahaan ConocoPhillips, Namun demikian perlu ada pengawasan dari Pemda Anambas tentang keluar masuknya barang.

2. Kunjungan Kapal

Kebutuhan sarana angkutan laut dilayani baik untuk pelayaran dalam negeri maupun luar negeri. Kunjungan kapal yang rutin dan cukup banyak hanya melalui Pelabuhan Tarempa, sedangkan melalui dermaga-dermaga lainnya, hanya merupakan kapal-kapal kecil (kapal kayu) dan speed boat. Dari data 2010 kunjungan kapal selama setahun sebesar 765 unit dimana 105 unit adalah dari luar negeri. Distribusi kedatangan kapal dalam negeri relatif seragam sedangkan kedatangan kapal luar negeri berfluktuasi. Jika dihitung rata-rata GT kapalnya maka GT kapal dalam negerinya adalah sekitar 766 GT dan kapal luar negeri sebesar 1.427 GT.

3. Bongkar Muat Barang



Bongkar muat barang yang cukup besar dan tercatat adalah melalui Pelabuhan Tarempa. Dari data terlihat bahwa barang yang dibongkar jauh lebih banyak dibandingkan barang yang dimuat. Untuk pelayaran dalam negeri, barang yang dibongkar adalah sebesar 11.748 ton sedangkan yang dimuat hanya 2.229 ton (data 2010). Sedangkan untuk pelayaran luar negeri hanya ada bongkar sebesar 209 ton sedangkan muatnya tidak ada.

Pelabuhan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki pelabuhan untuk bongkar barang hasil dari sentra-sentra produksi di beberapa Kecamatan yang ada, seperti dari Kecamatan Jemaja, Palmatak. Hasil produksi tersebut umumnya dikumpulkan di pelabuhan Tarempa untuk kemudian dipasarkan ke Tanjung Pinang. Selain itu, di wilayah ini terdapat pelabuhan khusus untuk bongkar muat hasil tambang yang berada di Kecamatan Palmatak, Pelabuhan ini memang dikhususkan untuk mengangkut dan



menurunkan hasil pengolahan tambang yang dikelola oleh Perusahaan ConocoPhillips, untuk selanjutnya dipasarkan ke berbagai wilayah. Selain itu terdapat pelabuhan Antang untuk bongkar muat hasil tangkapan ikan.

4. Naik Turun Penumpang



Naik turun penumpang dari data yang tercatat di Pelabuhan Tarempa sangat berfluktuasi. Arus naik turun penumpang cukup besar antara Bulan Mei hingga September, sedangkan bulan-bulan lainnya relatif lebih rendah. Arus naik turun penumpang hanya melayani pelayaran dalam negeri, sedangkan luar negeri belum

tersedia fasilitasnya. Total penumpang naik dalam 1 tahun adalah 13.195 orang dan penumpang turun adalah 12.757 orang (data 2010).

Kabupaten Kepulauan Anambas dengan kondisi wilayah berbentuk kepulauan sangat dipengaruhi oleh keberadaan sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan laut. Pada saat ini memiliki prasarana pelabuhan utama sebanyak 5 buah yang terletak di Kecamatan Siantan (3 buah), yaitu 2 buah di Tarempa dan 1 buah di Antang, 1 buah di Payalaman (Palmatak), serta di Kecamatan Jemaja (1 buah). Untuk pelabuhan Antang didukung dengan sarana dan prasarana, seperti dermaga, gudang, pabrik es dan lapangan penumpukan untuk bongkar muat barang. Untuk 1 buah pelabuhan yang di Tarempa merupakan pelabuhan yang melayani angkutan penyeberangan jarak dekat antar pulau, dan 1 buah pelabuhan lagi merupakan pelabuhan yang melayani angkutan penyeberangan jarak jauh, yaitu ke Kalimantan.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pelabuhan Tarempa merupakan pelabuhan penyeberangan antar pulau maupun penyeberangan antar Provinsi, namun belum ditunjang dan didukung dengan fasilitas yang memadai, seperti tempat naik turunnya penumpang, ruang tunggu, toilet, pusat informasi, gudang dan sebagainya. Saat ini kondisi pelabuhan penyeberangan belum memberikan keselamatan dan keamanan secara optimal, karena kondisi sarana prasarana pelabuhan yang relative rendah pelayanannya. Hal ini terlihat dari tempat untuk naik turunnya penumpang maupun tempat bongkar muat barang yang relative sempit ruangnya, sehingga mengganggu dan membahayakan keselamatan dan keamanan kepada penumpang dan barang.

Transportasi penyeberangan pelayanan umum khusus untuk antar jemput siswa berjumlah 2 buah yang dilakukan dengan kerjasama antara pihak sekolah dengan pemilik perahu rakyat, dimana dalam operasional akan ditanggung oleh pihak sekolah. Perahu ini dikhususkan untuk antar jemput para siswa yang rumahnya tidak dapat dijangkau dengan kendaraan darat (motor), dan waktu antar jemput dilakukan pada pagi dan siang hari.

5. Jumlah Perahu

Jumlah perahu (untuk transportasi, diluar perahu nelayan) yang tercatat adalah sebesar 1.250 unit, dimana sebagian besar berada di Palmatak.



Pelabuhan Tarempa



Perahu Rakyat



Pelabuhan Payalaman



Speed boat Matak – Tarempa

Gambar 2.11. Dermaga di Anambas

B.1.3. Transportasi Udara

1. Fasilitas Bandara

Bandara yang melayani penerbangan di Anambas adalah bandara milik Swasta (Conoco Philip) yang terletak di Pulau Matak, sehingga sulit untuk melakukan pengembangannya. Fasilitas bandara cukup memadai dengan panjang 1.200 meter dan lebar 30 meter, namun demikian fasilitas ruang tunggu penumpang sangat terbatas, walaupun baru selesai dilakukan renovasi pengembangannya.

- Panjang Runway : 1.200 m
- Lebar Runway : 30 meter
- Status : khusus (swasta)

2. Maskapai Penerbangan

Maskapai penerbangan yang melayani jalur penerbangan ke Anambas adalah :

- a. Nama : Sky Airline
- b. Status : Umum (Swasta)
- c. Pesawat : F-50

3. Frekwensi Penerbangan

Transportasi udara di Kabupaten Anambas telah dilayani secara komersial 6 (enam) kali seminggu oleh penerbangan komersial yang sebagian disubsidi oleh Pemda kabupaten Kepulauan Anambas. Jalur yang dilayani baru melalui Batam dan Tanjung Pinang.

Tabel 2.33. Jadwal Penerbangan

Hari	Frekwensi		Penumpang	Rute
Senin	1	Kali	50	Tanjung Pinang - Matak – Tanjung Pinang
Selasa	1	Kali	50	Tanjung Pinang - Matak – Tanjung Pinang
Rabu	1	Kali	50	Batam - Matak – Batam
Kamis	1	Kali	50	Tanjung Pinang - Matak – Tanjung Pinang
Jumat	1	Kali	50	Tanjung Pinang - Matak – Tanjung Pinang
Sabtu	1	Kali	50	Batam - Matak – Batam
1 minggu	6	Kali	300	
1 tahun	312	Kali	15.600	



Gambar.2.12. Bandara Matak dan Pesawat F-50

B.2. Hotel dan Restaurant

1. Penginapan

Sebagai wilayah yang baru berkembang, maka akomodasi penginapan masih sangat minim. Hotel bintang belum tersedia, dan sebagian besar penginapan merupakan hotel kelas melati (11 buah)

2. Rumah Makan

Saat ini rumah makan cukup banyak tersedia khususnya di Siantan. Berbagai tipe rumah makan sudah berdiri di Siantan, dimana perkembangan rumah makan ini umumnya dimulai dari kedai-kedai kopi yang banyak bertebaran disekitar pasar Tarempa. Selain di Siantan, di Jemaja dan Palmatak juga sudah ada rumah makan walaupun sangat terbatas jumlah dan jenisnya. Terdapat 22 rumah makan yang cukup baik di Anambas.

B.3. Informasi Komunikasi, Listrik dan Air Bersih

B.3.1. Komunikasi dan Informasi

Sebagai wilayah kepulauan sarana komunikasi sangatlah penting untuk menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang mudah untuk mengakses informasi, sekaligus mudah untuk diakses informasinya. Untuk menghadirkan informasi global di Anambas, berbagai perangkat komunikasi perlu dikembangkan, dimana akses informasi yang sangat penting

saat ini seperti internet harus mudah untuk diakses dari pulau manapun di Kepulauan Anambas. Beberapa perangkat komunikasi dan informasi yang tersedia di Anambas adalah sebagai berikut :

a. TV dan Radio

TV dan radio merupakan perangkat informasi satu arah yang banyak tersedia di setiap RT, kedai kopi, rumah makan, bahkan di kendaraan baik darat maupun laut. Namun demikian dari data kepemilikan Radio TV oleh sejumlah RT, maka terlihat jumlahnya masih sangat minim. Banyaknya rumah tangga yang memiliki pesawat TV berjumlah 2.742 sedangkan yang memiliki pesawat radio 132.

b. Surat dan Pos

Surat dan pos sudah terlayani di semua kecamatan di Anambas. Tingkat pengiriman dan penerimaan surat tertinggi ada di Siantan. Pada tahun 2010 pengiriman surat biasa mencapai 562 pucuk, kilat 798, tercatat 1.262 dan paket 787.

c. Telepon

Telepon di Anambas, baik telepon rumah maupun telepon seluler sudah tersedia di Anambas, walaupun belum seluruhnya terjangkau. Di Jemaja, Jemaja Timur dan Siantan, operator telepon yang ada di Anambas sudah masuk semua. Untuk kecamatan lainnya sudah ada layanan teleponnya, walaupun operatornya berbeda-beda. Hanya di Kecamatan Siantan Selatan belum ada jasa layanan telepon.

d. Internet

Jasa layanan internet saat ini baru tersedia di Tarempa. Namun demikian ada rencana pengembangan layanan internet menggunakan fiber optik, karena wilayah Anambas dilalui oleh fiber optik yang menghubungkan jaringan informasi global melalui kabel bawah laut.

B.3.2. Air Bersih

Sebagai wilayah kepulauan, air bersih merupakan faktor yang sangat penting. Di beberapa pulau, sumber air bersih cukup tersedia walaupun belum dikelola secara baik. Sumberdaya air bersih (dari mata air) yang telah dikelola secara baik adalah di Tarempa oleh PDAM Tirta Merta.

Kapasitas produksi PDAM Tirta Merta adalah sekitar 20 liter/detik atau 1.728.000 liter/hari. Jika kebutuhan penduduk perhari sekitar 120 liter, maka kapasitas tersebut

cukup untuk digunakan oleh sekitar 14.400 orang. Karena sumber air baku ini berasal dari mata air, maka untuk keberlanjutannya perlu diperhatikan konservasi disekitar mata air.

Selain di Siantan, kecamatan lain yang sudah memiliki jasa PDAM adalah di Jemaja dan Siantan Tengah sedangkan di kecamatan lain masih menggunakan Non PDAM. Jumlah pelanggan PDAM adalah sekitar 1.129 rumah tangga dan Non PDAM adalah sekitar 1.135 rumah tangga, sehingga total yang telah mendapatkan layanan air bersih adalah 2.264 rumah tangga. Jika jumlah rumah tangga total di Anambas sekitar 10.000, maka RT yang telah mendapatkan akses layanan air bersih lebih kurang sekitar 20 persen-nya.

B.3.3. Listrik

Terdapat 4 pembangkit listrik di Anambas, yaitu di Tarempa, Letung, Ladan dan Kuala Maras dengan jumlah pelanggan total 2.743 rumah tangga (sekitar 27 persen dari total RT di Anambas). Ratio ini masih sangat kecil sehingga dimasa yang akan datang perlu diperluas keterjangkauannya melalui berbagai jenis teknologi pembangkit listrik seperti tenaga surya, tenaga mikro dan piko hidro serta tenaga arus dan gelombang, dimana teknologi ini sudah banyak diterapkan oleh BPPT di berbagai daerah.

Dari daya terpasang sekitar 1.386 KW, daya yang mampu dibangkitkan adalah sekitar 1.090 KW dengan beban puncak sekitar 900 KW. Unit pembangkit dengan daya terbesar adalah di tarempa (mendekati 1 MW). Pembangkit yang dioperasikan menggunakan bahan bakar solar.

Tenaga yang mampu dihasilkan oleh pembangkit yang ada adalah sekitar 5,1 juta kWh dan yang terjual sekitar 4,6 juta kWh. Selisih nilai antara yang dihasilkan dan yang terjual adalah karena digunakan sendiri (rumah pembangkit) dan karena adanya loses (kehilangan/rugi-rugi).

B.4. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

Untuk mendukung pergerakan ekonomi lokal, maka peran lembaga keuangan baik Bank maupun Non Bank sangat dibutuhkan. Bank ada 2 unit di Siantan (Tarempa) sedangkan KUD ada 2 unit di Jemaja dan 1 unit di Siantan.

Jumlah layanan dan lembaga keuangan yang ada masih sangat minim sehingga perlu dikembangkan seiring dengan berkembangnya investasi di Anambas.

B.5. Penataan Wilayah

Wilayah Kepulauan Anambas memiliki berbagai fungsi kawasan yang diperlukan baik untuk budidaya dan menjaga kelestarian lingkungan

B.5.1. Rencana Kawasan Lindung

a. Kawasan Hutan Lindung

Tujuan perlindungan terhadap kawasan hutan lindung adalah untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidro orologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Kawasan hutan lindung memiliki luas 3746 ha Lokasi hutan lindung ini berada di Pulau Jemaja, Palmatak dan Semut.

b. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan lindung setempat meliputi :

- Sempadan pantai (100 meter) sepanjang 160km, yaitu pada sepanjang pesisir pantai terutama pada kawasan pantai yang pada saat ini belum merupakan permukiman seluas 158,40 km².
- Sempadan mata air selebar 50-100 meter disesuaikan dengan kondisi sempadan saat ini yang hampir seluruhnya berupa air yang berasal dari celah batu.
- Sempadan sungai, selebar 50-100 meter pada sungai sungai di DAS Air Abu, DAS Anambas, DAS Bajau, DAS Jemaja, DAS Matak, DAS Mubur, DAS Siantan, dan DAS Telaga, seluas kurang lebih 3,07 km².

c. Kawasan Swaka Alam

Kawasan suaka alam berupa Taman Nasional Laut Kepulauan Anambas, yang sekaligus merupakan kawasan lindung nasional dengan status II/B/4. Luas Taman Nasional Laut 197.113,70 ha. Lokasi dari kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Anambas ini, berada perairan sebelah utara Pulau Jemaja.

Potensi keragaman hayati yang tinggi, terdiri dari sebaran terumbu karang dan terdapat beberapa jenis biota laut yang langka seperti penyu hijau. Taman Nasional Laut Kepulauan Anambas ini merupakan jalur migrasi Ikan Paus dari Samudera Hindia menuju Laut Cina Selatan.

d. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas berupa bencana banjir di Kota Tarempa yang berasal dari luapan Sungai Sugi akibat hujan di wilayah hulu sungai ditambah dengan kondisi pasang air laut. Bencana banjir ini terjadi setiap dua tahun sekalitahun genap setiap Bulan Desember (BMKG Kabupaten Anambas, 2010) yang menimpa kawasan permukiman hingga ke pusat pemerintahan.

Kawasan rawan bencana gelombang pasang yang terjadi pada musim utara, yaitu pada akhir tahun hingga awal tahun berikutnya. Wilayah rawan gelombang pasang berada diseluruh pesisir Kabupaten Kepulauan Anambas.

B.5.2. Rencana Kawasan Budidaya

a. Kawasan Hutan Produksi

Hutan produksi yaitu adalah hutan yang dapat dikelola untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi. Hutan produksi dapat dikategorikan menjadi dua golongan yakni hutan rimba dan hutan budidaya. Hutan rimba adalah hutan yang alami sedangkan hutan budidaya adalah hutan yang sengaja dikelola manusia yang biasanya terdiri dari satu jenis tanaman saja. Hutan rimba yang diusahakan manusia harus menebang pohon dengan sistem tebang pilih dengan memilih pohon yang cukup umur dan ukuran saja agar yang masih kecil tidak ikut rusak.

b. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian yang akan dikembangkan adalah pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan hortikultura. Peruntukannya adalah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel.2.34. Kawasan Pertanian

No	Jenis Kawasan Pertanian	Luas		Lokasi
1	Lahan Basah	13,94	km2	Jemaja, Jemaja Timur
2	Lahan Kering	92,84	km2	Jemaja, Jemaja Timur, Siantan, Siantan Timur, Palmatak
3	Hortikultura	29,2	km2	Jemaja, Jemaja Timur, Siantan, Siantan Timur, Palmatak
	Total	135,98	km2	

Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas, 2011 - 2031

c. Kawasan Perkebunan

Tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah perkebunan rakyat yang dikelola secara tradisional antara lain terdiri dari komoditi cengkeh, kelapa dan karet merupakan komoditi perkebunan yang dominan ditanam di Kabupaten Kepulauan Anambas disamping komoditi perkebunan lainnya seperti lada, kopi, pinang, sagu dan lain-lainnya yang diusahakan secara turun-temurun. Potensi luas lahan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan perkebunan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah seluas kurang lebih 213,10 km² lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35 Kawasan Perkebunan

No	Kecamatan	Luas	Sat Luas	Komoditi
1	Jemaja	24,7	km2	Cengkeh, kelapa, karet, lada, kopi, pinang, Sagu
2	Jemaja Timur	47,3	km2	Cengkeh, kelapa, karet, lada, kopi, pinang, Sagu
3	Siantan Selatan	24	km2	Cengkeh, kelapa, karet, lada, kopi, pinang
4	Siantan	25	Km2	Cengkeh, kelapa, karet, lada, kopi, pinang
5	Siantan Timur	30,25	Km2	Cengkeh, kelapa, karet, lada, kopi, pinang, Sagu
6	Siantan Tengah	15	Km2	Cengkeh, kelapa, karet, lada, kopi, pinang
7	Palatak	46,85	Km2	Cengkeh, kelapa, karet, lada, kopi, pinang, Sagu
	Total	213,1	km2	

Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas, 2011 – 2031

d. Kawasan Pertambangan

Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai potensi yang cukup besar di bidang pertambangan, antara lain: minyak bumi, gas alam, granit dan pasir (darat dan laut) dengan potensi dan penyebarannya sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel.2.36 Kawasan Pertambangan

No	Jenis	Cadangan	Sat	Lokasi
1.	Migas			
	Minyak Bumi	326,15	MMSTB	Cekungan Kepulauan Anambas dan Natuna
	Gas Alam	53,06	TSCF	Cekungan Kepulauan Anambas dan Natuna
2.	Granit	19.662.288.605	ton	Tersebar di beberapa pulau
3.	Pasir			
	Pasir darat	16.800.000	ton	Tersebar di beberapa pulau
	Pasir laut	7.164.348.267	ton	Tersebar di beberapa pulau

Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas, 2011 - 2031

e. Kawasan Industri

Jenis industri yang terdiri Kawasan industri besar dan pendukung pertambangan

Jenis industri yang direncanakan untuk dapat dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain industri kecil (khususnya industri makanan yang merupakan pengolahan dari hasil laut) dan alat angkut. Dimana khusus untuk alat angkut berupa industri pembuatan kapal rakyat. Luas rencana kawasan industri kurang lebih 4,31 km², dimana lokasi dari rencana pengembangan kawasan industri adalah sebagai berikut:

Tabel.2.37. Kawasan Industri

No	Jenis Kawasan Industri	Luas	Sat Luas	Lokasi
1	Besar	520		Tarempa, Letung, Antang, Bayat
	(Industri Rumah Tangga, pengolah hasil laut)			
2.	Industri Pembuatan Kapal	150		Kecamatan Palmatak dan Jemaja
	Total Kawasan Industri	670	ha	

Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas, 2011 - 2031

f. Kawasan Perikanan

Sektor perikanan merupakan sektor yang sangat berperan dalam pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas karena kabupaten ini merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari lebih 200 pulau dan hampir seluruhnya tergolong kategori pulau kecil. Salah satu karakteristik pulau-pulau kecil adalah terbatasnya daya dukung sumberdaya alam di daratan, sehingga masyarakat yang sebagian besar tinggal di wilayah pesisir memiliki mata pencaharian yang bergantung pada potensi perikanan dan kelautan serta jasa-jasa kelautan seperti ekowisata

Perikanan Tangkap

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 238 pulau-pulau kecil dengan panjang pantai seluruhnya 1.216 km. Perairan laut Kabupaten Kepulauan Anambas menghadap ke perairan Zona Ekonomi Eksklusif dan laut lepas yang termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Laut Cina Selatan. Secara geografis, perairan Kabupaten Kepulauan Anambas berada di tengah perairan Laut Cina Selatan yang kaya akan sumberdaya ikan bernilai ekonomis penting, sehingga seluruh perairan Kepulauan Anambas merupakan daerah penangkapan ikan yang sangat luas dan potensial, yang terdiri dari perairan kepulauan, perairan pantai 0 sampai 12 mil dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kapal-kapal penangkap ikan berukuran besar (antara 50 - 100 GT) dari luar wilayah seperti Jawa Timur (Probolinggo dan Lamongan), Jawa Tengah (Pati, Pekalongan dan Tegal) dan Jawa Barat (Indramayu) serta Kepri (Karimun) sering melakukan penangkapan ikan di perairan Laut Cina Selatan tepatnya di sebelah Selatan Perairan Kepulauan Anambas. Kapal-kapal tersebut umumnya menggunakan alat tangkap *purse seine*.

Adapun jumlah dan jenis sarana penunjang penangkapan ikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain :

- Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tarempa yang berada di Antang, Kecamatan Siantan
- Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 unit di Kecamatan Siantan
- Pabrik es berkapasitas 5 ton/hari yang terdapat di Kecamatan Siantan Tengah, Palmatak dan Jemaja.
- Tempat Pendaratan Ikan (TPI) sebanyak 1 unit di Kecamatan Siantan, Jemaja dan Palmatak

g. Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan dapat dibedakan menjadi ternak besar dan ternak kecil berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tetap memperhatikan kriteria yang ada yaitu tidak berdekatan dengan kawasan permukiman, untuk kawasan ternak besar diarahkan pada Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur berupa ternak sapi dan kambing secara terpadu dengan kawasan pertanian lahan basah dan kering pada kecamatan tersebut.

Sedangkan untuk ternak kecil diarahkan pada seluruh kecamatan dengan tetap memperhatikan kriteria yang ada yaitu tidak berdekatan dengan kawasan permukiman.

h. Kawasan Pariwisata

Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri gugusan pulau besar dan kecil memiliki potensi di sektor pariwisata yang tersebar ke beberapa kecamatan, baik wisata bahari, wisata pantai, air terjun, pemandangan (*view*), dan sebagainya.

Seperti diarahkan dalam kebijakan pengembangan dari tata ruang wilayah Provinsi Kepri, bahwa Kabupaten Anambas diarahkan sebagai pusat pengembangan pariwisata, terutama wisata bahari, dengan keindahan bawah laut dan terumbu karang. Rencana pengembangan kawasan pariwisata seluas kurang lebih 1460 ha dengan lokasi sebagai berikut;

- Pengembangan wisata bahari diarahkan dan direncanakan di Pulau Penjalin Besar dan Kecil, Pulau Bawah, Pulau Ayam, Pulau Semut, Pulau Kelong, Pulau Berhala, Pulau Tokong Atap, dan Pulau Durai. Selain itu dikembangkan pula pada pulau kecil lainnya yang tersebar di beberapa kawasan.
- Pengembangan wisata alam di Air Terjun Temurun di Kecamatan Siantan Timur dan Air Terjun Air Bunyi di Kecamatan Siantan Selatan dan Air Terjun Neraja di Pulau Jemaja.
- Pengembangan wisata budaya khas terdiri dari Mesjid Jamik di Tarempa, Vihara Gunung Dewa di Tarempa dan Makam Keramat Siantan di Siantan Tengah.

Tabel. 2.38. Kawasan Pariwisata

No	Jenis	Luas	Sat	Lokasi
1.	Wisata Bahari			Pulau Penjalin Besar dan Kecil, Pulau Bawah, Pulau Ayam, Pulau Semut, Pulau Kelong, Pulau Berhala, Pulau Tokong Atap, dan Pulau Durai
2.	Wisata Alam			Air Terjun Temurun di Kecamatan Siantan Timur dan Air Terjun Air Bunyi di Kecamatan Siantan Selatan dan Air Terjun Neraja dan Nguan di Pulau Jemaja.
3.	Wisata Budaya			Pulau Penjalin Besar dan Kecil, Pulau Bawah, Pulau Ayam, Pulau Semut, Pulau Kelong, Pulau Berhala, Pulau Tokong Atap, dan Pulau Durai

Sumber : Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas, 2011 - 2031

i. Kawasan Permukiman

Mencermati perkembangan kawasan dan kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi, pertumbuhan kawasan perkotaan di Kepulauan Anambas direncanakan pada Tarempa, Letung, Tebanglidan, Payalaman, Nyamuk, Air Bini, Air Asuk, Ulu Maras seluas kurang lebih 7,6 km².

Pola permukiman perdesaan di Kepulauan Anambas umumnya membentuk pola pita (*ribbon*) memanjang mengikuti pola pesisir pantai. Hal ini mudah dilihat, rencana pengembangan permukiman perdesaan di Temburun, Air Sena, Rewak, Piasan, Kuala Maras seluas kurang lebin 6,96 km².

Tabel.2.39. Kawasan Permukiman

No	Jenis	Luas	Sat	Lokasi
1.	Pemukiman Perkotaan	1917,97	ha	Tarempa, Letung, Tebanglidan, Payalaman, Nyamuk, Air Bini, Air Asuk, Ulu Maras
2.	Pemukiman Perdesaan	6,96	ha	Temburun, Air Sena, Rewak, Piasan, Kuala Maras
	Total	14,56	ha	

Sumber : Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas, 2011 - 2031

j. Kawasan lainnya

Kawasan lainnya terdiri dari kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan pusat pemerintahan.

- Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Tarempa, Tebang Ladan dan Letung.
- Rencana pengembangan kawasan pusat pemerintahan berada di Tarempa dengan memperhatikan kriteria untuk pengembangan pusat pemerintahan; yaitu;
 - Lokasinya mudah terjangkau
 - Tidak berada pada kawasan hutan lindung dan kawasan lindung lainnya.
 - Tidak berada pada kawasan yang potensial untuk pengembangan kawasan pertanian
 - Memiliki sumber air bersih yang cukup.

Secara fungsional Kota Tarempa adalah sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan budaya. Tebang Ladan dan Letung sebagai kawasan perkotaan pesisir dengan fungsi utama kegiatan berbasis laut dan sekaligus akan menjadi sub pusat kegiatan minapolitan.

Tabel.2.40 Kawasan Lainnya

No	Jenis	Luas	Sat	Lokasi
1.	Perdagangan Jasa		ha	Tarempa, Tebang Ladan dan Letung.
2.	Pusat Pemerintahan		ha	Tarempa
			ha	

Sumber : Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas, 2011 - 2031

k. Peruntukan Lahan Hingga 2031 (Berdasarkan RanperdaRTRW Kabupaten Anambas)

Peruntukan lahan berdasarkan RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas 2011 – 2031 adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel.2.41. Rencana Peruntukan Lahan Hingga 2031

No.	Renc Peruntukkan Lahan	Luas (Km ²)	Per(persen)
A.	Kawasan Lindung	201,74	31,8
1	Hutan Lindung	38,07	6
2	Sempadan Pantai	158,4	24,96
3	Sempadan Sungai Dan Mata Air	3,07	0,48
4	Suaka Margasatwa Laut*)	1,57	0,24
B.	Kawasan Budi Daya	423,63	68,2
1	Hutan Produksi (Hp)	11,69	1,84
2	Hutan Produksi Konversi (Hpk)	89,84	14,16
3	Hutan Produksi Tetap (Hpt)	30,85	5,86
4	Pertanian		
	Pertanian Lahan Basah	13,94	2,19
	Pertanian Lahan Kering	92,84	14,63
	Hortikultura	29,2	4,6
5	Perkebunan	118,5	18,67
6	Perikanan Laut	-	-
7	Industri	4,31	0,67
8	Pariwisata	3,6	0,56
9	Peternakan	11,7	1,84
10	Pertambangan	-	-
11	Permukiman	14,56	2,29
12	Lain-Lain	2,7	1,01
	Jumlah	634,37	100,00 persen

Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas, 2011 - 2031

2.4.3. Iklim Berinvestasi

C.1. Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2.42 Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010

No	Kasus	Tahun 2010
1	Pembunuhan	-
2	Perkosaan	3
3	Penganiayaan Ringan	1
4	Penganiayaan Berat	
5	Pencurian dengan Pemberatan	
6	Pencurian Ringan	
7	Penipuan	-
8	Penadahan	-
	Jumlah	4

Sumber: Kepulauan Anambas Dalam Angka, 2010

Berdasarkan perhitungan di atas, selanjutnya dapat dilakukan perhitungan pertumbuhan jumlah penduduk dan angka kriminalitas untuk 20 tahun masa mendatang yang dijabarkan per 5 tahun seperti terlihat pada Tabel. sebagai berikut :

Tabel 2.43 Proyeksi Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Anambas,
2008 – 2025

Uraian	2008 – 2010	2011 – 2015	2016 – 2020	2021 - 2025
Jumlah Penduduk	37.704	47.998	58.292	68.586
Angka Kriminalitas	2,20	2,56	3,16	3,76

Sumber : Hasil analisis

C.2. Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

C.3. Kemudahan Perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Jenis perijinan yang dianalisis antara lain meliputi:

- SIUP: Surat Izin Usaha Perdagangan
- TDP: Tanda Daftar Perusahaan
- IUI : Izin Usaha Industri
- TDI : Tanda Daftar Industri
- IMB : Izin Mendirikan Bangunan
- HO : Izin Gangguan

C.4. Pengeanaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah)

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Contoh pajak daerah yaitu: pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak restoran/hotel.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Contoh retribusi daerah yaitu: retribusi sewa tempat di pasar milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda, dan retribusi sejenis lainnya.

C.5. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

C.6. Status desa (Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa)

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan desa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang.

2.4. Aspek Sumberdaya Manusia

Ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Anambas masih sangat memprihatinkan. Dari data Kepulauan Anambas dalam angka tahun 2010, menunjukkan bahwa sekitar 11.692 orang masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas yang

mendapatkan pekerjaan dari total jumlah orang berusia diatas 15 tahun, sehingga rasio orang yang bekerja adalah 49,12 persen.

2.5.1. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja ditunjukkan dengan rasio lulusan S1/S2/S3 dibandingkan dengan jumlah penduduk. Dari Anambas dalam angka tahun 2010 diperoleh data bahwa jumlah lulusan perguruan tinggi dilingkungan pemerintah daerah adalah 674 orang dengan komposisi S1 641 orang dan S2 33 orang.

Tabel 2.44. Kualitas Tenaga Kerja

Uraian	Jumlah			
	2010	2015	2020	2025
• Penduduk	37.411	50.948	68.610	92.396
• Jenjang Sarjana strata 1 dan Diploma	641	1.000	1.500	2.000
• Jenjang Sarjana strata 2	33	50	75	100
• Jumlah Sarjana strata 1 & 2	674	1.050	1.575	2.100
• Kualitas Tenaga Kerja (persen)	1,8	2,06	2,30	2,27

- Data diolah

Pada tahun 2025 diharapkan rasio jumlah S1/S2/S3 akan meningkat seiring dengan rencana akan dikembangkannya beberapa unggulan daerah menjadi industri berbasis kluster antara lain pariwisata, perikanan dan pertambangan. Dengan dikembangkannya sektor industri, maka harus dilakukan pengembangan jumlah sarjana strata 1-3 mengingat akan dikembangkan pusat pusat inovasi untuk ke 3 unggulan.

2.5.2. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah

penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara Penduduk usia <15 + usia >64 dibagi jumlah penduduk usia 15 – 64. Rasio ketergantungan pada tahun 2009 adalah 0,497.

Rasio ketergantungan semakin kecil semakin baik, dengan mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk usia < 15 tahun sebesar sebesar 3 persen setiap tahun maka pertumbuhan penduduk usia non produktif akan menurun sampai dengan tahun 2025, sedangkan penduduk usia produktif diharapkan meningkat sebesar 3 persen pertahun dengan kondisi tersebut maka angka ketergantungan akan menurun sbb:

Tabel 2.45. Rasio ketergantungan

No	Uraian	2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	11.982	14.313	18.607	24.189
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	1.244	1.080	1.404	1.826
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	13.226	15.393	20.011	26.015
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	24.185	36.635	48.599	66.381
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,55	0,420	0,412	0,392

No	Uraian	2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025
6.	Jumlah Penduduk	37.411	50.948	68.610	92.396

- Data diolah

Terjadi penurunan rasio ketergantungan dengan target sampai dengan tahun 2025 sebesar 0,39 yang artinya dari setiap 100 orang maka 61 orang akan menanggung 39 orang.

2.5. Aspek Sistem Inovasi Daerah

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dengan tingkat persaingan global yang semakin tajam, maka pendekatan sistem inovasi daerah perlu dilakukan yang meliputi:

Pengembangan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis.

Penguatan kelembagaan dan daya dukung iptek/ litbangyasa serta pengembangan kemampuan absorpsi industri, khususnya UKM.

Penumbuhkembangan kolaborasi bagi inovasi dan peningkatan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbangyasa.

Pengembangan budaya inovasi.

Penumbuhkembangan dan perkuatan keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan kluster industri daerah dan nasional.

Penyelarasan dengan perkembangan global

Pengembangan Kerangka Umum yang kondusif bagi Inovasi dan Bisnis

Tujuan utama agenda ini pada dasarnya adalah mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi. Bagian pertama yang perlu dibenahi secara umum adalah berkaitan dengan kerangka mendasar bagi pengembangan sistem inovasi termasuk penataan/pengembangan basis data berkaitan dengan sistem inovasi.

Indikator penting terkait fokus ini antara lain meliputi :

- Keberadaan kebijakan inovasi dan bisnis yang kondusif.
- Ketersediaan infrastruktur dasar bagi perkembangan inovasi dan bisnis.
- Pelayanan perolehan HKI.

Untuk mencapai tujuan fokus ini, capaian yang harus diraih dari setiap indikator tersebut di masa yang akan datang dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.46. Proyeksi Kerangka Umum Inovasi

No	Indikator	Proyeksi Ke depan		
		2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025
1	Keberadaan kebijakan inovasi dan bisnis yang kondusif.	1.1. Tersedia dasar hukum bagi penguatan sistem inovasi daerah 1.2. Tercipta perijinan bisnis yang sederhana 1.3. Tercipta persaingan bisnis yang sehat dan adil 1.4. Tersedia basis data inovasi	1.1. Tidak ada regulasi yang menghambat inovasi dan bisnis 1.2. Tersedia pembiayaan berisiko 1.3. Tersedia insentif fiskal terkait inovasi	1.1. Tersedia kebijakan inovasi dan bisnis yang kuat
2	Ketersediaan infrastruktur dasar bagi perkembangan inovasi dan bisnis.	2.1. Terbangun infrastruktur TIK yang terpadu 2.2. Tersedia inkubator teknologi dan bisnis	2.1. Tersedia laboratorium terspesialisasi	2.1. Terbangun <i>technopark</i>
3	Pelayanan perolehan HKI.	3.1. Adanya program kampanye kepedulian dan apresiasi HKI 3.2. Tersedia Klinik HKI	3.1 Tersedia fasilitasi perolehan HKI	3.1 Tersedia Konsultan HKI

Penguatan Kelembagaan dan Daya Dukung IPTEK/Litbangyasa serta pengembangan kemampuan absorpsi industri khususnya UKM. Tujuan utama agenda ini adalah mengembangkan/memperkuat atau mereorganisasi unsur - unsur lembaga yang penting agar berfungsi tepat bagi pemajuan sistem inovasi, meningkatkan daya ungkit peran Iptek/litbangyasa yang sesuai dan spesifik, serta meningkatkan kemampuan industri, khususnya UKM dalam mengakses dan memanfaatkan pengetahuan dan hasil litbangyasa/inovasi serta mengembangkannya.

Indikator penting terkait fokus ini antara lain meliputi :

- Keberadaan kelembagaan iptek.
- Ketersediaan pendanaan litbangyasa.
- Modernisasi industri, khususnya UKM.

Untuk mencapai tujuan fokus ini, capaian yang harus diraih dari setiap indikator tersebut di masa yang akan datang dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.47. Analisis Proyeksi Kelembagaan Inovasi

No	Indikator	Proyeksi Ke depan		
		2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025
1	Keberadaan kelembagaan iptek.	1.1. Terbentuk kelembagaan iptek	1.1. Terbentuk kelembagaan iptek bertaraf nasional	1.1. Terbentuk kelembagaan iptek bertaraf internasional
2	Ketersediaan pendanaan litbangyasa.	2.1. Ketersediaan anggaran litbangyasa sebesar 0,5 persen dari PDRB	2.1. Ketersediaan anggaran litbangyasa sebesar 1 persen dari PDRB	2.1. Ketersediaan anggaran litbangyasa sebesar 2 persen dari PDRB
3	Modernisasi industri, khususnya UKM.	3.1. 10 persen industri/ UKM yang ada masuk kategori modern	3.1 50 persen industri/ UKM yang ada masuk kategori modern	3.1 100 persen industri/ UKM yang ada masuk kategori modern

Penumbuhkembangan kolaborasi bagi inovasi dan peningkatan difusi inovasi praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbangyasa. Tujuan utamanya adalah mendorong interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan praktik baik dan hasil-hasil litbangyasa yang sesuai dengan potensi terbaik setempat.

Indikator penting terkait fokus ini antara lain meliputi :

- Jumlah litbangyasa kolaboratif
- Tingkat pemanfaatan hasil litbangyasa oleh penerima/ *adopter*.

Untuk mencapai tujuan fokus ini, capaian yang harus diraih dari setiap indikator tersebut di masa yang akan datang dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.48. Analisis Proyeksi Pemanfaatan Litbang

No	Indikator	Proyeksi Ke depan		
		2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025
1	Jumlah litbangyasa kolaboratif	1.1. Terselenggara 5 litbangyasa kolaboratif	1.1. Terselenggara 8 litbangyasa kolaboratif	1.1. Terselenggara 10 litbangyasa kolaboratif
2	Tingkat pemanfaatan hasil litbangyasa oleh penerima/ <i>adopter</i> .	2.1. 50 persen hasil litbangyasa dimanfaatkan oleh industri	2.1. 75 persen hasil litbangyasa dimanfaatkan oleh industri	2.1. 100 persen hasil litbangyasa dimanfaatkan oleh industri

Pengembangan Budaya Inovasi

Tujuan agenda ini adalah membangun landasan budaya inovatif dan kewirausahaan, menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan baru yang inovatif, serta memperkuat kohesi sosial.

Indikator penting terkait fokus ini antara lain meliputi :

- Keberadaan program pengembangan budaya kreatif inovatif dan kewirausahaan
- Jumlah pewirausaha dibandingkan dengan jumlah penduduk.
- Tingkat Kohesi sosial.

Untuk mencapai tujuan fokus ini, capaian yang harus diraih dari setiap indikator tersebut di masa yang akan datang dapat disampaikan sebagai berikut :

Pada tahap awal dilakukan pendidikan dini kewirausahaan dan inkubasi teknobisnis dengan target dapat dihasilkan pewira usaha sebesar 0,5 persen jumlah penduduk. Sedangkan pada tahap berikutnya dilakukan pengembangan program dengan pewira usaha sekitar 1 persen, dan pada tahap pemantapan, diharapkan dapat meningkatkan jumlah pewirausaha menjadi sekitar 2 persen jumlah penduduk.

Memang target-target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan program-program pemerintah saja, tetapi partisipasi swasta yang paling berperan dalam pencapaiannya. Pemerintah akan mendorong terus melalui program pengembangan budaya kreatif, insentif bagi inkubasi bisnis, dan hal-hal yang mendorong iklim usaha lainnya. Tetapi,

peran swasta sebagai pelaku utama yang sangat menentukan untuk menelorkan pewirausaha sesuai target.

Tabel 2.49. Analisis Proyeksi Budaya Inovasi

No	Indikator	Proyeksi Ke depan		
		2011 – 2015	2016 - 2020	2021 - 2025
1	Keberadaan program pengembangan budaya kreatif inovatif dan kewirausahaan	1.1. Penataan program pendidikan dini kewirausahaan, apresiasi prestasi inovasi, dan fasilitasi belajar seumur hidup 1.2. Penataan program inkubasi teknobisnis dan insentif bagi usaha pemula inovatif	1.1. Pengembangan program pendidikan dini kewirausahaan, apresiasi prestasi inovasi, dan fasilitasi belajar seumur hidup 1.2. Pengembangan program inkubasi teknobisnis dan insentif bagi usaha pemula inovatif	1.1. Pemantapan program pendidikan dini kewirausahaan, apresiasi prestasi inovasi, dan fasilitasi belajar seumur hidup 1.2. Pemantapan program inkubasi teknobisnis dan insentif bagi usaha pemula inovatif
2	Jumlah pewirausaha dibandingkan dengan jumlah penduduk.	2.1. Jumlah pewirausaha = 0,5 persen jumlah penduduk	2.1. Jumlah pewirausaha = 1 persen jumlah penduduk	2.1. Jumlah pewirausaha = 2 persen jumlah penduduk
3	Tingkat Kohesi sosial.	3.1. Tidak pernah terjadi kerusuhan sosial	3.1 Tidak pernah terjadi kerusuhan sosial	3.1 Tidak pernah terjadi kerusuhan sosial

Penumbuhkembangan dan perkuatan keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah dan nasional

Tujuan utamanya adalah mendorong investasi dan aktivitas dalam sistem inovasi sejalan dengan penguatan rantai nilai dalam jaringan ataupun klaster industri dalam upaya membangun ekonomi wilayah/lokal dengan pendekatan sistem.

Indikator penting terkait fokus ini antara lain meliputi :

- Perkembangan klaster industri.
- Sinkronisasi kebijakan inovasi dengan daerah lain dan nasional.

Untuk mencapai tujuan fokus ini, capaian yang harus diraih dari setiap indikator tersebut di masa yang akan datang dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.50. Analisis Proyeksi Pengembangan Klaster Industri

No	Indikator	Proyeksi Ke depan		
		2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025
1	Perkembangan klaster industri.	1.1. Berkembang 3 klaster indutsri	1.1. Berkembang 5 klaster indutsri	1.1. Berkembang 8 klaster indutsri
2	Sinkronisasi kebijakan inovasi dengan daerah lain dan nasional.	2.1. Terjalin 5 kerjasama/ sinkro-nisasi kebijakan inovasi dengan daerah lain/ Pemerintah Pusat	2.1. Terjalin 10 kerjasama/ sinkro-nisasi kebijakan inovasi dengan daerah lain/ Pemerintah Pusat	2.1. Terjalin 15 kerjasama/ sinkro-nisasi kebijakan inovasi dengan daerah lain/ Pemerintah Pusat

Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Tujuan utama agenda ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesiapan pemangku kepentingan di daerah agar semakin dapat memahami dan menguasai perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan daerah dan kemajuan daerah.

Indikator penting terkait fokus ini antara lain meliputi :

- Tingkat partisipasi dalam Fora Isu Internasional.
- Peningkatan MSTQ.

Tujuan fokus diatas memerlukan fasilitas yang memungkinkan pewirausaha untuk selalu memantau pasar, standar-standar baru yang dikeluarkan serta bagaimana ikut serta dalam forum internasional untuk menentukan standar dan aturan main perdagangan dan industri. Selain itu, hal yang paling utama adalah bagaimana pewirausaha lokal mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di pasar global, serta mendapat dukungan dari pemerintah untuk secara bersaha-sama mengatasi berbagai tekanan baik di pasar global maupun pasar dalam negeri, karena persaingan global saat ini tidak hanya terjadi di pasar ekspor, tetapi dengan terbukanya perdagangan internasional, maka persaingan global sudah terjadi di dalam negeri sendiri.

Untuk mencapai tujuan fokus ini, capaian yang harus diraih dari setiap indikator tersebut di masa yang akan datang dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.51. Analisis Proyeksi Penyeragaman Perkembangan Global

No	Indikator	Proyeksi Ke depan		
		2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025
1	Tingkat partisipasi dalam Fora Isu Internasional.	1.1. Aktif dalam pemantauan pasar internasional	1.1. Berpartisipasi aktif dalam forum internasional terkait industri dan perdagangan	1.1. Berpartisipasi aktif dalam forum internasional terkait industri dan perdagangan
2	Peningkatan MSTQ.	2.1. Adanya fasilitas peningkatan MSTQ	2.1. Produk industri memenuhi standar nasional dan internasional	2.1. Produk industri memenuhi standar nasional dan internasional

BAB III

PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS DAN SKENARIO PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

3.1.1. Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat

Apabila dikaitkan dengan kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kondisi kesejahteraan sosial serta kondisi seni budaya dan olah raga, maka berikut ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang mencuat ke permukaan.

A. Permasalahan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Persoalan yang terkait dengan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di antaranya adalah, pertama, secara nominal tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas memang relatif lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini ditunjukkan oleh produktivitas masyarakat (direpresentasikan oleh indikator PDRB per kapita dengan migas) di kabupaten ini yang paling tinggi nilainya di antara kabupaten/kota di provinsi tersebut. Akan tetapi, sepanjang jangka waktu 2008-2009 laju pertumbuhan PDRB per kapita dengan migas mengalami kontraksi sebesar -3,65%. Penurunan ini disebabkan lebih besarnya laju pertumbuhan penduduk (6,13%) dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi (2,26%) selama periode tadi.

Kedua, menurunnya produktivitas masyarakat di atas diperberat pula oleh masih relatif tingginya laju inflasi di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam, dimana pada tahun 2010 berkisar 6-8 persen. Ketiga, permasalahan lainnya yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya angka indeks Williamson tanpa migas selama periode 2009-2010. Artinya, ketimpangan regional antara Kabupaten Kepulauan Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau cenderung meningkat, meskipun ketimpangan tersebut dapat dikatakan masih relatif kecil.

B. Permasalahan Kesejahteraan Sosial

Beberapa permasalahan yang terkait dengan kesejahteraan sosial dapat diuraikan seperti berikut. Pertama, masih relatif tingginya angka buta huruf di Kabupaten Kepulauan Anambas, yakni mencapai 8,74% pada tahun 2009. Angka ini mengisyaratkan bahwa program pemberantasan buta huruf di daerah ini belum optimal, kemudian masih banyak penduduk yang belum mampu menyerap informasi dari berbagai media, serta kurang berkembangnya kemampuan intelektual sebagian masyarakat yang buta huruf tadi.

Kedua, relatif tingginya angka buta huruf di Kabupaten Kepulauan Anambas di atas diperkuat oleh masih rendahnya persentase siswa yang dapat menyelesaikan suatu jenjang pendidikan hingga mendapatkan ijazah. Pada tahun 2009, angka pendidikan yang ditamatkan untuk level SD adalah sebesar 24,9%, kemudian SLTP sekitar 11,29%, SLTA seputar 16,98%, lalu D1/D2 sebanyak 1,8% dan D4/S1 kira-kira 2,04%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagian besar hanya lulusan SD. Artinya, program pembangunan pendidikan dan penyediaan tenaga kerja berpendidikan belum berjalan optimal.

Ketiga, rata-rata penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas hanya bersekolah hingga tingkat sekolah dasar. Persoalan ini diindikasikan oleh indeks rata-rata lama sekolah yang hanya mencapai angka 5,35 pada tahun 2009. Dengan demikian, akumulasi investasi pendidikan individu di kabupaten ini masih relatif rendah.

Keempat, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah pula tingkat partisipasi penduduk usia sekolah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Indikatornya adalah angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni sekolah. Untuk angka partisipasi kasar, pada tahun 2009 mencapai sekitar 96,93% untuk tingkat SD, kemudian menurun menjadi 88,50% pada jenjang SLTP dan terus menurun hingga 74,55% memasuki level SLTA. Sedangkan angka partisipasi murni untuk ketiga jenjang sekolah ini berturut-turut adalah 96,93%, 51,93% dan 61,56%. Dengan kata lain, kedua indikator tadi sama-sama memperlihatkan bahwa daya serap penduduk usia sekolah cenderung menurun dengan semakin meningkatnya jenjang pendidikan.

Kelima, masih rendahnya rasio penduduk yang memiliki lahan. Apabila digunakan data petani di sektor komoditas kelapa, sagu, cengkeh dan karet, maka diperoleh hasil bahwa rasio penduduk yang memiliki lahan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2009 hanya sekitar 33,9% dari total penduduk.

Keenam, rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas juga relatif masih rendah, yakni hanya sekitar 32,8% pada tahun 2009. Rendahnya rasio penduduk yang bekerja ini diperkuat oleh masih relatif tingginya rasio ketergantungan penduduk di daerah tersebut, dimana pada tahun yang sama mencapai angka 0,497.

C. Permasalahan Seni Budaya dan Olah Raga

Aktivitas seni budaya dan olah raga di Kabupaten Kepulauan Anambas berkembang cukup baik. Jumlah grup kesenian maupun klub olah raga terus bertambah dari tahun ke tahun. Akan tetapi, permasalahan muncul ketika pertambahan grup kesenian dan klub olah raga tersebut belum diimbangi oleh peningkatan jumlah gedung kesenian maupun jumlah gedung/fasilitas olah raga. Akibatnya, penyelenggaraan pertandingan/perlombaan olah raga dalam skala *multi event* yang diikuti oleh peserta dalam jumlah besar mengalami kekurangan gedung/fasilitas.

3.1.2. Permasalahan Pelayanan Umum

1. Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah.

Isu keterbatasan kapasitas pemerintah daerah ini utamanya dilihat dari tiga hal (i) kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang belum optimal, (ii) jumlah pegawai yang kurang mencukupi, (iii) masih lemahnya kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hal ini ditunjukkan dari belum optimalnya mekanisme kerja dan koordinasi internal, dan (iv) sarana dan prasarana perkantoran yang belum memadai. Isu ini utamanya dikarenakan masih barunya kabupaten Kepulauan Anambas berdiri sebagai daerah otonom baru.

Keterbatasan ini kemudian berimbas pada banyak hal diantaranya adalah pengelolaan data dan informasi (*data base*) wilayah yang belum optimal dan tingkat pelayanan kepada masyarakat yang masih terbatas yang pada akhirnya dapat menyebabkan menurunnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan pelayanan birokrasi.

2. Masih terbatasnya pelayanan dan mutu pendidikan serta pengembangan keterampilan masyarakat.

Tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah dengan lebih dari 70% penduduknya berpendidikan Sekolah Dasar sehingga angka rata-rata lama sekolah relatif lebih rendah dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini berimbas pada masih dijumpainya kasus buta huruf, dan ini lebih banyak terdapat pada penduduk perempuan dibanding laki-laki.

Selain dari sisi peserta didik, ada pula permasalahan dari sisi tenaga pendidik yaitu rendahnya kualifikasi tenaga pendidik karena saat ini hanya sekitar 20% dari jumlah guru yang menamatkan pendidikan sarjana. Sarana pendidikan, baik dasar maupun menengah, juga masih memiliki keterbatasan sehingga menyebabkan akses terhadap pendidikan yang bermutu belum merata.

Oleh karena itu, isu strategis periode mendatang, selain peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan juga meliputi peningkatan mutu pendidikan yang salah satunya melalui peningkatan kualifikasi tenaga pendidik.

Pendidikan perlu untuk ditingkatkan tidak hanya pendidikan formal saja, melainkan juga pendidikan nonformal dan informal. Melalui pendidikan di luar jalur formal ini, maka pemberantasan buta huruf pada penduduk bukan usia sekolah dan berbagai peningkatan pengetahuan dan keterampilan kecakapan hidup (*lifeskill*) bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pencari kerja, dapat digalakkan.

3. Masih terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap kesehatan.

Karakteristik Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki banyak pulau-pulau kecil memunculkan tantangan tentang distribusi pelayanan dasar, salah satunya yang utama adalah pemerataan layanan kesehatan. Tenaga kesehatan saat ini belum merata distribusinya, ditambah lagi dengan sarana dan prasarana kesehatan yang masih terbatas (termasuk belum adanya Rumah Sakit Umum Daerah) menyebabkan rendahnya tingkat keterjangkauan kesehatan masyarakat. Permasalahan lain yang dijumpai pada isu kesehatan ini adalah masih dijumpainya status gizi kurang pada balita.

4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan, wisata, energi, dan jaringan listrik.

Aksesibilitas saat ini masih menjadi kendala, baik aksesibilitas antar pulau di dalam kabupaten maupun aksesibilitas antara kabupaten dengan wilayah luar. Kendala sarana dan prasarana transportasi masih dijumpai pada semua moda baik darat, laut, maupun udara. Kendala aksesibilitas ini menyebabkan banyak potensi seperti obyek-obyek wisata yang menarik menjadi kurang dapat dikembangkan.

Selain sarana dan prasarana transportasi, ketersediaan energi listrik juga masih menjadi kendala. Penyediaan listrik oleh PLN baru dapat melayani sekitar 10% dari seluruh jumlah Kepala Keluarga yang ada. Ketersediaan listrik ini tentunya memiliki spektrum pengaruh yang luas mulai dari pemenuhan kebutuhan rumah tangga hingga daya tarik daerah bagi kegiatan investasi.

5. Lemahnya kelembagaan masyarakat.

Kelembagaan masyarakat yang masih lemah ditandai dengan rendahnya keterlibatan kelompok masyarakat dalam pengambilan-pengambilan keputusan baik dalam hal pembangunan daerah maupun dalam hal partisipasi di organisasi-organisasi kemasyarakatan. Hal ini menyebabkan terkendalanya upaya untuk mendorong

pembangunan yang berbasis *bottom-up planning*. Kelembagaan sosial juga dipandang belum mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap masyarakat, misalnya dalam hal tindak kekerasan kepada perempuan.

Selain itu, kelembagaan masyarakat juga dapat dikaitkan dengan budaya, utamanya budaya Melayu. Saat ini, budaya Melayu dinilai sudah semakin terkikis sehingga upaya untuk merevitalisasinya menjadi sebuah hal strategis untuk dilakukan mengingat budaya tidak hanya merupakan warisan masa lalu melainkan juga modal dasar pembangunan.

6. Menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Penurunan kualitas lingkungan hidup ditandai dengan masih luasnya lahan yang berstatus kritis dan sangat kritis. Pembalakan liar (*illegal logging*) dan penambangan tanpa izin (Peti) menjadi salah satu faktor penyebab sehingga berakibat pada cukup luasnya kerusakan hutan. Reklamasi tambang pun belum optimal dilakukan.

Kualitas lingkungan hidup juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah. Saat ini, belum ada pengelolaan sampah secara terpadu. Selain mengancam kualitas tanah, sampah yang tidak terkelola ini juga akan mengancam ekosistem pesisir dan laut.

Isu-isu terkait lingkungan hidup ini juga mencakup kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya upaya-upaya konservasi. Kesadaran dan pemahaman masyarakat ini menjadi penting artinya karena perbaikan kualitas lingkungan hidup mutlak membutuhkan partisipasi masyarakat.

3.1.3. Permasalahan Daya Saing Daerah

Menganalisis data pada Bab II Gambaran Kondisi Daerah khususnya Aspek Daya Saing Daerah, ditemukan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam upaya meningkatkan daya saing daerah antara lain:

1. Kemampuan Ekonomi Daerah.

- **Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita** adalah sebesar 64% (Hasil pengolahan data dengan sumber Badan Pusat Statistik Propinsi Kepulauan Riau, diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2009). Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Nilai 64% relatif masih bisa ditingkatkan. **Ini merupakan permasalahan dan perlu dilakukan pengembangan ekonomi lokal.**

-
- **Pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan per kapita** adalah sebesar 36 % (Hasil pengolahan data dengan sumber Badan Pusat Statistik Propinsi Kepulauan Riau, diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2009). Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Nilai 36% relatif masih bisa ditingkatkan. **Ini merupakan permasalahan dan perlu dilakukan pengembangan ekonomi lokal.**
 - **Produktivitas Total Daerah** adalah sebesar 93,71% (Hasil pengolahan data dengan sumber Badan Pusat Statistik Propinsi Kepulauan Riau, diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2009) berarti masih kurang dari 100%, artinya Produktivitas Total Daerah masih belum tercapai. **Ini merupakan permasalahan dan perlu dilakukan pengembangan ekonomi lokal**
 - **Kemampuan Ekonomi Daerah** sektor pertanian diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP), sedangkan NTP *Provinsi Kepulauan Riau* Tahun 2009 adalah 1 (Kabupaten Kepulauan Anambas belum merilis NTP), maka dapat dikatakan bahwa petani mengalami impas/break even. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan dan ini dianggap sebagai permasalahan, oleh karena itu **perlu ditingkatkan..**

Bila ditinjau data PDRB, maka kontribusi perekonomian di Kabupaten Kepulauan Anambas (selain migas) adalah sektor pertanian dan perdagangan, Hotel dan Restoran menjadi kontributor tertinggi PDRB. Sektor pertanian termasuk di dalamnya adalah perikanan, sedangkan pariwisata termasuk dalam sektor perdagangan, Hotel dan Restoran. Oleh karena itu peningkatan NTP (sektor pertanian) antara lain melalui::

- a. Kelautan dan Perikanan
 - Perikanan tangkap dan budidaya
 - Pengembangan rumpon
 - Pengembangan pusat pengolahan ikan
 - Pembinaan nelayan
 - Pengembangan Minapolitan
- b. Pertanian
 - Peremajaan perkebunan yang ada
 - Pengembangan pertanian organik
 - Pemberdayaan Petani
 - Pengembangan agropolitan

Sedangkan Nilai Tambah dalam sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran khususnya pariwisata adalah melalui:

- Wisata bahari internasional
- Potensi dan obyek wisata
- Pengembangan dan pelestarian Budaya Melayu

2. Fasilitas, Sarana dan Prasarana Wilayah

- Transportasi darat direpresentasikan oleh indikator Rasio Panjang Jalan/Jumlah Kendaraan sebesar 10,86 (tahun 2008) dan 0.56 (Tahun 2009). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah kendaraan sehingga rasio Panjang Jalan/Jumlah Kendaraan menurun. **Hal ini merupakan permasalahan, artinya perlu ditingkatkan infrastruktur jalan seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan.**
- Transportasi Laut direpresentasikan oleh indikator jumlah dermaga. Jumlah dermaga di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 38 (Tahun 2008) dan 71 (Tahun 2009). **Hal ini merupakan peningkatan, namun indikator ini belum mencantumkan jumlah transportasi laut (kapal, perahu, boat dan lain-lain), sehingga kedepan perlu diperhitungkan peningkatan infrastruktur pelabuhan dan peningkatan sarana transportasi laut.**
- Transportasi Udara direpresentasikan oleh indikator Panjang Runway (m), Lebar Runway (m), Frekwensi. Pelabuhan Udara di Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat di Pal Matak dengan Panjang Runway = 1200 m, lebar runway = 20 m dan frekuensi kunjungan pesawat sebanyak 208 kali dalam setahun (Senin, Rabu, Jumat, Sabtu masing-masing sekali). Pelabuhan Udara Pal Matak merupakan pelabuhan konsorsium BP Migas. **Dengan harapan berkembangnya perekonomian Anambas, maka diperlukan pelabuhan udara dengan peningkatan frekuensi, runway dan lebar runway (Peningkatan infrastruktur bandara)**
- Listrik direpresentasikan oleh indikator Banyaknya Mesin = 9 unit, Daya Terpasang = 1.386 KW, Daya Mampu = 1.090 KW dan KWH Terjual= 4.670.169. Permasalahan listrik adalah belum meratanya penggunaan sampai ke desa oleh karena itu diperlukan Penyediaan daya listrik sampai ke desa.
- Air Minum direpresentasikan oleh indikator RT Pengguna Jasa PAM sebanyak 188 pelanggan (Tahun 2008) dan 1.129 (Tahun 2009) sedangkan RT Pengguna Non PAM sebanyak 897 (Tahun 2008) dan 2.264 (Tahun 2009). Permasalahan air bersih/air minum adalah belum meratanya penggunaan sampai ke seluruh pulau. Oleh karena itu diperlukan Penyediaan fasilitas air minum ke seluruh pulau.

- Pos dan Telekomunikasi direpresentasikan oleh indikator RT yang memiliki TV sebanyak 425 pada tahun 2009 dan Radio sebanyak 236 pada tahun 2009. Telepon dengan provider Telkom, Indosat, Telkomsel, Excelkomindo serta internet yang sementara ini hanya ada di Siantan. Melihat hal diatas perlu dilakukan Penyediaan fasilitas Pos dan Telekomunikasi hingga ke desa/pelosok pulau.
- Lembaga Keuangan direpresentasikan oleh indikator LKB: jumlah Bank sebanyak 2 (Tahun 2008 dan Tahun 2009) dan LKBB (Koperasi, sebanyak 29 pada Tahun 2008 dan 24 pada Tahun 2009, sedangkan KUD sebanyak 1 tahun 2008 dan 3 tahun 2009. LKB dan LKBB diatas masih perlu ditingkatkan dan dilakukan penyelenggaraan lembaga keuangan desa.
- Perumahan direpresentasikan oleh indikator Pemukiman Perkotaan sebanyak 7,6 km² dan Pemukiman Perdesaan sebanyak 6,96 km². Permasalahan adalah masih sedikit peruntukan perumahan untuk nelayan, oleh karena itu diperlukan Penyediaan perumahan rakyat khususnya nelayan.
- Penataan Wilayah direpresentasikan oleh indikator oleh penataan Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian, Kawasan Pertambangan, Kawasan Industri, Kawasan Perikanan, Kawasan Peternakan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perkebunan. Hal diatas diperlukan Penyusunan dan penerapan rencana RTRW

Secara keseluruhan Hal yang perlu dilakukan terhadap Permasalahan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Wilayah antara lain melalui:

- Pengembangan Pelabuhan (Matak, Siantan)
- Pengembangan Bandara (Jemaja)
- Transportasi udara antar daerah (provinsi, nasional)
- Transportasi laut antar daerah (provinsi, nasional)
- Transportasi laut antar pulau (kabupaten)
- Transportasi darat (jalan dan angkutan umum)
- Subsidi transportasi anak sekolah
- Pengelolaan air bersih

3. Iklim Investasi

- Indikator Angka kriminalitas sebesar 1,96 menunjukkan tingkat kriminalitas sedang dan perlu diperkecil untuk keamanan dan kenyamanan melakukan usaha.
- Jumlah demonstrasi ditunjukkan dengan adanya pemogokan kerja sebanyak 2 kali dan pemogokan 1 kali pada tahun 2008. Agar terjadi iklim kondusif untuk usaha dan investasi maka seharusnya tidak terjadi pemogokan kerja.

- Lama proses perijinan ditunjukkan dengan adanya lama mengurus ijin (SIUP, TDP, IUI, TDP, IMB, HO). Yang sudah ditentukan lama waktu mengurus adalah IUI dan TDP, perijinan lainnya belum bisa ditentukan standarnya. Agar tercipta iklim kondusif untuk usaha dan investasi maka perlu diterapkan pelayanan terpadu satu pintu (yang mengacu pada Kemdagri, KemPAN dan BKPM), sehingga Jenis ijin dan non perijinan yang dilayani standar termasuk waktu, biaya, mekanisme dan lain-lain.
- Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah. Sampai dengan tahun 2008, 2009 dan 2010 belum tercatat data terkait dengan Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah. Agar tercipta iklim kondusif untuk usaha dan investasi maka Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah harus sudah dikodifikasi (dicatat) dan digunakan sebagai informasi untuk meningkatkan terciptanya iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi.
- Jumlah perda yang mendukung iklim usaha. Sampai dengan tahun 2008, 2009 dan 2010 belum tercatat data terkait dengan Jumlah perda yang mendukung iklim usaha. Agar tercipta iklim kondusif untuk usaha dan investasi maka Jumlah perda yang mendukung iklim usaha harus sudah dikodifikasi (dicatat) dan digunakan sebagai informasi untuk meningkatkan terciptanya iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi
- Status desa (Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa). Sampai dengan tahun 2008, 2009 dan 2010 belum tercatat data terkait dengan Status desa (Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa). Agar tercipta iklim kondusif untuk usaha dan investasi maka Status desa (Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa) harus sudah dikodifikasi (dicatat) dan digunakan sebagai informasi untuk meningkatkan terciptanya iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi

4. Kapasitas Inovatif Daerah

- Infrastruktur inovasi umum. Secara umum kondisi di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sangat minim yang ditunjukkan dengan masih rendahnya :((1) sumber daya manusia dan keilmuan, (2) akses terhadap pendidikan tinggi, (3) ketersediaan permodalan/kapital berisiko, (4) Infrastruktur informasi berkualitas tinggi, (5) Investasi pada riset “dasar”, (6) Sofistikasi teknologi secara keseluruhan (tingkat sofistikasi teknologi dari ekonomi, (7) Kebijakan pajak atas litbang, (8) Kebijakan dan pembiayaan pendidikan, (9) Kebijakan perlindungan kekayaan intelektual, (10) Penegakan hukum atas anti-monopoli (persaingan tak sehat).

Melihat hal diatas, maka perlu ditingkatkan Kapasitas Inovatif Daerah melaluipenerapan Sistem Inovasi Daerah.

- Lingkungan spesifik-klaster untuk inovasi. Secara umum kondisi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah belum terjadi/belum ada klaster industri, sehingga perlu dilakukan inisiasi klaster industri perikanan, klaster industri pariwisata dan lainnya yang diprogramkan untuk meningkatkan kapasitas inovatif melalui penerapan Sistem Inovasi Daerah.
- Hubungan antara infrastruktur inovasi umum dengan lingkungan klaster industri bersifat timbal-balik (Kualitas keterkaitan). Secara umum kondisi di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sangat minim yang ditunjukkan dengan masih rendahnya/belum adanya Kolaborasi riset antara universitas dan/atau lembaga litbang dengan perusahaan atau pihak lain, pemanfaatan Perijinan usaha/investasi di daerah (lama proses, biaya, mekanisme, kebijakan daerah yang relevan) dan lainnya. Melihat hal diatas, maka perlu ditingkatkan Kapasitas Inovatif Daerah melaluipenerapan Sistem Inovasi Daerah

3.1.4. Permasalahan Sumberdaya Manusia

Permasalahan sumber daya manusia adalah terkait dengan 4 hal yaitu angka melek huruf, angka tamat sekolah, kualitas sumber daya manusia dan angka ketergantungan. Pada kurun waktu kedepan menyongsong tahapan pembangunan dan pemantapan, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan agar sumberdaya manusia kabupaten Anambas dapat berperan dalam pembangunan daerahnya. Untuk itu diperlukan adanya peningkatan sistem pendidikan mengarah pada visi Anambasa hingga tahun 2025 yaitu sebagai unggulan dibidang pariwisata, perikanan dan pertambangan. Indikator SDM sampai dengan tahun 2009 adalah sbb. :

- Angka melek huruf tahun 2009 adalah 91,26% cukup tinggi, target tahun 2025 adalah membuat seluruh penduduk diatas usia 15 tahun melek huruf melalui program wajib baca dan tulis sampai kepedesaan dan pulau terpencil
- Angka rata rata lama sekolah (RLS) 5,25 tahun dimana nilai RLS nasional adalah 7 tahun, sehingga di dorong program sekolah wajib sekolah 9 (SMP) tahun, 12 (SMA) tahun dan 16 tahun (Perguruan Tinggi) sampai dengan tahun 2025
- Angka pendidikan yang ditamatkan paling tinggi adalah pada tingkat SD yaitu 24,29 % atau 24,29 persen dari penduduk Anambas adalah lulusan SD sesuai dengan angka rata-rata lama sekolah. Sampai dengan tahun 2025 harus dilakukan upaya

meningkatkan angka pendidikan yang ditamatkan sehingga yang SMA menjadi lebih besar dari SD dan SMP

- Usia harapan hidup 67,23 cukup tinggi sampai dengan akhir tahun 2025 diharapkan akan menjadi 80 tahun
- Jumlah penduduk yang masuk pada usia kerja namun tidak bekerja 52,54% lebih besar dari penduduk yang bekerja. Penciptaan lapangan kerja perlu upaya sangat berat melalui pengembangan potensi peluang usaha pariwisata, pertambangan dan perikanan. Sangat berat mengingat saat ini kondisi input masih minim.

3.1.5. Permasalahan Inovasi Daerah

Berkaitan dengan pengembangan sistem inovasi daerah, terdapat 6 (enam) kelompok isu umum sangat penting yang perlu memperoleh perhatian dan penanganan prioritas. Keenam kelompok isu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelemahan kerangka umum. Ini antara lain terkait dengan:
 - Isu umum mendasar yang terkait dengan sistem inovasi, seperti:
 - Adanya regulasi yang menghambat perkembangan inovasi.
 - Kelemahan lingkungan legal dan regulasi (yang diperlukan).
 - Kelemahan infra- dan supra-struktur pendukung perkembangan inovasi.
 - Administrasi perijinan yang birokratif.
 - Keterbatasan pembiayaan/pendanaan inovasi.
 - Isu perpajakan yang tidak kompetitif bagi aktivitas inovasi.
 - Kelemahan keperdulian dan implementasi perlindungan HKI.
2. Kelemahan kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa serta rendahnya kemampuan absorpsi industri, khususnya UKM.

Lembaga yang ada belum berfungsi sebagaimana yang diperlukan. Daya dukung iptek/litbangyasa yang relevan bagi pengembangan potensi terbaik daerah masih lemah. Di sisi lain, pelaku mayoritas usaha, yaitu UKM, umumnya memiliki keterbatasan antara lain dalam mengakses, memanfaatkan dan mengembangkan pengetahuan/teknologi untuk meningkatkan daya saing bisnisnya.
3. Kelemahan keterkaitan, interaksi dan kerjasama difusi inovasi (termasuk praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbangyasa).

Kesenjangan relevansi dan fungsi komplementatif antara perkembangan *knowledge pool* dengan tarikan kebutuhannya oleh pengguna, khususnya swasta, masih terbatasnya pola hubungan dan transaksi bisnis maupun non bisnis antar berbagai aktor, serta asimetri informasi dan keterbatasan dalam dukungan interaksi dalam sistem inovasi merupakan isu yang menghambat keterkaitan, proses interaksi dan kerjasama antarpihak dalam sistem inovasi daerah.

4. Persoalan budaya inovasi.

Beragam isu yang diungkapkan tersebut pada dasarnya juga menunjukkan belum berkembangnya kultur dalam masyarakat yang mendukung bagi kemajuan inovasi dan kewirausahaan secara umum. Ini antara lain berkaitan dengan:

- Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pentingnya semangat kreativitas/inovasi dan profesi kewirausahaan.
- Belum berkembangnya pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan dan sistem pendidikan yang belum mendukung perkembangan hal ini.
- Keterbatasan SDM bertalenta di daerah, dan masih rendahnya mobilitas dan interaksi dari dan antaraktor penting bagi perkembangan kewirausahaan dalam masyarakat.
- Kelemahan di lingkungan pemerintahan, yang umumnya juga belum menghargai pentingnya kewirausahaan dan inovasi baik di lingkungannya sendiri maupun perkembangannya dalam masyarakat.

5. Kelemahan fokus, rantai nilai, kompetensi dan sumber pembaruan ekonomi dan sosial.

Kelemahan dalam bisnis yang saling terkait yang sangat penting bagi dinamika ekonomi dan sebagai landasan bagi pembentukan daya saing. Ini antara lain seperti :

- Keragaman aktivitas bisnis yang belum mengarah pada pembentukan potensi keunggulan daerah yang lebih terfokus.
- Belum berkembangnya kompetensi daerah yang penting bagi pembentukan potensi keunggulan yang lebih terfokus.
- Struktur dan keterkaitan dalam bisnis beserta aktivitas non-bisnis pendukungnya yang lemah.
- Masih rendahnya kepemimpinan dan kepeloporan dalam pemajuan inovasi dan difusinya.

6. Kelemahan dalam menghadapi tantangan global.

Berbagai kelemahan yang dimiliki pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesiapan daerah untuk berperan di arena global serta untuk menghadapi beragam kecenderungan perubahan yang berkembang agar dapat meminimalisasi dampak negatifnya dan memaksimalkan kemanfaatan bagi masyarakat.

3.2. Isu Strategis

3.2.1. Isu Eksternal

Isu Internasional

Posisi Kepulauan Anambas yang menjorok ke Laut Cina Selatan menjadikan kawasan ini banyak menghadapi isu-isu eksternal khususnya berkaitan dengan isu di Kawasan Laut Cina Selatan, isu-isu perbatasan serta isu global lainnya. Isu eksternal yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Anambas secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Permasalahan Perbatasan: Walaupun Indonesia tidak terlibat dalam permasalahan Spratly di Laut Cina Selatan, tetapi konflik yang terjadi akan membawa dampak pada kondisi sosial ekonomi dan keamanan di Anambas. Permasalahan seputar perbatasan khususnya di Anambas adalah ketertinggalan dalam segala aspek dengan daerah yang berada dekat pusat pertumbuhan. Ketertinggalan ini semakin nampak manakala kondisinya dibandingkan dengan negara tetangga. Permasalahan perbatasan di Anambas perlu mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat khususnya pulau-pulau terluar.
2. Kenaikan air laut akibat pemanasan global: kondisi iklim yang tidak menentu saat ini banyak dalam jangka panjang akan mengakibatkan kenaikan muka air laut yang akibatnya akan dirasakan wilayah-wilayah pesisir dan kepulauan seperti Anambas.
3. Degradasi dan pencemaran lingkungan: dengan luas daratan yang sangat terbatas, pulau-pulau di Anambas sangat rentan akan degradasi dan pencemaran akibat aktivitas manusia yang melebihi daya dukungnya
4. Pencemaran laut: aktivitas perdagangan/pelayaran, industri pengolahan serta penambangan migas perlu diawasi dengan ketat untuk mencegah rusaknya kawasan laut di Anambas.
5. Investasi asing dibidang migas: keterbatasan teknologi dan modal investasi menjadikan Anambas yang kaya akan migas diminati oleh investor asing

- mancanegara. Pengelolaan potensi tambang oleh perusahaan multinasional perlu diawasi dengan ketat untuk mencegah timbulnya eksekusi yang tidak diinginkan.
6. Investasi asing dibidang wisata bahari: keindahan alam wilayah kepulauan dan pesisir di Anambas banyak menarik minat investor mancanegara. Selain memfasilitasi investasi wisata bahari, perlu disusun aturan-aturan main yang gunanya untuk mencegah terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan laut dan pesisir
 7. Illegal Fishing: potensi ikan yang besar di perairan Anambas saat ini belum diimbangi oleh kemampuan para nelayannya sehingga banyak terjadi pencurian ikan, khususnya pada saat gelombang besar dimana kapal-kapal ikan nelayan Anambas tidak bisa melaut.
 8. Illegal logging: pembabatan hutan yang dilakukan secara besar-besaran untuk diambil kayunya dan daerahnya dijadikan pemukiman, khususnya diperbukitan dapat membawa dampak yang serius terhadap bencana longsor dan kekurangan air bersih/tawar
 9. Illegal Mining (pasir laut): pasir yang mengandung granit dan kwarsa, baik di darat dan di laut memiliki nilai ekonomi yang baik, sehingga jika kegiatan ini tidak dikendalikan akan berakibat rusaknya lingkungan di darat dan perairan Anambas.
 10. Wisata Bahari Internasional: Wisata bahari internasional yang akan berkembang perlu direncanakan dan diberikan rambu-rambunya dengan baik sehingga tidak menimbulkan konflik dengan penduduk lokal serta menimbulkan kecemburuan sosial.
 11. Pertambangan lepas pantai: pertambangan lepas pantai saat ini masih didominasi oleh tenaga kerja asing, Banyaknya tenaga kerja asing dengan tingkat kapabilitas teknologi yang tinggi perlu difasilitasi dengan baik untuk dapat menarik mereka berwisata di Anambas atau memfasilitasi dengan aktivitas-aktivitas alih teknologi seperti seminar, lokakarya dan pelatihan

Isu Nasional

Isu-isu yang terkait dengan kebijakan dan pembangunan nasional di Anambas antara lain :

Tabel 3.1. Isu Nasional

No.	Isu-isu Terkait Pembangunan Nasional
1	Pengembangan Kawasan: Industri Pengolahan, Waterfront City, Minapolitan, Agropolitan
2	Pengembangan Transportasi: pelabuhan dan bandara, transportasi antar wilayah
3	Pengembangan Pembangkit listrik (PLTG dari penyaluran gas lepas pantai) dan distribusi BBM
4	Stabilitas harga ; menyangkut kelancaran sistem logistik nasional

3.2.2. Isu Internal

Sedangkan hal-hal yang menjadi isu internal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel,3.2. Isu-isu Internal/Lokal

No.	Bidang	Isu Strategis
1.	Penataan Ruang dan Pengemb. Wilayah	Pengembangan kawasan perbatasan
		Pengembangan Kawasan Industri Pengolahan
		Pengembangan waterfront city
		Pengembangan kawasan perkantoran
		Revitalisasi kota lama
		Pengembangan kota baru
		Pengembangan 2 pusat pertumbuhan (Tarempa dan Matak)
2.	Sarana dan Prasarana	Pengembangan Pelabuhan (Matak, Siantan)
		Pengembangan Bandara (Jemaja)
		Transportasi udara antar daerah (provinsi, nasional)
		Transportasi laut antar daerah (provinsi, nasional)
		Transportasi laut antar pulau (kabupaten)
		Transportasi darat (jalan dan angkutan umum)
		Subsidi transportasi anak sekolah
	Pengelolaan air bersih	
3.	Lingkungan	Kenaikan air laut akibat global warming
		Degradasi dan pencemaran lingkungan
		Sampah domestik
		Pencemaran laut
		Sanitasi dan kesehatan lingkungan

No.	Bidang	Isu Strategis
		Pengelolaan sampah
		Pelestarian Lingkungan Hidup
4.	Investasi	Investasi asing dibidang migas
		Investasi asing wisata bahari
5.	Penegakan hukum	Illegal fishing
		Illegal logging
		Illegal Mining (pasir laut)
6.	Pariwisata	Wisata bahari internasional
		Potensi dan obyek wisata
		Pengembangan dan pelestarian Budaya Melayu
7.	Pertambangan/migas	Pertambangan di pantai dan di laut (lepas pantai)
		Pertambangan di darat
8.	SDM/Pendidikan	Kualitas SDM
		Sarana dan prasarana pendidikan
		Kualitas Guru
		Pendidikan keagamaan (pesantren modern)
		Kualifikasi dan standarisasi pendidikan
		Subsidi pendidikan
		Beasiswa
9.	Kesehatan	Sarana dan prasarana kesehatan (RS, RS keliling)
		Dokter dan paramedis
		Subsidi kesehatan
10.	Pembangunan Masyarakat (Comdev)	Partisipasi masyarakat
		Pemberdayaan masyarakat desa
		Peningkatan peluang kerja/usaha masyarakat
		Pemberdayaan perempuan
		KB dan PKK
		Kerajinan tradisional
		Gedung wanita
		Home industri
		Pembinaan kelompok usaha
11.	Kelautan dan Perikanan	Perikanan tangkap dan budidaya

No.	Bidang	Isu Strategis
		Pengembangan rumpon
		Pengembangan pusat pengolahan ikan
		Pembinaan nelayan
		Pengembangan Minapolitan
12.	Energi dan Kelistrikan	Pengembangan PLTG dari penyaluran gas lepas pantai
		Ketersediaan BBM
13.	Pertanian	Peremajaan perkebunan yang ada
		Pengembangan pertanian organik
		Pemberdayaan Petani
		Pengembangan agropolitan
14.	Perdagangan	Stabilitas harga
		Pengembangan pasar
15.	Telekomunikasi dan Informasi	Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi (internet)
		Pemanfaatan kabel optik bawah laut
16.	Tata Kelola Pemerintahan	Sarana prasarana pemerintahan (perkantoran)
		Kualitas SDM aparatur pemerintahan
		Aturan perundangan, etika, disiplin
17.	Sistem dan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Pengetahuan	Kelembagaan Ekonomi
		Ekonomi berbasis pengetahuan
18.	Unggulan daerah	Perikanan dan Kelautan, Pariwisata, Pertambangan
19.	Daya Saing Daerah	Peningkatan Daya Saing Daerah
		Peningkatan Kapasitas Inovasi Daerah
		Penerapan kerangka inovasi
20.	Agama/Kebudayaan	Memperkuat iman dan taqwa
21.	Keamanan dan Ketertiban Umum	Keadaan tertib dan aman
		Rasa aman masyarakat

3.3. Skenario Pembangunan Jangka Panjang

3.3.1. Dasar Pemikiran

Dasar pemikiran dalam membangun skenario pembangunan jangka panjang di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah mencari alternatif skenario terbaik kondisi masa depan yang diinginkan berdasarkan isu-isu strategis baik internal (memperhatikan kekuatan dan kelemahan), maupun eksternal (peluang dan ancaman). Isu yang sangat menonjol antara lain :

1. **Daya Saing Wilayah** Kepulauan Anambas sebagai Kawasan Perbatasan. Posisi lokasi Kabupaten Kepulauan Anambas sangat menjorok ke Laut Cina Selatan dan bertetangga dengan negara lain yang terus tumbuh dan berkembang seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Cina, Hongkong. Terdapat 5 pulau terluar yang berada di Kepulauan Anambas : Pulau Tokong Berlayar, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Layar Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai. Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk wilayah yang berbatasan dengan negara-negara yang daya saingnya relatif lebih tinggi. Hal yang sangat mempengaruhi daya saing Kepulauan Anambas dimasa datang untuk berkompetisi dengan negara-negara tetangganya antara lain : kualitas SDM yang tinggi, fasilitas dan sarana prasarana yang modern, meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah, kemudahan dalam berinvestasi, serta berkembangnya inovasi daerah yang mampu mendorong tumbuhnya pengusaha-pengusaha lokal.
2. **Potensi perikanan dan sumberdaya kelautan** yang besar belum dikelola secara optimal. Tidak dapat disangkal lagi bahwa potensi perikanan dan sumberdaya kelautan Kabupaten Kepulauan Anambas sangat besar. Berikut ini adalah tabel produksi perikanan budidaya dan tangkap di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2009.

Tabel. 3.3. Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap
di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009

No	Kecamatan	Luas Karang (Ha)	Budidaya (Kg)	Tangkap (Kg)	Jumlah (Kg)
1	Jemaja	1.009.636	23.300	920.000	943.300
2	Jemaja Timur	1.833,30	11.650	492.000	503.650
3	Palmatak	1.363.944	92.300	2.262.000	2.354.300
4	Siantan	247.279	8.000	474.000	482.000

No	Kecamatan	Luas Karang (Ha)	Budidaya (Kg)	Tangkap (Kg)	Jumlah (Kg)
5	Siantan Selatan	3.411.272	20.400	908.000	928.400
6	Siantan Tengah	1.309,20	213.800	1.072.000	1.285.800
7	Siantan Timur	2.694,21	28.200	1.058.000	1.086.200
Jumlah		6.037.967,71	397.650	7.186.000	7.583.650

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan, 2009

Sumber daya perikanan kelautan sangat tergantung dari kondisi terumbu karang yang dimiliki. Hingga akhir tahun 2007 luas terumbu karang adalah 11.868,841 ha. Kecamatan Siantan Selatan memiliki cakupan terumbu karang yang terluas dibandingkan dengan kecamatan lainnya, disusul kemudian dengan kecamatan Siantan Timur.

Sektor kelautan memiliki potensi yang sangat besar, terutama didalamnya terdapat cadangan kandungan minyak dan gas bumi yang masih berpeluang untuk dieksploitasi dan ditingkatkan produksinya. Hal ini akan memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sektor Perikanan memiliki potensi yang cukup besar, terutama untuk pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya Perikanan, karena luas laut yang dimiliki sebesar 46.033,81 KM² (98,65%) dan garis pantai sepanjang 1.128,57 Km, hal ini telah memberikan peranan yang sangat penting terhadap perekonomian masyarakat. Disamping itu Keunggulan sektor ini akan dapat pulih kembali (*Renewable Resource*).

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, antara lain :

- Sumberdaya hayati (*renewable resources*), meliputi berbagai hasil perikanan laut, ekosistem mangrove, terumbu karang dan rumput laut (berpotensi untuk dilakukan pengembangan) serta beragam jenis biota laut lainnya
- Sumberdaya non hayati (*unrenewable resources*), antara lain minyak bumi, gas alam, pasir laut, dan bahan tambang mineral;

Pada dasarnya jenis ikan yang dibesarkan adalah jenis Napoleon, Kerapu, Ketepas dan Sonok. Sedangkan jenis ikan yang ditangkap nelayan adalah Tongkol, Tenggiri, Kerisi, Selar, Kerapu Manyu, Teri, Bilis, Pari, Kure, Belanak, Gembung, Gurita, dan Sotong.

Potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar saat ini belum dikelola secara optimal sehingga sering kita dengar permasalahan “illegal fishing” ataupun “illegal mining” terutama untuk pasir laut.

Illegal fishing yang terjadi pada musim gelombang tinggi diakibatkan karena keterbatasan kapasitas kapal dan teknologi nelayan-nelayan Anambas. Nelayan-nelayan Anambas belum memiliki organisasi atau kelembagaan yang kuat untuk mampu membangun armada perikanan yang besar sehingga mampu beroperasi secara optimal di wilayah laut Anambas. Disisi lain infrastruktur di darat juga belum memadai seperti fasilitas untuk pendaratan ikan dan fasilitas lelang. Potensi budidaya laut yang besarpun hingga saat ini belum dikembangkan secara optimal. Masih sedikit sekali areal perairan Anambas yang dimanfaatkan sebagai budidaya laut seperti rumput laut dan perikanan sehingga peluang investasi disektor kelautan dan perikanan masih sangat besar. Potensi sumberdaya laut dan perikanan yang besar merupakan modal dasar untuk mengembangkan jasa perdagangan dan industri pengolahan hasil laut yang mampu bersaing di Kawasan Laut Cina Selatan dan mampu menjadi sentra budidaya, perdagangan dan pengolahan ikan terbesar di kawasan ini.

Walaupun potensi perikanannya cukup besar, permasalahan kualitas SDM, ketersediaan infrastruktur serta kapasitas peralatan/kapal yang dimiliki nelayan Anambas menjadi tantangan tersendiri terutama jika berhadapan dengan nelayan-nelayan tetangga yang memiliki pengetahuan dan peralatan serta kapasitas kapal yang lebih besar dan canggih.

3. **Potensi pariwisata** belum tertata secara baik. Potensi pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas menyebar hampir di seluruh kecamatan. Walaupun wisata bahari merupakan potensi yang paling menonjol, namun jenis wisata lainnya juga cukup tersedia dan dapat saling mendukung jika dikembangkan seperti wisata budaya, tempat bersejarah dan lingkungan. Jika melihat kunjungan wisata Provinsi Kepri yang menempati urutan ke 3 untuk kunjungan wisatawan manca negara setelah Bali dan DKI, maka Kabupaten Anambas memiliki peluang untuk pengembangan potensi wisata yang cukup besar.

Tabel.3.4. Obyek dan Kawasan Wisata

Lokasi	Obyek Wisata	Kawasan Wisata
Siantan	Pasir Manang	Wisata Bahari
Siantan Selatan	Air terjun Air Bunyi Air Bini	Wisata Alam, Wisata Bahari
Siantan Tengah	Keramat Siantan	Wisata Alam (Tempat Bersejarah)

Siantan Timur	Air Terjun Temurun, Pulau Temawan	Wisata Alam, Wisata Bahari
Palatak	Pulau Kelong, Pulau Batu Alam, Pulau Batu, Pulau Durai, Pulau Pahat, Pulau Semut, Pulau Penyali	Wisata Bahari
Jemaja	Pulau Ayam, Pantai Padang Melang, Pantai Nguan Bay Panorama Bawah Laut (Terumbu Karang,) Panorama Bawah Laut Pulau Bawah, Pulau Kuku Air Terjun Nguan	Wisata Bahari Wisata Alam Tempat Bersejarah Wisata Alam
Jemaja Timur	Air Terjun Ulu Maras	Wisata Alam

Jika dilihat cakupan obyek daerah tujuan wisata (ODTW) basis pengembangan serta tema produk yang diarahkan maka Kawasan Pengembangan Pariwisata dapat dikelompokkan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.5 Cakupan Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW)

KPP	Cakupan ODTW	Basis Pengembangan Produk Wisata	Tematik Produk Wisata Yang Diarahkan
I	Pantai Tanjung Momong, Pantai Mengkait, Pantai Temawan, Pantai Temuruk (Nyamuk), Pantai Pasir Manang, Pantai Sanggah, Pantai Selat Langsang, Pantai Pian Pendek dan Pian Panjang, Panorama Bawah Laut Tanjung Momong, Air Terjun Temurun, Air Terjun Air Bini, Makam Keramat Siantan, Wisata Minat Khusus (Budidaya Perikanan di Air Sena), Pulau Bawah	Pengembangan produk pariwisata berbasis Wisata alam bahari yang didukung oleh basis Wisata Ziarah, Budaya dan Minat Khusus	<i>Marine Tourism Supported by " Culture and Special Interest Tourism"</i>
II	Pantai Padang Melang, Pulau Ayam, Pulau Keramat, Pantai Nguan Bay, Pantai Blue Sun, Air Terjun Ulu Maras, Gunung Selasih, Gunung Datuk, Pulau Kuku dan Air Raya, Wisata	Pengembangan produk pariwisata berbasis Wisata alam bahari yang didukung oleh Wisata Budaya dan Minat Khusus	<i>Marine Tourism Supported by "Culture and Interest Tourism"</i>

KPP	Cakupan ODTW	Basis Pengembangan Produk Wisata	Tematik Produk Wisata Yang Diarahkan
	Minat Khusus (Wisata Agro)		
III	Pantai Kelong, Pantai Durai, Pantai Mengkian Panjang, Pulau Semut, Pulau Pahat, Pulau Batu Alam, Pulau Matak Besar dan Pulau Matak Kecil, Pulau Semut, Pulau Penjalin	Pengembangan produk pariwisata berbasis Wisata alam bahari yang didukung oleh Wisata Budaya	<i>Marine Tourism Supported by "Culture Tourism"</i>

Dengan potensi obyek wisata yang cukup banyak dan tersebar, serta didukung oleh posisi strategis Anambas di Kawasan Laut Cina Selatan, maka investasi disektor ini memiliki peluang yang cukup besar. Mengambil contoh kesuksesan Batam dan Bintan dengan pengembangan wisata untuk kelas menengah dan atas, serta pengembangan wisata di negara tetangga maka pengembangan pariwisata di Anambas haruslah mengkombinasikan berbagai konsep yang ada guna mengoptimalkan tumbuhnya sektor ini serta mendorong sektor lain terkait untuk terus bergerak menjadi mesin pertumbuhan ekonomi bagi Kabupaten Anambas.

4. **Potensi pertambangan** migas lepas pantai yang cukup besar. Mengandalkan pertumbuhan ekonomi hanya semata-mata pada sektor minyak dan gas cukup berisiko melihat berbagai kepentingan yang bermain di dalamnya. Potensi migas yang saat ini menjadi unggulan dan tulang punggung pengembangan wilayah serta sumber pendapatan bagi daerah akan habis suatu saat nanti sehingga Kabupaten Anambas harus segera menyiapkan sektor lain (perikanan dan pariwisata) untuk menggantikan migas sebagai sumber pendapatan daerah. Modal dasar yang diperoleh dari dana bagi hasil migas saat ini harus digunakan dengan tepat sebagai batu loncatan untuk mendorong munculnya sektor/komoditas baru sehingga pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Potensi sektor pertambangan di Kabupaten Anambas tidak hanya migas, tetapi juga meliputi jenis pertambangan lain seperti granit dan pasir. Potensi masing-masing jenis pertambangan adalah:

Minyak Bumi dan Gas Alam

Potensi minyak bumi yang tersedia jumlahnya relatif besar. Berdasarkan data dari Dirjen Migas (2008), cadangan minyak bumi dan gas alam masing-masing sebesar;

untuk minyak bumi sebesar 326,15 MMSTB dan gas alam 53,06 TSCF dengan sebaran yang terdapat di Cekungan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna.

Hingga akhir Tahun 2010 terdapat 13 perusahaan yang melakukan eksploitasi dan Eksplorasi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sedangkan di Kabupaten Natuna terdapat 3 Perusahaan yang melakukan Eksploitasi/Eksplorasi. Diantara perusahaan tersebut terdapat 3 Perusahaan yang cukup lama melakukan eksploitasi di Kabupaten Kepulauan Anambas yakni StarEnergy LTD, PremierOil dan ConocoPhilips Inc, sementara Conoco Philips Inc juga melakukan eksploitasi dan eksplorasi di Kabupaten Natuna bersama perusahaan Titan Resources Indonesia LTD.

Granit

Potensi bahan galian C berupa Granit yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu mineral andalan mengingat jumlah cadangan yang relatif besar yaitu 19.662.288.605 ton (Sumber : Profil Provinsi Kepulauan Riau, 2008).

Pasir

Potensi bahan galian pasir cukup besar dan bervariasi berupa pasir laut dan pasir darat. Jumlah cadangan pasir darat sebesar 16.800.000 ton sedangkan untuk pasir laut sebesar 7.164.348.267 ton (Sumber : Profil Provinsi Kepulauan Riau, 2008).

5. **Potensi Sumberdaya manusia** perlu ditingkatkan. Kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Kepulauan Anambas relatif masih rendah dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, apalagi sebagai wilayah perbatasan yang harus berinteraksi dengan negara tetangga, maka pengembangan potensi sumberdaya manusia sangatlah penting. Dari data yang ada terlihat bahwa tingkat pendidikan dan kesehatan masih rendah. Sementara itu, ketrampilan yang juga rendah mengakibatkan tingkat pengangguran masyarakat Kepulauan Anambas yang masih cukup tinggi.

3.3.2. Pembangunan Jangka Panjang

Melihat isu strategis tersebut maka gambaran alternatif skenario Anambas dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6. Alternatif Skenario

No	Isu Strategis	Alternatif Skenario 1	Alternatif Skenario 2
1.	Daya Saing Daerah	Meningkatkan seluruh aspek daya saing seperti infrastruktur fisik yang maju (termasuk infrastruktur Teknologi	Meningkatkan seluruh aspek daya saing tetapi tetap mempertahankan ciri tradisional, budaya melayu

No	Isu Strategis	Alternatif Skenario 1	Alternatif Skenario 2
		Informasi), pelayanan akomodasi yang prima serta birokrasi yang sederhana dengan ciri masyarakat modern perkotaan.	yang menjadi ciri keseharian serta masyarakat religius berlandaskan iman dan takwa
2.	Perikanan dan Kelautan	Fokus pada pengembangan perikanan tangkap saja	Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya
3.	Pariwisata	Pengembangan pariwisata fokus pada wisata bahari, eksklusif dan mengutamakan investasi padat modal dari mancanegara	Pengembangan pariwisata yang bersifat terbuka, inklusif dengan investasi dari dalam dan luar negeri.
4.	Pertambangan	Hanya mengandalkan Migas lepas pantai sebagai batu loncatan untuk pengembangan sektor lain : pariwisata dan perikanan	Mengembangkan pertambangan granit, pasir dan potensi tambang lainnya sebagai kelanjutan penambangan migas
5.	Sumberdaya Manusia	Fokus pada pengembangan pendidikan bersifat umum dan khusus untuk meningkatkan ketrampilan mengembangkan unggulan daerahnya	Fokus tidak hanya pendidikan yang bersifat umum dan ketrampilan tetapi juga pendidikan untuk membentuk karakter bangsa serta keagamaan untuk memperkuat keimanan dan ketaqwaan.

Dengan mempertimbangkan kuatnya budaya lokal serta keunikannya maka daya saing daerah lebih diarahkan pada pengembangan daya saing tanpa meninggalkan ciri tradisional dan budaya melayu. Justru budaya melayu diharapkan dapat memperkuat daya saing daerah dengan berbagai keunggulannya seperti pantun dan tarian tradisional, pakaian tradisional, makanan tradisional, situs-situs bersejarah dan aspek keagamaan yang menjadi ciri keseharian masyarakat Anambas. Sebagai wilayah kepulauan yang dikelilingi laut serta terletak jauh menjorok ke luar, maka Anambas perlu mengembangkan Pelabuhan Laut yang terbuka bagi perdagangan internasional dengan berbagai fasilitas dan standar internasional yang harus dipenuhi, untuk memudahkan kapal-kapal asing untuk bersandar baik untuk keperluan bisnis maupun wisata. Saat ini walaupun banyak ekspatriat yang bekerja di

Anambas, namun belum dibuka kantor bea cukai, imigrasi karantina dan keamanan serta keselamatan yang memadai sebagai kawasan yang nantinya memiliki

Perikanan dan kelautan memiliki potensi yang besar baik dalam hal perikanan tangkap maupun budidaya. Melihat kondisi saat ini dimana baik perikanan tangkap maupun budidaya sudah memiliki cikal bakal untuk berkembang, maka keinginan masyarakat Anambas untuk mengembangkan pusat perikanan tangkap dan budidaya yang terintegrasi mulai dari pembibitan, budidaya, tangkap, perdagangan, industri pengolahan yang didukung infrastruktur bertaraf internasional cukup beralasan, melihat posisi Anambas yang merupakan lintasan pelayaran dan perdagangan kapal-kapal ikan.

Sektor pariwisata di Anambas sangat potensial untuk dikembangkan mengingat berbagai potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi obyek dan atraksi wisata. Banyaknya pulau-pulau yang dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata eksklusif telah banyak mengundang beberapa minat investor. Selain potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata untuk kalangan menengah atas, potensi pariwisata untuk masyarakat umum juga sangat potensial sehingga pengembangan potensi wisata di Anambas diharapkan dapat memberikan layanan bagi pengunjung wisata dari berbagai kelas dan golongan. Untuk itu memang dibutuhkan sarana dan prasarana serta akomodasi yang mendukung baik yang bertaraf bintang sampai melati.

Potensi tambang di Anambas tidak hanya migas tetapi juga granit dan pasir, termasuk pasir laut. Melihat dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha penambangan ini, maka sektor pertambangan dikembangkan sebagai batu loncatan dan modal awal untuk membangun sarana prasarana pendukung bagi berkembangnya sektor strategis lain seperti perikanan kelautan dan pariwisata, sehingga pengembangan pertambangan diharapkan hanya terfokus pada migas, sedangkan pertambangan granit dan pasir (laut) tidak akan dieksloitasi secara besar-besaran.

Dari uraian diatas, maka pilihan skenario yang paling rasional adalah sebagaimana pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 3.7. Pilihan Skenario

No	Isu Strategis	Skenario
1.	Daya Saing Daerah	Meningkatnya seluruh aspek daya saing tetapi tetap mempertahankan ciri tradisional, dimana budaya lokal (Melayu) berkembang pesat.
2.	Perikanan dan Kelautan	Berkembangnya perikanan tangkap dan budidaya, mulai dari hulu sampai hilir, menjadi pusat perdagangan dan pengolahan

No	Isu Strategis	Skenario
		ikan kelas dunia yang didukung oleh infrastruktur yang memadai.
3.	Pariwisata	Berkembangnya pariwisata yang bersifat terbuka, inklusif dengan investasi dari dalam dan luar negeri. Terbangunnya sentra-sentra jasa pariwisata didukung oleh infrastruktur yang memadai dengan akomodasi yang prima.
4.	Pertambangan	Potensi migas lepas pantai hanya dimanfaatkan sebagai batu loncatan untuk pengembangan secara berkelanjutan potensi unggulan yang lebih ramah lingkungan seperti : pariwisata bahari, kemaritiman dan perikanan.
5.	Sumberdaya manusia	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia seutuhnya, sehat jasmani rohani, berpendidikan, memiliki budipekerti luhur, berkarakter, disiplin, memiliki etos kerja dan jiwa kewirausahaan serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

Sedangkan kondisi Kabupaten Anambas yang diinginkan pada akhir periode RPJP adalah :

Tabel 3.8. Kondisi yang diinginkan pada akhir RPJP (2025)

No	Aspek	Kondisi yang diinginkan pada Akhir RPJP
1.	Kesejahteraan masyarakat	Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, ditandai dengan pertumbuhan PDRB yang tinggi dan berkelanjutan, inflasi yang terkendali, pemerataan kemampuan ekonomi antar golongan dan antar daerah, berkurangnya penduduk miskin serta menurunnya angka kriminalitas
		Kesejahteraan sosial yang meningkat ditandai dengan indikator angka melek huruf mendekati 100 persen, angka rata-rata lama sekolah mencapai 12 tahun, angka partisipasi kasar meningkat, angka pendidikan yang ditamatkan minimal SLTA atau sederajat, angka partisipasi murni tinggi, angka kelangsungan hidup bayi tinggi, angka usia harapan hidup tinggi diatas rata-rata regional, persentase penduduk yang memiliki lahan perkebunan, usaha perikanan, kapal penangkap ikan tinggi , dan rasio penduduk yang bekerja mendekati

No	Aspek	Kondisi yang diinginkan pada Akhir RPJP
		100 %.
		Budaya dan Olah Raga berkembang pesat ditandai dengan munculnya grup-grup kesenian, klub olahraga, dan tersedianya sarana kesenian dan olahraga yang memadai.
2.	Pelayanan Umum	Layanan Urusan Wajib tersedia dengan baik ditandai dengan meningkatnya layanan di bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.
		Layanan Urusan Pilihan sangat memadai, ditandai dengan meningkatnya layanan dibidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian
3.	Daya Saing	Kemampuan Ekonomi Daerah meningkat ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat, peningkatan PAD serta PDRB per kapita.
		Fasilitas, Sarana dan Prasarana wilayah termasuk didalamnya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan hidup seperti transportasi, energi, air bersih, akomodasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan tersedia secara memadai dengan tingkat layanan internasional (memenuhi standar internasional yang berlaku)
		Iklim Investasi yang kondusif ditandai oleh kemudahan investasi yang didukung oleh sistem layanan terpadu serta aturan perundangan yang jelas.

No	Aspek	Kondisi yang diinginkan pada Akhir RPJP
		Sumberdaya Manusia dimasa yang akan datang, lalu lintas manusia menjadi lebih mudah untuk keluar-masuk lintas negara sehingga SDM Anambas harus siap dalam bermitra dan berkompetisi dengan SDM dari manca negara.
		Inovasi Daerah : perkembangan Sistem inovasi yang ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha lokal

3.3.3. Skenario Pembangunan Lima Tahun

a. Pembangunan Lima Tahun Pertama (2005 – 2010)

Periode 5 tahun pertama merupakan Tahap Peralihan : (2005 – 2010) dimana aktivitas pembangunan diwarnai oleh kegiatan :

- Pemetaan kekuatan dan kelemahan
- Konsolidasi dan rekrutment pegawai
- Menyiapkan kelembagaan dan perangkat hukum
- Menginisiasi pemerintahan daerah baru

Skenario jangka panjang diuraikan kedalam pembangunan 5 tahunan pertama sebagai berikut

Tabel 3.9. Skenario Pembangunan 5 tahun pertama

No	Isu Strategis	Skenario
1.	Daya Saing Daerah	Kebijakan dan aturan perundangan serta rencana untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah telah tertata baik Rencana pengembangan infrastruktur telah disusun Aturan mengenai insentif investasi mulai dibenahi dan ditata Rencana dan langkah awal peningkatan kapasitas iptek telah dilakukan dengan melakukan kerjasama antar daerah dan instansi pusat
2.	Perikanan dan Kelautan	Tersusunnya konsep dan rencana pengembangan Perikanan tangkap dan budidaya

No	Isu Strategis	Skenario
3.	Pariwisata	Tersusunnya konsep dan rencana pengembangan Pariwisata untuk menarik wisatawan dan investor
4.	Pertambangan	Pemanfaatan bagi hasil migas seoptimal mungkin serta memanfaatkan keberadaan industri migas untuk mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi lokal
5.	Sumberdaya Manusia	Pemantapan pendidikan dasar dan perkuatan pendidikan tingkat menengah dan ketrampilan serta peningkatan sarana dan kualitas pendidikan dan ada. Memperkuat kurukunan umat beragama serta mengembangkan nilai-nilai luhur masyarakat.

b. Pembangunan Lima Tahun Kedua (2011 – 2015)

Periode 5 tahun kedua merupakan Tahap Penataan: (2011 – 2015) dimana aktivitas pembangunan diwarnai oleh kegiatan :

- Penyusunan kebijakan dan kerangka dasar
- Penyiapan aturan perundangan
- Pengembangan kelembagaan
- Penyiapan sistem perencanaan
- Meletakkan dasar-dasar pembangunan
- Pembangunan kawasan prioritas dan sektor prioritas

Skenario jangka panjang diuraikan kedalam pembangunan 5 tahunan kedua sebagai berikut

Tabel 3.10. Skenario Pembangunan 5 tahun kedua

No	Isu Strategis	Skenario
1.	Daya Saing Daerah	Kemampuan ekonomi daerah mulai meningkat, dipicu oleh belanja pemerintah dalam bentuk pembangunan fisik Infrastruktur mengalami perbaikan dan pembangunan Iklim investasi dibenahi dan ditata aturan perundangan serta kelembagaannya Kapasitas iptek meningkat, serta mulai dikembangkannya kerangka

No	Isu Strategis	Skenario
		sistem inovasi daerah
2.	Perikanan dan Kelautan	Perikanan tangkap mengalami peningkatan dengan dikembangkannya armada penangkap ikan Dimulainya pengembangan sentra perikanan
3.	Pariwisata	Pariwisata mulai dilirik oleh wisatawan, serta investor mulai menanamkan modalnya di Anambas
4.	Pertambangan	Bagi hasil migas masih memegang peranan penting dalam APBD Anambas, tetapi pendapatan dari sektor pariwisata (jasa) dan perikanan (pertanian) mulai meningkat
5.	Sumberdaya Mnesia	Peningkatan kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat, kerjasama pendidikan antar daerah dan antar negara serta perkuatan dasar-dasar pendidikan keagamaan, karakter, kepribadian, disiplin, memiliki etos kerja dan jiwa kewirausahaan

c. Pembangunan Lima Tahun Ketiga (2016 – 2020)

Periode 5 tahun ketiga merupakan Tahap Pengembangan: (2016 – 2020) dimana aktivitas pembangunan diwarnai oleh kegiatan :

- Pemantapan kebijakan, aturan perundangan, penjabaran rencana dan sistem kelembagaan
- Pembangunan kebutuhan fisik dasar masyarakat seperti : terpenuhinya pangan dan kebutuhan pokok, sistem perdagangan dan distribusi kebutuhan pokok, perumahan, prasarana dan sarana dasar, seperti transportasi, air bersih, listrik dan telepon serta pendidikan
- Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk meningkatkan investasi, membuka peluang usaha dan menekan pengangguran

Skenario jangka panjang diuraikan kedalam pembangunan 5 tahunan ketiga sebagai berikut

Tabel 3.11. Skenario Pembangunan 5 tahun ketiga

No	Isu Strategis	Skenario
1.	Daya Saing Daerah	Kemampuan ekonomi daerah mulai meningkat pesat seiring dengan meningkatnya berbagai pembangunan fisik dan masuknya investasi. Infrastruktur mengalami peningkatan layanan dan pemerataan diseluruh wilayah Iklim investasi mulai membaik dan kelembagaan investasi telah berperan besar dalam mendorong masuknya investasi ke Anambas
2.	Perikanan dan Kelautan	Pendapatan daerah dari sektor perikanan meningkat pesat seiring dengan berkembangnya kemampuan tangkap dan budidaya masyarakat. Sentra perdagangan hasil perikanan dan pengolahan terpadu mulai berkembang.
3.	Pariwisata	Pariwisata sudah memiliki sentra-sentra jasa pendukung yang memiliki akomodasi baik dengan jumlah wisatawan yang meningkat serta menyumbangkan PAD yang cukup besar
4.	Pertambangan	Bagi hasil migas masih besar peranannya dalam anggaran pemerintah daerah, tetapi pembangunan sektor swasta sudah tidak lagi mengandalkan migas, dimana share dari sektor pariwisata (jasa) dan perikanan terus meningkat.
5.	Sumberdaya Manusia	Pendidikan tinggi bidang kemaritiman dan pariwisata bahari berkembang pesat serta terjadi peningkatan kerjasama pendidikan dan penelitian antar lembaga, antar daerah dan antar negara. Adanya keseimbangan antara pendidikan umum, keagamaan, pembentukan karakter dan kepribadian, disiplin, memiliki etos kerja dan jiwa kewirausahaan.

d. Pembangunan Lima Tahun Keempat (2021 – 2025)

Periode 5 tahun keempat merupakan Tahap Pemantapan: (2021 – 2025) dimana aktivitas pembangunan diwarnai oleh kegiatan :

- Meningkatkan iklim yang kondusif bagi pelaku usaha
- Pemantapan sarana dan prasarana transportasi, air bersih, listrik, sanitasi lingkungan, perumahan

- Mendorong tumbuhnya usaha-usaha yang inovatif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan

Skenario jangka panjang diuraikan kedalam pembangunan 5 tahunan keempat sebagai berikut

Tabel 3.12. Skenario Pembangunan 5 tahun keempat

No	Isu Strategis	Skenario
1.	Daya Saing Daerah	Kemampuan ekonomi daerah mulai mapan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil. Infrastruktur mengalami sudah tertata baik dan merata dengan layanan yang prima Investasi berkembang pesat memberikan multiplier terhadap sektor lain diluar unggulan pariwisata dan perikanan.
2.	Perikanan dan Kelautan	Terbangunnya sentra perdagangan dan pengolahan ikan kelas dunia yang terpadu mulai dari hulu sampai hilir, yang didukung oleh infrastruktur yang memadai.
3.	Pariwisata	Paiwisata Anambas sudah dikenal luas di dunia internasional Jasa pariwisata berkembang pesat dan mampu menjadi sumber penghasilan masyarakat. Perkembangan pariwisata memicu perkembangan sektor lain seperti teknologi komunikasi, kerajinan dan budaya lokal serta home industry.
4.	Pertambangan	Potensi migas walaupun masih besar peranannya, tetapi sudah tidak menjadi tumpuan penghidupan masyarakat Anambas. Pengawasan dan pengendalian pencemaran sektor migas perlu diawasi secara ketat supaya tidak mengganggu sektor lain (pariwisata dan perikanan) yang sangat sensitif terhadap pencemaran baik di darat maupun di laut
5.	Sumberdaya Manusia	Sumberdaya manusia Kepulauan Anambas sudah setara dengan kabupaten tetangga serta sudah mampu mengembangkan potensi ekonomi lokal yang ada. Kerukunan antar umat beragama terjaga dan masyarakat menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keseharian. Terbentuknya masyarakat yang berbudaya, memiliki etos kerja, disiplin, jiwa kewirausahaan serta aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

BAB IV

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

4.1. Visi Pembangunan Jangka Panjang

Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi menunjukkan gambaran masa depan Kabupaten Kepulauan Anambas yang ideal dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (stakeholders) dalam operasionalisasi rencana pembangunan daerah.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Anambas dirumuskan dari hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis serta analisis skenario pembangunan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

Secara singkat permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Anambas dalam jangka panjang adalah :

1. Lemahnya Daya Saing
2. Pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan masih lemah
3. Potensi pariwisata belum berkembang
4. Sektor pertambangan belum memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi lokal

Sedangkan isu-isu strategis yang teridentifikasi adalah :

1. Dimasa yang akan datang faktor yang menentukan daya saing daerah adalah kapasitas inovasi yang dapat direkayasa melalui kerangka sistem inovasi daerah yang dikembangkan secara bertahap. Penguatan sistem inovasi daerah ini akan mendorong tumbuhnya wirausaha-wirausaha baru yang pada akhirnya mampu memperkuat daya saing daerah. Namun demikian prasyarat-prasyarat utama yang menjadi permasalahan harus diselesaikan/diperbaiki seperti :
 - Kemampuan ekonomi daerah
 - Infrastruktur wilayah
 - Iklim investasi
 - Sumberdaya manusia
 - Inisiasi Implementasi Sistem Inovasi

2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan banyak dipengaruhi oleh berbagai hal seperti :
 - Keterbatasan nelayan baik untuk perikanan tangkap
 - Belum adanya pusat pengolahan (industri) ikan terpadu
 - Perlu adanya pembinaan nelayan secara terus menerus
 - Pengembangan budidaya hasil laut (rumpon, keramba, rumput laut)
 - Pengembangan sentra-sentra perikanan (minapolitan)
3. Disektor pariwisata, isu yang muncul ke permukaan adalah menyangkut hal-hal berikut :
 - Pengembangan wisata bahari bertaraf internasional
 - Penataan potensi dan obyek wisata
 - Pengembangan dan pelestarian budaya melayu
 - Pengembangan usaha kecil dan kerajinan
4. Pertambangan terutama migas, saat ini menjadi primadona karena menyumbang APBD cukup besar. Walaupun demikian, kegiatan penambangan migas yang ada belum mampu menggerakkan perekonomian lokal. Demikian juga halnya dengan penambangan pasir dan granit, belum ada keterkaitan dengan kegiatan ekonomi lokal masyarakat. Isu-isu utama yang muncul di sektor ini adalah :
 - Bagaimana supaya sektor pertambangan dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal (sebagai batu loncatan)
 - Bagaimana sektor penambangan mampu turut serta dalam memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur wilayah dan peningkatan kualitas SDM lokal.

Berdasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis termasuk sejarah masa lalu, potensi, tantangan dan peluang (analisis skenario) dimasa depan serta dilandasi oleh cita-cita luhur pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Anambas adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Kepulauan Anambas sebagai daerah otonom maritim yang berdaya saing dalam bidang perikanan-kelautan, pariwisata dan pertambangan berlandaskan iman dan taqwa

Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kepulauan Anambas dapat disingkat sebagai Slogan Visi : ***ANAMBAS BERKANTATA TAQWA 2025***, dimana secara harfiah berarti Anambas yang melakukan perjalanan spiritual menuju kepada ketaqwaan, sementara dalam konteks pembangunan Anambas Berkantata Taqwa berarti terwujudnya Kepulauan Anambas sebagai daerah otonom maritim yang berdaya saing

dalam bidang perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan berlandaskan iman dan taqwa.

Visi diatas dapat dijabarkan kedalam Pokok-pokok Visi dan penjelasannya sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Penjelasan Pokok-pokok Visi

Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Kabupaten Anambas memiliki daya saing daerah tinggi	Pada akhir periode RPJP : <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan ekonomi daerah meningkat. • Infrastruktur khususnya transportasi dan energi telah memenuhi kebutuhan masyarakat. • Iklim investasi yang kondusif ditandai dengan serangkaian kemudahan-kemudahan perijinan secara terpadu yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan • Kualitas tenaga kerja ketrampilan meningkat. • Inovasi daerah berkembang melalui pengembangan usaha lokal
Kabupaten Anambas Unggul dibidang Perikanan dan Kelautan	Pada akhir periode RPJP : <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas meningkat • Kawasan budidaya laut berkembang pesat • Minapolitan berkembang pesat • Berkembangnya pengolahan ikan secara terpadu
Kabupaten Anambas Unggul dibidang Pariwisata Bahari	Pada akhir periode RPJP : <ul style="list-style-type: none"> • Atraksi dan obyek wisata tertata baik • Budaya melayu menjadi daya tarik wisata • Kerajinan dan usaha kecil berkembang pesat • Jasa wisata (hotel, restoran, tour and travel) berkembang pesat
Sektor pertambangan mampu mendorong daya saing dan menggerakkan ekonomi lokal	Pada akhir periode RPJP : <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur wilayah disekitar kawasan pertambangan tertata baik. • Berkembangnya kegiatan transfer pengetahuan, pelatihan tenaga kerja (BLK) dan beasiswa untuk masyarakat lokal. • Adanya kemitraan usaha dan pembinaan bagi usaha kecil
Sumberdaya manusia yang berkualitas berlandaskan iman dan taqwa	Pada akhir periode RPJP : <ul style="list-style-type: none"> • IPM (Tingkat pendidikan, kesehatan, kemampuan ekonomi) masyarakat meningkat • Kehidupan keseharian masyarakat dilandasi oleh iman dan taqwa

Menuju Anambas Berdaya Saing Global

Keterbukaan ekonomi global menyebabkan tingginya persaingan antar negara dalam memproduksi barang dan jasa untuk meraih pasar seluas-luasnya. Posisi Kabupaten Kepulauan Anambas yang terbuka dan terletak di Kawasan laut Cina Selatan menyebabkan pengaruh global tidak dapat dielakkan dan akan sangat kuat menerpa wilayah terluar Indonesia ini. Sebagai wilayah perbatasan, Anambas juga merupakan beranda muka dan merupakan etalase bagi wilayah Indonesia secara keseluruhan. Melihat tantangan yang demikian besar sebagai wilayah terdepan Indonesia, serta kondisi yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya atau negara tetangga, maka meningkatkan daya saing Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan suatu keharusan, tidak hanya menjadikan Kabupaten Kepulauan Anambas berdaya saing pada tingkat nasional tetapi juga berdaya saing pada tingkat internasional. Komponen kunci dalam mendorong peningkatan daya saing Kabupaten Kepulauan Anambas adalah :

- Kemampuan ekonomi daerah yang tinggi
- Dukungan Infrastruktur yang memadai, khususnya transportasi dan energi
- Iklim investasi yang kondusif untuk terciptanya usaha-usaha baru yang inovatif
- Kualitas tenaga kerja yang trampil dan memiliki etos kerja yang tinggi

Pengembangan Potensi Kelautan dan Perikanan

Salah satu potensi yang diharapkan unggul dan memiliki daya saing yang tinggi adalah potensi perikanan. Aspek yang diharapkan dapat mewujudkan hal ini adalah: kemampuan nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas yang meningkat pesat, baik keterampilan maupun dukungan teknologinya, terbangunnya kawasan budidaya laut yang didukung oleh infrastruktur dan layanan jasa kelas dunia serta tertatanya Minapolitan (kota-kota nelayan) yang mampu memfasilitasi berbagai kebutuhan nelayan. Berkembangnya pengolahan ikan secara terpadu yang didukung oleh teknologi yang maju.

Wisata Bahari Bertaraf Internasional

Potensi wisata bahari di Kabupaten Kepulauan Anambas sangat besar namun belum dikenal dan dikelola dengan baik serta dukungan infrastruktur dan akomodasi yang masih lemah. Hal yang perlu segera dikembangkan antara lain: atraksi dan obyek wisata terkelola dengan baik, budaya melayu dapat menjadi daya tarik wisata, kerajinan dan usaha kecil dapat berkembang pesat, serta tersedianya jasa dan akomodasi wisata (hotel, restoran, tour and travel) yang memadai.

Pengelolaan Pertambangan (Migas) Secara Berkelanjutan

Sumbangan sektor pertambangan khususnya migas terhadap APBD Kabupaten Kepulauan Anambas harus dapat dikelola dengan baik untuk menjadi modal untuk meningkatkan daya saing daerah dan batu loncatan bagi berkembangnya sektor-sektor lain yang diunggulkan seperti perikanan dan pariwisata. Walaupun tidak secara langsung, peranan sektor ini sangat besar dalam memajukan Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga harus dioptimalkan keberadaan industri pertambangan migas untuk mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi lokal masyarakat, baik yang terkait langsung dengan kegiatan produksi migas maupun melalui CSR.

Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas berlandaskan Iman dan Taqwa

Salah satu kunci utama untuk mewujudkan Kabupaten Anambas yang berdaya saing serta mampu mengembangkan potensi unggulan daerahnya secara bijaksana dan berkelanjutan adalah tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam sila pertama Pancasila. Hal mendasar yang menjadi ukuran meningkatnya kualitas sumberdaya manusia adalah nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi, dimana hal ini mencerminkan tingginya tingkat pendidikan, sehat jasmani dan rohani serta didukung oleh pendapatan ekonomi yang cukup tinggi.

4.2. Misi Pembangunan Jangka Panjang

Dalam rangka mewujudkan Visi diatas, maka disusunlah misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan prasarana dan sarana wilayah yang maju (Infratsruktur)
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas (SDM)
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel (Tata kelola pemerintahan)
4. Meningkatkan sistem dan kelembagaan ekonomi berbasis pengetahuan (Sistem Kelembagaan ekonomi)
5. Meningkatkan Pendayagunaan Unggulan Daerah berbasis kemaritiman terpadu (Unggulan daerah)

6. Menciptakan kondisi yang tertib, aman, damai dan sejahtera berlandaskan iman dan taqwa serta nilai luhur budaya melayu (aman, tertib, damai)
7. Mengoptimalkan pendayagunaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup (SDA dan lingkungan)

Penjelasan untuk masing-masing misi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2. Penjelasan Misi

No.	Misi	Penjelasan Misi
1	Mewujudkan prasarana dan sarana wilayah yang maju (Infrastruktur)	Sarana dan Prasarana yang masih terbatas perlu diprioritaskan pembangunannya. Pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten perlu bersinergi mewujudkan misi ini didukung oleh partisipasi masyarakat. Sarana dan prasarana yang penting antara lain : transportasi, air bersih, listrik, perumahan perlu segera diwujudkan
2	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas (SDM)	Kualitas Sumberdaya yang berkualitas merupakan modal dasar untuk menjadikan Kabupaten Anambas yang berdaya saing, oleh sebab itu perlu segera dilalukan percepatan untuk mengejar ketertinggalan, khususnya mengejar wajib belajar 9 dan 12 tahun
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel (Tata kelola pemerintahan)	Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan demokrasi dan standar bagi pengelolaan pemerintahan untuk bersaing di era global. Tata kelola pemerintahan yang baik akan meningkatkan efisiensi, efektivitas pembangunan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Misi ini selaras dengan program reformasi birokrasi yang dicanangkan secara nasional, tetapi tetap memperhatikan aspirasi lokal.
4	Meningkatkan sistem dan kelembagaan ekonomi berbasis pengetahuan (Sistem Kelembagaan ekonomi)	Peningkatan sistem dan kelembagaan ekonomi berbasis pengetahuan ini antara lain dilaksanakan melalui serangkaian agenda penguatan sistem inovasi daerah yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kebijakan umum inovasi dan bisnis - Penguatan kelembagaan dan daya dukung iptek - Kerjasama pemanfaatan iptek - Pengembangan budaya inovasi/kewirausahaan - Pengembangan klaster industri - Penyelarasan dengan perkembangan global
5	Meningkatkan Pendayagunaan	Misi pendayagunaan unggulan berbasis kemaritiman dilakukan terutama untuk mengoptimalkan potensi perikanan dan kelautan

No.	Misi	Penjelasan Misi
	Unggulan Daerah berbasis kemaritiman terpadu (Unggulan daerah)	serta wisata bahari. Pertambangan migas dioptimalkan sebagai batu loncatan untuk menuju pada perekonomian yang berbasis pengetahuan
6	Menciptakan kondisi yang tertib, aman, damai dan sejahtera berlandaskan iman dan taqwa serta nilai luhur budaya melayu (aman, tertib, damai)	Menciptakan kondisi aman, tertib dan damai merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, tidak hanya pemerintah, oleh sebab itu pendekatan dari sisi kemasyarakatan melalui pengembangan nilai-nilai luhur keagamaan serta nilai-nilai luhur budaya yang berkembang di masyarakat (melayu) perlu dilakukan.
7	Mengoptimalkan pendayagunaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup (SDA dan lingkungan)	Potensi Sumber Daya Alam yang berlimpah di Anambas banyak yang belum dikelola secara optimal karena keterbatasan kemampuan dan teknologi untuk mengeksploatasinya. Selain itu aktivitas ekonomi yang dilakukan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan hidup guna menjaga keberlanjutan pembangunan yang dilaksanakan serta melibatkan masyarakat lokal (dunia usaha, BUMD) dalam pengelolaan potensi SDA (pertambangan)

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

5.1. Sasaran Pembangunan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang pembangunan yang merupakan Visi pembangunan jangka panjang daerah adalah untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Anambas yang berdaya saing dalam bidang perikanan dan kelautan, pariwisata dan pertambangan berlandaskan iman dan takwa. Sebagai ukuran bagi pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang, maka sasaran-sasaran jangka panjang yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

A. Terwujudnya sarana dan prasarana wilayah yang maju dan mampu melayani masyarakat Anambas hingga 2025, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Peran swasta yang lebih besar dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana, sehingga pemerintah hanya berperan sebagai regulator penyedia prasarana serta pemberi subsidi pada wilayah-wilayah yang terpencil dan terluar.
2. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi laut yang mampu memberikan layanan bagi pelayaran antar pulau, antar wilayah (nasional) maupun internasional
3. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi udara yang mampu menyediakan layanan setiap hari dari dan ke Anambas
4. Tersediannya sarana dan prasarana angkutan darat yang menghubungkan antara pusat-pusat kawasan dengan dermaga, pelabuhan dan bandara, antar pusat-pusat kawasan dan antara pusat-pusat kawasan dengan wilayah belakangnya (keterkaitan desa-kota)
5. Tersedianya layanan listrik yang mampu melayani masyarakat dengan sistem kelembagaan yang teratur serta tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan
6. Termanfaatkannya sumberdaya air secara optimal oleh masyarakat sebagai fungsi sosial dan fungsi ekonomi.
7. Tersedianya layanan air bersih yang mampu melayani masyarakat kepulauan khususnya wilayah pesisir.
8. Tersedianya layanan pos dan telekomunikasi diseluruh area kabupaten
9. Tersedianya layanan kesehatan lingkungan yang memadai dan memenuhi syarat kesehatan

B. Tercapainya tingkatan kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing pada lingkup regional dan nasional ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Terbangunnya masyarakat yang berkarakter, berpikiran maju, mandiri, memiliki etos kerja yang tinggi serta berlandaskan iman dan taqwa.
2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
3. Meningkatnya layanan kesehatan bagi masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu.
4. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Berkembangnya apresiasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta budaya inovasi yang mampu mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru yang didukung oleh kemampuan iptek
6. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang ditandai oleh menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya produktivitas masyarakat.

C. Terciptanya tata kelola pemerintah daerah yang baik dan akuntabel, berlandaskan hukum, dengan birokrasi dan aparatur pemerintahan yang profesional, ditandai oleh hal-hal berikut :

1. Terumuskannya aturan perundangan yang mendukung terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang akuntabel mengacu pada program reformasi birokrasi nasional.
2. Terwujudnya tatakelola pemerintahan berbasis kinerja yang mampu memperbaiki pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel melalui program reformasi birokrasi.
3. Terciptanya aparatur pemerintah daerah yang profesional melalui program reformasi birokrasi.

D. Meningkatnya sistem dan kelembagaan ekonomi yang mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mampu menciptakan pengusaha-pengusaha lokal yang inovatif yang didukung oleh kemampuan iptek, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Terciptanya orientasi ekonomi yang mengarah pada perekonomian global untuk menciptakan daya saing global
2. Terwujudnya Kebijakan ekonomi yang mampu mengikuti dinamika perekonomian global
3. Terbangunnya sistem dan kelembagaan ekonomi yang mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif dan selaras dengan perkembangan kelembagaan ekonomi global
4. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan potensi keunggulan daerah
5. Meningkatnya investasi dalam dan luar negeri sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan pendapatan per kapita dan mampu menekan tingkat pengangguran.
6. Perdagangan dalam dan luar negeri yang mampu memperkuat sistem koleksi dan distribusi (logistik) yang efektif dan efisien
7. Terbangunnya kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis
8. Menguatnya kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa serta pengembangan kemampuan absorpsi industri, khususnya UKM.
9. Penumbuhkembangan kolaborasi bagi inovasi dan peningkatan difusi inovasi, praktikbaik/terbaik hasil litbangyasa

E. Meningkatnya pendayagunaan unggulan daerah berbasis kemaritiman terpadu khususnya bidang perikanan dan kelautan serta wisata bahari ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Terbangunnya klaster industri berbasis perikanan dan kelautan, pariwisata dan pertambangan yang kompetitif
2. Terbangunnya jaringan kerjasama baik antar daerah dan luar negeri untuk pendayagunaan potensi unggulan daerah khususnya di sektor kelautan dan perikanan, wisata bahari dan pertambangan, khususnya migas.
3. Terjadinya penumbuhkembangan dan perkuatan keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri

4. Terjadinya penyelarasan dalam pendayagunaan potensi unggulan daerah dengan perkembangan global

F. Terciptanya kondisi Kabupaten Kepulauan Anambas yang aman, tertib dan damai dengan keseharian masyarakat yang diwarnai oleh budaya melayu yang mampu berdampingan dengan budaya dunia lainnya, baik yang dibawa oleh pendatang maupun wisatawan secara harmonis dan saling menghargai. ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Terciptanya sistem hukum yang mampu menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian serta kepastian hukum
2. Terwujudnya kondisi yang tertib, aman dan damai
3. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, sehat jasmani dan rohani (IPM, Kemiskinan)
4. Terwujudnya pengamalan dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya melayu
5. Terwujudnya toleransi dan kerukunan kehidupan beragama, serta kerukunan kehidupan antar suku, ras atau golongan.
6. Terwujudnya interaksi antar budaya yang mampu berdampingan secara harmonis dan mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan pariwisata
7. Terbangunnya rasa kesatuan dan persatuan dalam wadah NKRI
8. Terwujudnya pengembangan wilayah yang mampu memperkecil ketimpangan antar wilayah dan antar golongan berbasiskan potensi unggulan daerah
9. Terjadinya percepatan pembangunan di kawasan strategis dan cepat tumbuh yang mampu mendorong tumbuhnya kawasan tertinggal dan perbatasan
10. Terjadinya percepatan pembangunan di pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga
11. Terciptanya pembangunan di perdesaan yang didukung oleh potensi unggulan daerahnya serta tersedianya jaringan infrastruktur yang mampu menciptakan keterkaitan ekonomi antara desa dan kota

G. Terwujudnya pengelolaan Sumberdaya Alam secara bijaksana dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Terwujudnya penataan ruang (struktur dan pola ruang) yang mengacu pada RTRW yang telah ditetapkan berdasarkan Perda
2. Terciptanya sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.
3. Terkelolanya dan termanfaatkannya sumber daya alam terbarukan, baik di darat dan di laut, secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang.
4. Terkelolanya dan termanfaatkannya sumber daya alam tak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral, dan sumber daya energi sebagai masukan, baik bahan baku maupun bahan bakar, untuk proses produksi yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.
5. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi SDA yang ada dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi lingkungan
6. Meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang

A. Misi 1 : Mewujudkan prasarana dan sarana wilayah yang maju

Sasaran pokok: Meningkatnya Peran Swasta dalam Penyediaan Jasa Layanan Transportasi

Dalam mewujudkan prasarana dan sarana wilayah yang maju, peran pemerintah dan swasta diharapkan bisa saling bersinergi dengan baik. Kalau pada tahap awal, peran pemerintah sangat dominan dalam mendorong tumbuhnya dan berkembangnya usaha dibidang penyediaan jasa sarana dan pembangunan prasarana seperti transportasi, listrik dan air, namun seiring dengan berkembangnya perekonomian Anambas, maka peran swasta sedikit demi sedikit didorong untuk mengambil alih dalam hal penyediaan jasa terkait dengan penyediaan sarana pokok masyarakat, sedangkan penyediaan prasarana dan kebijakannya masih akan dipegang oleh pemerintah.

Pada tahap awal pemekaran kabupaten (Tahap Lima Tahun Pertama), kebijakan diarahkan pada penataan dokumen perencanaan dan aturan perundangan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana.

Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan pembangunan diarahkan pada penataan dan pengembangan jasa layanan angkutan umum melalui : subsidi untuk angkutan sekolah dan rumah sakit, pengembangan BUMD dan swasta untuk melayani transportasi darat dan laut. Perluasan jaringan layanan angkutan umum hingga ke pedesaan.

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga, kebijakan diarahkan pada pengembangan dan peningkatan peran swasta dan BUMD melalui subsidi pemda, dan insentif investasi. Koordinasi dan integrasi antara penyelenggara layanan jasa transportasi (darat, laut, udara) dengan penyelenggara kegiatan pariwisata.

Pada Tahap Lima Tahun Keempat, kebijakan diarahkan pada peningkatan dan pemantapan keterpaduan antar pelayanan moda darat, laut, udara dan keterkaitan dengan aktivitas ekonomi (perdagangan, jasa, pariwisata, industri perikanan)

Sasaran pokok: Tersedianya transportasi laut yang mampu melayani angkutan laut antar pulau, antar wilayah dan antar Negara.

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi diwujudkan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut, transportasi darat dan transportasi udara. Prasarana pelabuhan merupakan prasarana yang sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas

masyarakat khususnya untuk memasarkan hasil pertanian dan perikanan. Selain itu dengan geografi kepulauan, pembangunan prasarana transportasi laut perlu didukung oleh sarana kapal yang mencukupi.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama, kebijakan diarahkan pada penataan jaringan pelayaran dan kelembagaan, optimalisasi simpul-simpul pelayaran serta pengembangan dermaga pelabuhan.

Pada Tahap Lima Tahun Kedua, kebijakan diarahkan pada penataan dan pengembangan transportasi laut : pelabuhan, jaringan pelayaran, kelembagaan. Penambahan jaringan pelayaran : antar wilayah, transportasi ke daerah terisolir, kerjasama investor untuk transportasi antar pulau. Peningkatan simpul transportasi : penataan dan pengembangan pelabuhan Siantan (Tarempa), Pal Matak dan Jemaja (Letung), pengembangan dermaga-dermaga di desa-desa pesisir, termasuk dermaga untuk kapal Ro-Ro di Pulau Matak.

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga, kebijakan diarahkan pada Pengembangan dan peningkatan dermaga-dermaga di desa-desa untuk membuka akses laut ke kawasan strategis. Penyediaan sarana angkutan laut dari dan ke daerah pemukiman dan kawasan strategis. Pengembangan pelabuhan yang dapat melayani pelayaran antar negara.

Pada Tahap Lima Tahun Keempat, kebijakan diarahkan pada Pemantapan dan peningkatan jaringan transportasi laut internasional : peningkatan kegiatan ekspor/impor, peningkatan keterpaduan moda darat dan laut.

Sasaran pokok: Tersedianya transportasi Udara yang mampu menghubungkan Anambas dengan pusat pertumbuhan ekonomi

Transportasi udara dibangun melalui pengembangan bandara umum di Jemaja serta mendorong swasta untuk menyediakan jasa penerbangannya dengan memberikan subsidi yang mencukupi untuk beroperasinya jalur penerbangan dari dan ke Anambas sampai kebutuhannya mencapai skala ekonomi.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama, kebijakan diarahkan pada Penataan jaringan penerbangan dan kelembagaan, optimalisasi bandara serta pengembangan bandara baru.

Pada Tahap Lima Tahun Kedua, kebijakan diarahkan pada penataan bandara, peningkatan frekwensi penerbangan, insentif maskapai penerbangan. Optimalisasi bandara Matak sebagai bandara umum. Pengembangan Bandara Letung.

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga, kebijakan diarahkan pada Pengembangan dan peningkatan frekwensi penerbangan : Pengembangan penerbangan perintis, kerjasama swasta untuk meningkatkan frekwensi penerbangan ke Anambas.

Pada Tahap Lima Tahun Keempat, kebijakan diarahkan pada Pemantapan dan peningkatan bandara untuk mendukung hubungan internasional : pengembangan bandara yang terbuka untuk penerbangan internasional, meningkatkan keterpaduan transportasi udara - darat

Sasaran pokok: Tersedianya transportasi darat yang mampu melayani pergerakan orang dan barang dalam satu pulau, dan mampu menghubungkan pelabuhan dengan pusat-pusat pemukiman dan pusat kegiatan ekonomi

Pembangunan Transportasi darat diwujudkan dengan membangun jalan lintas dan keliling pulau yang menghubungkan antar sentra-sentra kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu angkutan umum yang cocok untuk wilayah kepulauan dan ramah lingkungan perlu dikembangkan.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama, Penataan jaringan jalan dan kelembagaan, optimalisasi simpul-simpul angkutan umum serta pengembangan terminal dan transfer antar moda

Pada Tahap Lima Tahun Kedua, kebijakan diarahkan pada Penataan dan pengembangan jaringan dan kapasitas jalan : pembangunan jalan dalam kota, jalan lintas pulau (antara pusat pemukiman pusat kegiatan ekonomi dan pelabuhan), angkutan umum dalam pulau. Pengembangan simpul transportasi darat : terminal bus, angkutan umum, terminal transfer moda laut ke darat, moda udara ke darat.

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga, kebijakan diarahkan pada Pengembangan dan Peningkatan layanan penumpang, penyediaan sarana angkutan umum menuju Kawasan Strategis (obyek wisata, pusat jasa, dan kawasan pemukiman)

Pada Tahap Lima Tahun Keempat, kebijakan diarahkan pada Pemantapan dan Peningkatan keterpaduan layanan penumpang antar moda darat - laut dan darat - udara. Peningkatan keterpaduan layanan transportasi dengan pengembangan obyek-obyek wisata dan sentra-sentra perdagangan dan jasa.

Sasaran pokok: Terjaminnya ketersediaan sumberdaya air dan termanfaatkannya secara optimal

Pembangunan sumberdaya air diwujudkan melalui usaha-usaha konservasi lingkungan yang dapat mempertahankan ketersediaan air tanah secara berkesinambungan.

Pada tahap Lima Tahun Pertama, kebijakan diarahkan pada Penataan dan optimalisasi jaringan irigasi yang ada. Penataan reservoir/danau, sungai dan saluran alam.

Pada Tahap Lima Tahun Kedua, kebijakan diarahkan pada Pengembangan pemanfaatan sumberdaya air untuk irigasi. Perbaikan lingkungan danau, mata air, sungai dan saluran alam.

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga, kebijakan diarahkan pada Peningkatan dan perluasan jaringan irigasi. Peningkatan dan perbaikan lingkungan danau, mata air, sungai dan saluran alam.

Pada Tahap Lima Tahun Keempat, kebijakan diarahkan pada penetapan dan peningkatan jaringan irigasi persawahan. Pemantapan pelestarian lingkungan danau, mata air, sungai dan saluran alam

Sasaran pokok: Tersedianya layanan air bersih di pusat-pusat pemukiman dan aktivitas ekonomi tanpa harus mengganggu kondisi lingkungan dan sekitar dan kawasan konservasi air

Pembangunan prasarana sumber daya air diwujudkan dengan membangun sistem distribusi air bersih dan pengembangan reservoir penyimpanan yang mencukupi kebutuhan masyarakat hingga pulau-pulau kecil.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama, kebijakan diarahkan pada Penataan dan pembangunan sistem pengolahan dan jaringan distribusi air bersih. Penataan kawasan resapan air, pembangunan reservoir air baku.

Pada Tahap Lima Tahun Kedua, kebijakan diarahkan pada Pengembangan sistem pengolahan dan jaringan distribusi air bersih. Penataan dan pengembangan kawasan resapan air, pembangunan reservoir air baku.

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga, kebijakan diarahkan pada Peningkatan sistem pengolahan dan jaringan distribusi air bersih. Peningkatan kawasan resapan air, pembangunan reservoir air baku.

Pada Tahap Lima Tahun Keempat, kebijakan diarahkan pada Pemantapan sistem pengolahan dan jaringan distribusi air bersih. Pemantapan kawasan resapan air, pembangunan reservoir air baku

Sasaran pokok: Terpenuhinya kebutuhan listrik dan energi di seluruh kepulauan

Pembangunan sarana dan prasarana energi diwujudkan dengan memberikan layanan listrik hingga ke desa-desa. Pada pulau-pulau terpencil, masyarakat disuplai melalui listrik tenaga surya, tenaga piko hidro atau tenaga angin atau campuran (hybrid)

Pada Tahap Lima Tahun Pertama, kebijakan diarahkan pada Penataan dan optimalisasi pembangkit listrik menggunakan sumberdaya energi yang ada (diesel/PLTD, gas/PLTG/PLTGU, matahari), membangun sistem jaringan transmisi dan distribusi listrik, membangun sistem dan jaringan logistik BBM

Pada Tahap Lima Tahun Kedua, kebijakan diarahkan pada Peningkatan pembangkit listrik menggunakan sumberdaya energi yang ada (migas), dan sumberdaya alternatif (biodiesel, surya, angin, air), peningkatan sistem jaringan transmisi dan distribusi listrik, peningkatan sistem dan jaringan logistik BBM.

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga, kebijakan diarahkan pada Peningkatan pembangkit listrik menggunakan sumberdaya energi yang ada (migas), dan sumberdaya alternatif (biodiesel, surya, angin, air), peningkatan sistem jaringan transmisi dan distribusi listrik, peningkatan sistem dan jaringan logistik BBM.

Pada Tahap Lima Tahun Keempat, kebijakan diarahkan pada Pemantapan pembangkit listrik menggunakan sumberdaya energi yang ada (migas), dan sumberdaya alternatif (biodiesel, surya, angin, air), memantapkan sistem jaringan transmisi dan distribusi listrik, memantapkan sistem dan jaringan logistik BBM

Sasaran pokok: Terbukanya akses pos, telepon, dan internet ke seluruh kecamatan khususnya pusat-pusat pemukiman, perkantoran dan aktivitas ekonomi lainnya (kawasan sentra perikanan, pariwisata, perdagangan dan jasa)

Pembangunan pos dan telekomunikasi diwujudkan melalui pembangunan jaringan layanan pos dan telekomunikasi termasuk akses internet broadband serta dukungan content dan jaringan yang memudahkan masyarakat Anambas meningkatkan pengetahuannya serta jaringan bisnisnya.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama, kebijakan diarahkan pada Penataan sistem telekomunikasi dan informasi, pengembangan jaringan serta penyiapan SDM dibidang komunikasi dan informasi

Pada Tahap Lima Tahun Kedua, kebijakan diarahkan pada Pengembangan dan Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kominfo. Peningkatan sarana dan prasarana yang meliputi : jaringan komunikasi (tower, repeater), jaringan internet, Siaran Radio Anambas, TV Perbatasan, Jaringan LAN, WLAN untuk SKPD, Pengembangan Data Centre.

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga, kebijakan diarahkan pada Peningkatan, optimalisasi dan pengawasan sarana prasarana koinfo : pemeliharaan, pengawasan, pemanfaatan (optimalisasi). Pengumpulan, penyebaran, publikasi data dan informasi.

Pada Tahap Lima Tahun Keempat, kebijakan diarahkan pada Pemantapan dan peningkatan Implementasi layanan on-line penyelenggaraan pemerintahan daerah (eGov) dan bsnis seperti : Media Komunikasi Publik (aplikasi layanan bantuan, aplikasi pendidikan e-learning, e-edukasi, aplikasi perijinan e-KTP, IMB,dsb), Media komunikasi bisnis (aplikasi asuransi, aplikasi perijinan), Media komunikasi Intra dan Antar Lembaga (aplikasi SIM Pemda, Aplikasi Layanan Komunikasi, Aplikasi Layanan Antar Lembaga)

Sasaran pokok: Tertatanya sistem pengolahan limbah domestik dan industri khususnya di kawasan pantai

Pembangunan layanan kesehatan lingkungan diwujudkan melalui pembangunan sistem pengelolaan sampah dan limbah, baik rumah tangga dan industri.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama, kebijakan diarahkan pada Pembangunan sarana prasarana limbah dan sanitasi lingkungan skala rumah tangga

Pada Tahap Lima Tahun Kedua, kebijakan diarahkan pada Pembangunan sarana dan prasarana limbah dan sanitasi lingkungan skala kota

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga, kebijakan diarahkan pada Pengembangan sarana prasarana limbah dan sanitasi di pulau terluar dan terpencil untuk mendukung pariwisata

Pada Tahap Lima Tahun Keempat, kebijakan diarahkan pada Pengembangan sarana dan prasarana limbah dan sanitasi lingkungan untuk kawasan industri dan jasa

B. Misi 2: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas (SDM)

Sasaran pokok: Terbangun dan meningkatnya karakter, budi pekerti dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pembangunan sumberdaya manusia diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan karakter kebangsaan (nation building) dan partisipasi masyarakat di berbagai bidang pembangunan, yang berlandaskan budaya melayu dan iman & taqwa.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama, kebijakan diarahkan pada Peningkatan kualitas pendidikan ekstra kurikuler mengenai: keagamaan, moral, budi pekerti, dan kepemimpinan

Pada Tahap Lima Tahun Kedua, kebijakan diarahkan pada Pengembangan program dan kegiatan yang dapat memperkuat karakter memupuk etos kerja serta kemandirian dan kegiatan keagamaan serta kegiatan sosial lainnya

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga, kebijakan diarahkan pada Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pada Tahap Lima Tahun Keempat, kebijakan diarahkan pada Pemantapan kualitas pendidikan ekstra kurikuler melalui praktek pendidikan yang langsung terjun kemasyarakat.

Sasaran pokok: Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar, menengah umum serta dikembangkannya pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi khususnya bidang pariwisata dan maritim

Pembangunan pendidikan diwujudkan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, kuantitas dan kualitas guru yang baik dengan standar yang tinggi serta kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Anambas.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama, kebijakan diarahkan pada Peningkatan kualitas guru dan prasarana sekolah umum tingkat dasar, menengah dan menengah atas

Pada Tahap Lima Tahun Kedua, kebijakan diarahkan pada Penataan sistem pendidikan, peningkatan jumlah guru dan prasarana sekolah, baik umum, pesantren maupun kejuruan serta pengembangan Pendidikan Tinggi Kemaritiman dan Pariwisata.

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga, kebijakan diarahkan pada Peningkatan kualitas guru dan standarisasi sistem pengajaran di sekolah umum, pesantren dan kejuruan serta peningkatan kualitas pendidikan tinggi

Pada Tahap Lima Tahun Keempat, kebijakan diarahkan pada Pemantapan dan peningkatan sistem pendidikan di sekolah umum, pesantren dan kejuruan dan pemantapan sistem pendidikan tinggi yang ada.

Sasaran pokok: Berkembangnya tingkat layanan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Pustu serta Puskesmas Keliling.

Pembangunan kesehatan diwujudkan dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai mulai dari RS Daerah, RS Keliling, Puskesmas Pustu dengan jumlah tenaga medis yang memadai baik jumlah dan kualitasnya. Selain itu juga meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama, kebijakan diarahkan pada Optimalisasi pemanfaatan prasarana kesehatan Pustu, Puskesmas, dan RS lapangan serta peningkatan kualitas dan kuantitas dokter dan paramedis

Pada Tahap Lima Tahun Kedua, kebijakan diarahkan pada Penataan dan pengembangan prasarana kesehatan Pustu, Puskesmas, dan RS serta peningkatan kualitas dan kuantitas dokter dan paramedic di kota-kota Pulau Siantan, Matak dan Jemaja

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga, kebijakan diarahkan pada Peningkatan prasarana kesehatan Pustu, Puskesmas, dan RS serta peningkatan kualitas dan kuantitas dokter dan paramedic hingga kecamatan

Pada Tahap Lima Tahun Keempat, kebijakan diarahkan pada Pemantapan jasa layanan kesehatan Pustu, Puskesmas, dan akses ke RS hingga ke desa-desa

Sasaran pokok: Meningkatkan peran serta perempuan dalam pendidikan dan pembangunan, serta menurunnya tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diwujudkan melalui peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama, kebijakan diarahkan pada Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan anak melalui pendidikan

Pada Tahap Lima Tahun Kedua, kebijakan diarahkan pada Penataan upaya pemberdayaan perempuan dan anak melalui pendidikan dan program pemerintah

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga, kebijakan diarahkan pada Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan anak melalui pendidikan, program pemerintah dan swasta

Pada Tahap Lima Tahun Keempat, kebijakan diarahkan pada Pemantapan upaya pemberdayaan perempuan dan anak melalui semua jalur pembangunan

Sasaran pokok: Berkembangnya apresiasi thd IPTEK dan budaya inovasi yang mampu mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru yang didukung oleh kemampuan iptek

Budaya inovasi diwujudkan melalui pengembangan kultur dalam masyarakat (pelaku bisnis, pembuatkebijakan, aktor-aktor litbangyasa, lingkungan akademis dan masyarakat secara umum) yang mendukung bagi kemajuan inovasi dan kewirausahaan

Pada Tahap Lima Tahun Pertama, kebijakan diarahkan pada Merumuskan kebutuhan IPTEK dalam pengembangan unggulan Kabuapten Anambas serta penataan program pendidikan dini kewirausahaan, apresiasi prestasi inovasi, dan fasilitasi belajar seumur hidup

Pada Tahap Lima Tahun Kedua, kebijakan diarahkan pada mengembangkan kerjasama penelitian dan pengembangan dalam bidang perikanan dan kelautan serta pariwisata dan penataan program inkubasi teknobisnis dan insentif bagi usaha pemula inovatif

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga, kebijakan diarahkan pada Peningkatan penerapan IPTEK bagi kepentingan ekonomi lokal masyarakat serta pengembangan program pendidikan dini kewirausahaan, apresiasi prestasi inovasi, dan fasilitasi belajar seumur hidup serta pengembangan program inkubasi teknobisnis dan insentif bagi usaha pemula inovatif

Pada Tahap Lima Tahun Keempat, kebijakan diarahkan pada Peningkatan penerapan IPTEK bagi kepentingan ekonomi skala industri, pemantapan program pendidikan dini kewirausahaan, apresiasi prestasi inovasi, dan fasilitasi belajar seumur hidup dan pemantapan program inkubasi teknobisnis dan insentif bagi usaha pemula inovatif

Sasaran pokok: Meningkatnya kualitas SDM yang ditandai oleh menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya produktivitas masyarakat.

Usaha yang perlu dilakukan dalam peningkatan kualitas SDM pada akhirnya akan membawa pada penurunan tingkat pengangguran serta peningkatan produktivitas masyarakat. Arah kebijakan per lima tahunan meliputi :

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada Penataan kebijakan, aturan dan kelembagaan untuk menciptakan usaha baru dan meningkatkan produktivitas

Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada Mengembangkan skema insentif untuk menciptakan usaha baru dan meningkatkan produktivitas

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan pada Meningkatkan program untuk menciptakan usaha baru dan meningkatkan produktivitas

Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan pada Memantapkan program untuk menciptakan usaha baru dan meningkatkan produktivitas

C. Misi 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel (Tata kelola pemerintahan)

Sasaran pokok: Tertatanya aturan perundangan yang memberikan iklim kondusif bagi pembangunan ekonomi daerah

Tatakelola pemerintahan diwujudkan melalui penataan aturan perundangan yang mendukung terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang akuntabel mengacu pada program reformasi birokrasi nasional.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada Perumusan aturan perundangan Reformasi Birokrasi. Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada Melengkapi aturan-aturan pelaksana implementasi reformasi birokrasi. Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan pada Memonitoring implementasi implementasi reformasi birokrasi. Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan pada Mengevaluasi dan memantapkan penerapan aturan penundangan

Sasaran pokok: Diterapkannya tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Tatakelola pemerintahan yang baik dan akuntabel diwujudkan melalui penyusunan program berbasis kinerja yang mampu memperbaiki pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel melalui program reformasi birokrasi.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada penataan kelembagaan. Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada pelaksanaan program reformasi birokrasi. Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan pada pengembangan tatakelola pemerintahan berbasis kinerja dan pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan pada Pemantapan system tatakelola.

Sasaran pokok: Terciptanya aparatur pemerintahan yang memiliki kompetensi dibidangnya, memiliki kinerja tinggi, etos kerja, berkarakter serta bertakwa thd Tuhan YME

Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada Penempatan dan pengaturan aparatur daerah serta pendidikan kedinasan. Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada Peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan umum dan kedinasan serta program kerjasama. Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada Peningkatan kinerja aparatur melalui pendidikan umum dan kedinasan, penegakan disiplin dan program kerjasama. Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada Pemantapan kinerja aparatur melalui pendidikan umum dan kedinasan, penegakan disiplin dan program kerjasama

D. Misi 4: Meningkatkan sistem dan kelembagaan ekonomi berbasis pengetahuan (Sistem Kelembagaan ekonomi)

Sasaran pokok: Terciptanya transformasi ekonomi secara bertahap dari yang berorientasi keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif

Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian daerah serta berorientasi dan berdaya saing global. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Sistem ekonomi didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan yang kokoh dalam kerangka penguatan sistem inovasi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui : inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian dan ketahanan bangsa secara berkelanjutan; mengelola kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan pemerintahan yang baik secara berkelanjutan, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada menyiapkan pilar-pilar transformasi ekonomi dari yang berbasis pada keunggulan komparatif menjadi kompetitif.

Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan yang kokoh dalam kerangka penguatan sistem inovasi daerah.

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan pada penguatan inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan

Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan pada Pemantapan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan;

Sasaran pokok: Terciptanya kebijakan ekonomi yang mampu menciptakan iklim kondusif untuk tumbuh kembangnya kewirausahaan

Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu memerhatikan secara cermat dinamika globalisasi, komitmen daerah dan nasional di berbagai fora perjanjian ekonomi internasional, dan kepentingan nasional dengan mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah serta menjaga kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan masih mengacu pada kebijakan ekonomi kabupaten induk (Kabupaten Natuna).

Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada penataan kebijakan ekonomi daerah perlu memerhatikan globalisasi, komitmen daerah, nasional dan internasional,

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan pada pengembangan kebijakan perekonomian perlu mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah serta menjaga kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa..

Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan pada pematapan kebijakan perekonomian perlu memerhatikan berbagai aspek yang berkembang di masyarakat, khususnya peningkatan daya saing berbasis pengetahuan

Sasaran pokok: Terciptanya kelembagaan ekonomi yang mampu mendukung terciptanya usaha-usaha baru yang inovatif

Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, dan non-diskriminatif; menjaga, mengembangkan, dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada optimalisasi kelembagaan ekonomi yang ada

Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada penataan kelembagaan ekonomi sesuai menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, penyusunan kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, dan non-diskriminatif;

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan pada menjaga dan mengembangkan, dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat, serta melindungi konsumen

Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan pada pematapan dan peningkatan kelembagaan ekonomi

Sasaran pokok: Terciptanya struktur ekonomi yang kokoh berbasis perikanan dan kelautan, pariwisata dan pertambangan

Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor perikanan, pariwisata, dan pertambangan sebagai motor penggerak agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada Struktur perekonomian didukung oleh sektor perikanan, pariwisata, dan pertambangan.

Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada Struktur perekonomian didukung oleh sektor perikanan, pariwisata, dan pertambangan dan diperkuat oleh sektor industri pengolahan dan jasa pendukung pariwisata

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan pada Struktur perekonomian didukung oleh sektor perikanan, pariwisata, dan pertambangan dan diperkuat oleh sektor industri pengolahan dan jasa pendukung pariwisata

Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan pada Struktur perekonomian didukung oleh sektor industri pengolahan dan jasa diperkuat dengan sektor perikanan, pariwisata, agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

Sasaran pokok: Terciptanya aktivitas perdagangan antar pulau dan antar negara yang didukung oleh sarana dan prasarana perdagangan, sistem informasi, logistik dan sistem transportasi yang memadai.

Perdagangan dalam dan luar negeri diwujudkan dengan memperkokoh sistem koleksi dan distribusi barang dan jasa yang efisien dan efektif, dimana hal ini dapat terwujud dengan membangun keterpaduan dan keterkaitan sarana dan prasarana perdagangan, sistem informasi, sistem logistik dan sistem transportasi baik di dalam maupun luar negeri.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada optimalisasi perdagangan dalam dan luar negeri termasuk border trade. Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada penataan sistem perdagangan dalam dan luar negeri untuk memperkokoh sistem koleksi dan distribusi yang efisien dan efektif. Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan pada penerapan dan pengembangan sistem perdagangan dalam dan luar negeri untuk memperkokoh sistem koleksi dan distribusi yang efisien dan efektif. Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan pada pemantapan penerapan sistem perdagangan dalam dan luar negeri untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien dan efektif.

Sasaran pokok: Terciptanya investasi baru yang mampu memperkuat struktur dan sistem perekonomian Anambas

Investasi didorong untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik. Investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada pemberian insentif investasi pariwisata dan perikanan berdasarkan kebijakan kabupaten induk. Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada penyusunan kebijakan insentif investasi untuk eksploitasi sumberdaya kelautan, perikanan dan wisata bahari. Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan padapeningkatan investasi industri pengolahan perikanan dan sumberdaya laut lainnya serta jasa pariwisata. Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan padaPemantapan investasi industri pengolahan perikanan dan sumberdaya laut lainnya serta jasa pariwisata.

Sasaran pokok: Terciptanya kerangka umum inovasi yang mampu mendukung berkembangnya usaha-usaha kreatif dan inovatif

Pengembangan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis diwujudkan melalui :

- Pembenahan isu umum mendasar yang terkait dengan sistem inovasi, seperti:Regulasi yang menghambat, Kelemahan lingkungan legal dan regulasi (yang diperlukan), Kelemahan infra- dan supra-struktur pendukung perkembangan inovasi, Administrasi perijinan yang birokratif.
- Pengurangan keterbatasan pembiayaan/pendanaan inovasi.
- Pembenahan isu perpajakan yang tidak kompetitif bagi aktivitas inovasi;
- Peningkatan keperdulian dan implementasi perlindungan HKI.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan padapengembangan dasar hukum bagi penguatan sistem inovasi daerah, serta pengembangan perijinan bisnis yang sederhana.

Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan padamenciptakan persaingan bisnis yang sehat dan adil sertamenyediakan basis data.

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan padameniadakan regulasi yang menghambat inovasi dan bisnis, menyediakan pembiayaan berisiko, menyediakan insentif fiskal terkait inovasi.

Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan padamemperkuat kebijakan inovasi dan bisnis yang kuat.

Sasaran pokok: Terciptanya kelembagaan IPTEK yang mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian lokal dan usaha-usaha pelestarian lingkungan

Penguatan kelembagaan dan daya dukung iptek/ litbangyasa serta pengembangan kemampuan absorpsi industri, khususnya UKM diwujudkan melalui penguatan lembaga yang ada agar berfungsi sebagaimana yang diperlukan, dan daya dukung iptek/litbangyasa yang relevan bagi pengembangan potensi terbaik daerah perlu terus ditingkatkan. Di sisi lain, pelaku mayoritas usaha, yaitu UKM, perlu terus ditingkatkan kemampuannya dalam mengakses, memanfaatkan dan mengembangkan pengetahuan/teknologi untuk meningkatkan daya saing bisnisnya.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada kerjasama iptek dengan pihak luar. Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada penataan dan pengembangan lembaga iptek dengan jaringan skala regional.

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan pada pengembangan lembaga iptek dengan jaringan skala nasional.

Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan pada pengembangan lembaga iptek dengan jaringan skala internasional

Sasaran pokok: Terciptanya kolaborasi inovasi yang mampu menggali potensi-potensi inovasi lokal untuk berkembang

Penumbuhkembangan kolaborasi bagi inovasi dan peningkatan difusi inovasi, praktikbaik/terbaik dan/atau hasil litbangyasadiwujudkan melalui relevansi dan fungsi komplementatif antarperkembangan *knowledge pool* dengan tarikan kebutuhannya oleh pengguna, khususnya swasta, perlu ditingkatkan. Pola hubungan dan transaksi bisnis maupun non bisnis antarberbagai aktor perlu ditumbuhkembangkan. Dukungan interaksi dan kerjasama antarpihak dalam sistem inovasi (termasuk pembiayaan bagi komersialisasi potensi inovasi) perlu ditingkatkan.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada menginisiasi kegiatan litbangyasa kolaboratif. Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada

mengembangkan kegiatan litbangyasa kolaboratif. Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan pada meningkatkan kegiatan litbangyasa kolaboratif. Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan pada memantapkan kegiatan litbangyasa kolaboratif

E. Misi 5: Meningkatkan Pendayagunaan Unggulan Daerah berbasis kemaritiman terpadu (Unggulan daerah)

Sasaran pokok: Terciptanya penguatan rantai nilai serta perluasan dan pendalaman struktur industri dan jasa

Penguatan rantai nilai industri dan jasa diarahkan untuk menciptakan klaster industri berbasis perikanan dan kelautan, pariwisata dan pertambangan yang diharapkan mampu berkompetisi secara global.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada pengembangan rantai nilai perikanan dan pariwisata. Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada pendalaman struktur industri pengolahan ikan dan hasil laut, jasa pariwisata dan pertambangan migas. Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan pada perluasan struktur industri pengolahan ikan dan hasil laut, jasa pariwisata dan pertambangan migas. Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan pada pemantapan struktur industri pengolahan ikan dan hasil laut, jasa pariwisata dan pertambangan migas.

Sasaran pokok: Terciptanya kerjasama dan keterkaitan (linkage) antar industri dan jasa

Jaringan kerjasama baik antar daerah dan luar negeri diwujudkan untuk mampu mendayagunakan potensi unggulan daerah khususnya di sektor kelautan dan perikanan, wisata bahari dan pertambangan, khususnya migas.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada penguatan keterkaitan usaha nelayan dan wisata local. Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada perluasan keterkaitan antar industri lokal, nasional dan internasional. Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan pada penguatan keterkaitan antar industri lokal, nasional dan internasional

Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan pada Pemantapan keterkaitan antar industri lokal, nasional dan internasional.

Sasaran pokok: Terciptanya kapasitas industri dan jasa dengan memanfaatkan sumberdaya, sarana dan prasarana secara kolektif

Salah satu usaha untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kapasitas industri dan jasa secara efektif dan efisien adalah dengan memanfaatkan sumberdaya, sarana dan prasarana secara kolektif.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan infrastruktur kolektif yang ada.

Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada pengembangan infrastruktur kolektif untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi.

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan pada peningkatan infrastruktur kolektif untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi.

Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan pada pemantapan infrastruktur kolektif untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi

Sasaran pokok: Bertumbuh kembangnya inovasi dalam klaster-klaster industri yang terbentuk

Penumbuhkembangan dan perkuatan keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri diwujudkan melalui keterkaitan dalam bisnis yang sangat penting bagi dinamika ekonomi dan sebagai landasan bagi pembentukan daya saing yang khas, perlu ditingkatkan. Ini antara lain berkaitan dengan :

- Pengurangan keragaman aktivitas bisnis dan pengembangan kompetensi daerah yang penting bagi pembentukan potensi keunggulan yang lebih terfokus.
- Penguatan struktur dan keterkaitan dalam bisnis beserta aktivitas non-bisnis pendukungnya.
- Peningkatan kepemimpinan dan kepeloporan dalam pemajuan inovasi dan difusinya.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada inisiasi kerjasama dan sinkronisasi kebijakan inovasi untuk mendukung klaster industri. Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada pengembangan kerjasama dan sinkronisasi kebijakan inovasi untuk mendukung klaster industri. Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan pada peningkatan kerjasama dan sinkronisasi kebijakan inovasi untuk mendukung klaster industri. Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan pada pemantapan kerjasama dan sinkronisasi kebijakan inovasi untuk mendukung klaster industri.

Sasaran pokok: Terciptanya produk dan layanan (pariwisata) yang mengikuti standar internasional dan perkembangan global

Terjadinya penyelarasan dalam pendayagunaan potensi unggulan daerah dengan perkembangan global diwujudkan dengan meningkatkan kesiapan daerah untuk berperandi arena global serta untuk menghadapi beragam kecenderungan perubahan yang berkembang perlu terus ditingkatkan untuk dapat meminimalisasi dampak negatifnya dan memaksimalkan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada pengembangan produk industri memenuhi standar nasional dan internasional

Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada peningkatan pemantauan dan analisis pasar internasional dan mengembangkan kebijakan antisipatif

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan pada mendorong dan inisiasi partisipasi aktif dalam forum internasional terkait industri dan perdagangan

Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan pada meningkatkan partisipasi aktif dalam forum internasional terkait industri dan perdagangan

F. Misi 6: Menciptakan kondisi yang tertib, aman, damai dan sejahtera berlandaskan budaya melayu.

Sasaran pokok: Terciptanya sistem dan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak

Sistem hukum diwujudkan dengan menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian serta kepastian hukum.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada perencanaan dan penataan sistem hukum yang mampu menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian serta kepastian hukum. Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada pengembangan sistem hukum yang mampu menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian serta kepastian hukum. Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan pada peningkatan sistem hukum yang mampu menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian serta kepastian hukum. Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan pada pemantapan sistem hukum yang mampu menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian serta kepastian hukum.

Sasaran pokok: Terciptanya keamanan, ketertiban dan kedamaian di seluruh wilayah Kabupaten

Kondisi tertib, aman dan damai diwujudkan melalui masyarakat yang sejahtera, sehat jasmani dan rohani, mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya melayu, toleransi dan kerukunan kehidupan beragama, serta kerukunan kehidupan antar suku, ras atau golongan.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada menciptakan kerukunan antar suku, agama dan golongan serta pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan

Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada memperkuat kerukunan antar suku, agama dan golongan serta penataan sistem keamanan dan ketertiban lingkungan, serta sosialisasi peraturan perundangan

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan pada meningkatkan kerukunan antar suku, agama dan golongan, serta peningkatan sistem keamanan dan ketertiban lingkungan, sosialisasi peraturan perundangan serta penegakan hukum.

Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan pada memantapkan kerukunan antar suku, agama dan golongan serta sistem keamanan dan ketertiban lingkungan, sosialisasi serta penegakan hukum.

Sasaran pokok: Terciptanya masyarakat yang sehat jasmani dan rohaninya

Masyarakat yang sehat jasmani dan rohani tercipta melalui berbagai upaya mensejahterakan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, budaya, keagamaan, serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada menciptakan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada memperkuat masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan padameningkatkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan pada memantapkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani.

Sasaran pokok: Lestarinya warisan budaya (melayu) yang menjadi ciri khas Kabupaten Kepulauan Anambas

Warisan budaya nusantara telah banyak diakui oleh dunia, tidak terkecuali budaya melayu. Namun demikian, seiring dengan modernisasi banyak warisan budaya yang sangat bermanfaat hilang bahkan tidak dikenal lagi oleh masyarakatnya. Jika tidak digali, diinventarisasi serta dilestarikan, maka budaya luhur warisan masa lalu bisa jadi dimanfaatkan oleh bangsa atau masyarakat lain. Apalagi dengan mengembangkan potensi wisata bahari sebagai potensi unggulan daerah, maka pelestarian budaya yang berakar pada masyarakat lokal menjadi penting.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada peningkatan pendidikan budaya melayu di sekolah umum dan pesantren. Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada penataan kelembagaan dan aktivitas pengembangan dan pelestarian budaya melayu. Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan pada peningkatan aktivitas pengembangan dan pelestarian budaya melayu. Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan pada pemantapan aktivitas pengembangan dan pelestarian budaya melayu.

Sasaran pokok: Terlaksananya aktivitas keagamaan secara damai dan menciptakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama

Kerukunan antar umat dan toleransi aktivitas keagamaan sudah berkembang sejak jaman dahulu. Modal sosial ini perlu dipupuk dan didorong sehingga dapat menjadi modal dasar pembangunan.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada meningkatkan pendidikan keagamaan di sekolah umum dan pesantren. Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada penataan kelembagaan dan aktivitas keagamaan. Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan pada peningkatan aktivitas keagamaan disegala bidang. Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan pada pemantapan aktivitas keagamaan disegala bidang.

Sasaran pokok: Terciptanya interaksi antar budaya dalam mendukung pengembangan pariwisata

Interaksi antar budaya diwujudkan melalui harmonisasi hubungan antar masyarakat dan dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan pariwisata

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada menciptakan interaksi antar budaya dalam mendukung pariwisata

Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada mengembangkan interaksi antar budaya dalam mendukung pariwisata

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan pada meningkatkan interaksi antar budaya dalam mendukung pariwisata

Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan pada memantapkan interaksi antar budaya dalam mendukung pariwisata

Sasaran pokok: Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa

Rasa kesatuan dan persatuan dalam wadah NKRI perlu diwujudkan melalui kegiatan pendidikan, kemasyarakatan dan kedinasan.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada memupuk rasa kebangsaan, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada mengembangkan rasa kebangsaan, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan pada meningkatkan rasa kebangsaan, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan pada memantapkan rasa kebangsaan, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa.

Sasaran pokok: Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan berbasis pariwisata dan perikanan serta keterkaitan ekonomi antara desa (kawasan tertinggal) dan kota (pusat pertumbuhan ekonomi)

Pengembangan wilayah diwujudkan dengan memperkecil ketimpangan antar wilayah dan antar golongan berdasarkan potensi unggulan daerah, serta memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada penataan pembangunan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh

Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada pengembangan pembangunan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan pada peningkatan pembangunan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal

Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan pada pemantapan pembangunan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal

Sasaran pokok: Terciptanya kawasan perbatasan dan pulau terluar sebagai beranda depan yang memiliki sarana prasarana yang maju dengan informasi yang mudah diakses serta ciri ke-indonesiaan

Percepatan pembangunan di kawasan strategis dan cepat tumbuh diwujudkan dengan membangun pusat pertumbuhan di kawasan tertinggal dan perbatasan serta percepatan pembangunan di pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga melalui kegiatan pembangunan yang berorientasi keluar (outward looking).

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan padapenatan rencana dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perbatasan

Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada memperkuat sarana dan prasarana kawasan perbatasan dan menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda muka serta pengelolaan pulau-pulau terluar dengan mengacu pada kebijakan, rencana dan program nasional dan provinsi.

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan padamempererat kerjasama dengan negara tetangga khususnya perdagangan perbatasan, pencegahan ilegal fishing, mining, logging serta perdagangan manusia.

Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan padamemantapkan kerjasama dengan negara tetangga diberbagai bidang

Sasaran pokok: Terciptannya kawasan perdesaan yang maju memiliki akses transportasi, komunikasi serta sarana dan prasarana yang maju

Pembangunan di perdesaan diwujudkan dengan didukung oleh potensi unggulan daerahnya serta tersedianya jaringan infrastruktur yang mampu menciptakan keterkaitan ekonomi antara desa dan kota, serta peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; pengembangan social capital dan human capital

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada pengembangan infratsruktur pedesaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada pengembangan kapasitas SDM di pedesaan dalam pengolahan sumberdaya perikanan dan kelautan serta wisata bahari.

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan pada peningkatan kegiatan produksi di kawasan pedesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan.

Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan pada peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; pengembangan social capital dan human capital

G. Misi 7: Mengoptimalkan pendayagunaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup (SDA dan lingkungan)

Sasaran pokok: Terciptanya Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW yang telah ditetapkan serta pengendalian terhadap penyimpangan RTRW

Penataan ruang (struktur dan pola ruang) diwujudkan dengan menganut prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dimana pada prakteknya akan terwujud kesetimbangan antara pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya dan kawasan lindung.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada penyusunan dan sosialisasi RTRW

Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan pada penerapan RTRW dalam mewujudkan struktur dan pola ruang

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan padapengendalian pengembangan struktur dan pola ruang

Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan padapemantapan dan peningkatan kualitas penerapan RTRW

Sasaran pokok: Tertatanya dan menyelenggarakan sistem pertanahan yang efisien dan efektif

Pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta penegakan hukum terhadap hak atas tanah diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada pendataan tanah dalam rangka untuk mengembangkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif.

Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan padamengembangkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan padapenerapan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif

Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan padamelaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.

Sasaran pokok: Teridentifikasinya cadangan SDA terbarukan sehingga dapat dikelola secara berkelanjutan

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam terbarukan, baik di darat dan di laut, diwujudkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada Identifikasi dan pendataan cadangan sumberdaya terbarukan

Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan padapemanfaatan sumberdaya terbarukan terutama pengembangan sektor pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan padapeningkatan pemanfaatan sumberdaya terbarukan

Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan padapemantapan dan pengembangan pemanfaatan sumberdaya terbarukan

Sasaran pokok: Teridentifikasinya cadangan SDA tidak terbarukan sehingga dapat dimanfaatkan secara bijaksana

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral, dan sumber daya energi sebagai masukan industri pengolahan, baik sebagai bahan baku maupun bahan bakar, diwujudkan melalui proses produksi yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal di dalam negeri, tidak langsung diekspor dalam bentuk bahan mentah.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan pada Identifikasi dan pendataan cadangan sumberdaya tidak terbarukan.

Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan padapemanfaatan sumberdaya tidak terbarukan.

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan padapengendalian pemanfaatan sumberdaya tidak terbarukan,

Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan padapelestarian sumberdaya tidak terbarukan,

Sasaran pokok: Diterapkannya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui pemanfaatan potensi SDA yang ada dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi lingkungan.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan padamengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan.

Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan padamengembangkan dan mengamalkan pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan.

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan padameningkatkan pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan

Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan padamemantapkan pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan

Sasaran pokok: Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan

Peningkatan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi Lingkungan Hidup diwujudkan melalui berbagai kegiatan pendidikan, pembinaan, sosialisasi serta peningkatan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam memandang, menyikapi dan mengelola sumberdaya alam yang dimiliki.

Pada Tahap Lima Tahun Pertama kebijakan diarahkan padamemupuk dan membina serta mensosialisasikan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Pada Tahap Lima Tahun Kedua kebijakan diarahkan padamengembangkan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam

Pada Tahap Lima Tahun Ketiga kebijakan diarahkan padameningkatkan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam

Pada Tahap Lima Tahun Keempat kebijakan diarahkan padamemantapkan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam.

5.3. Tahapan Pembangunan

Tahapan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepulauan Anambas disusun dari mulai tahun 2005 hingga tahun 2025. Adapun pembagian tahapan pembangunan jangka panjang dibagi atas :

5.3.1. Tahap Pembangunan Lima Tahun Pertama (2005 – 2010)

Pada awal pembentukannya, Kabupaten Kepulauan Anambas harus memulai pemerintahannya dengan langkah-langkah persiapan yang merupakan peralihan dari pemerintahan sebelumnya, (tergabung dalam Kabupaten Natuna) untuk menjadi kabupaten tersendiri. Untuk menyusun kebijakan dan rencana pembangunan yang akurat dan aspiratif, maka perlu dipetakan kekuatan dan kelemahan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mencari skenario terbaik bagi pembangunan jangka panjangnya.

Pada tahap ini juga dilaksanakan konsolidasi dan rekrutment pegawai untuk mengisi pos-pos yang harus segera diisi sesuai dengan kebutuhan minimal untuk melayani masyarakat.

Menyiapkan kelembagaan dan perangkat hukum merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan daerah secara tertib aman dan damai serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Hal yang harus segera dilakukan pada tahap pemekaran kabupaten adalah menginisiasi pemerintahan daerah baru yang sangat membutuhkan waktu dan tenaga untuk memulai dan menggulirkan pemerintahan baru secara bertahap untuk mencapai sistem pemerintahan daerah yang mantap. (Tahapan dan Target Pembangunan dapat dilihat pada Tabel Lampiran 2 dan 3)

5.3.2. Tahap Pembangunan Lima Tahun Kedua (2011 – 2015)

Pada tahap penataan dilakukan penyusunan kebijakan dan kerangka dasar pembangunan jangka panjang, penyiapan aturan perundangan, pengembangan kelembagaan, penyiapan sistem perencanaan, meletakkan dasar-dasar pembangunan serta pembangunan kawasan prioritas dan sektor prioritas.

Banyaknya permasalahan serta belum tertatanya pemerintahan secara teratur menyebabkan sebagian besar sumberdaya di pemerintahan yang baru digunakan untuk memulai menata pemerintahan dengan menyusun kebijakan dan kerangka dasar pembangunan serta pembangunan fisik yang sangat mendesak untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahap inilah pembangunan fisik berupa infrastuktur

dan pembangunan kawasan perkantoran serta pengembangan kota-kota baru dimulai. Walaupun tidak harus selesai pada tahap ini, dapat dikatakan infrastruktur serta fasilitas perkantoran yang paling dibutuhkan dibangun pada tahap ini. (Tahapan dan Target Pembangunan dapat dilihat pada Tabel Lampiran 2 dan 3)

5.3.3. Tahap Pembangunan Lima Tahun Ketiga (2016 – 2020)

Pada tahap pengembangan, dilakukan pemantapan kebijakan dan aturan perundangan serta dilakukan penjabaran rencana dan sistem kelembagaan supaya mudah untuk dilaksanakan. Pada tahap ini, pembangunan fisik mencapai puncaknya dengan membangun kebutuhan fisik dasar masyarakat seperti :penyediaan pangan dan kebutuhan pokok, sistem perdagangan dan distribusi kebutuhan pokok, perumahan, prasarana dan sarana dasar, seperti transportasi, air bersih, listrik dan telepon serta pendidikan. Disisi lain mulai didorong adanya investasi swasta dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, membuka peluang usaha dan menekan angka pengangguran. (Tahapan dan Target Pembangunan dapat dilihat pada Tabel Lampiran 2 dan 3)

5.3.4. Tahap Pembangunan Lima Tahun Keempat (2021 – 2025)

Pada tahap pemantapan, kegiatan diarahkan untuk meningkatkan iklim yang kondusif bagi pelaku usaha, karena pada tahap ini mulai didorong investasi dari pihak swasta untuk berperan besar dalam kegiatan pembangunan. Pembangunan fisik diarahkan untuk pemantapan sarana dan prasarana transportasi, air bersih, listrik, sanitasi lingkungan, dan perumahan. Selain penyediaan infrastruktur, disusun kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong tumbuhnya usaha-usaha yang inovatif yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. (Tahapan dan Target Pembangunan dapat dilihat pada Tabel Lampiran 2 dan 3)

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

6.1. Pedoman Transisi

Dalam Rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan perencanaan pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RPJPD periode berikutnya. Namun demikian Bupati terpilih pada periode berikutnya dapat mengajukan usulan penyempurnaan terhadap dokumen RPJPD yang telah disusun oleh Bupati sebelumnya.

6.2. Prinsip Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Anambas Tahun 2005 – 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025 yang memuat Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2005 – 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005 – 2025 selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Anambas untuk tahun 2011-2015, tahun 2016 - 2020, dan tahun 2021-2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Agar terjadi kesinambungan dalam penyusunan kebijakan daerah, maka calon Bupati harus memperhatikan RPJP Daerah Kabupaten Anambas Tahun 2005 – 2025 dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun Visi dan Misi daerah yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tahun 2011-2015, tahun 2016-2020, dan tahun 2021-2025.
2. Lembaga eksekutif dan lembaga legislative Kabupaten Anambas dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan masyarakat

termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk menjalankan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005 – 2025.

3. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005–2025 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah.

6.3. Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi

6.3.1. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RPJP

Mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2005- 2025 meliputi:

1. Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJP Kabupaten Kepulauan Anambas 2005-2025 mencakup pelaksanaan Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan untuk mencapai Misi dan mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervise pelaksanaan RPJP Kabupaten Kepulauan Anambas 2005-2025.
3. Pemantauan dan supervisi RPJP Kabupaten Kepulauan Anambas 2005-2025 harus dapat menjamin Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kepulauan Anambas telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Hasil pemantauan dan supervisi RPJP Kabupaten Kepulauan Anambas 2005-2025 digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kepulauan Anambas, telah dilaksanakan melalui RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Kabupaten Kepulauan Anambas 2005-2025. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi RPJP Kabupaten Kepulauan Anambas 2005-2025 ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
6. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Kabupaten Kepulauan Anambas 2005-2025 kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas.

6.3.2. Evaluasi Terhadap Hasil RPJP.

Mekanisme evaluasi terhadap hasil RPJP Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi:

1. Evaluasi terhadap hasil RPJP Kabupaten Kepulauan Anambas 2005-2025 mencakup Sasaran Pokok, Arah Kebijakan dan pentahapan untuk mencapai Misi dan mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD).
2. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJP Kabupaten Kepulauan Anambas 2005-2025.
3. Penilaian digunakan untuk mengetahui;
 - a. Realisasi antara Sasaran Pokok RPJP Kabupaten Kepulauan Anambas 2005-2025 dengan capaian sasaran RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas.
 - b. Realisasi antara capaian Sasaran Pokok RPJP Kabupaten Kepulauan Anambas 2005-2025 dengan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
4. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi dan Sasaran Pokok serta Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dicapai, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
5. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJP Kabupaten Kepulauan Anambas 2005-2025. Dalam hal evaluasi jika ditemukan adanya ketidaksesuaian /penyimpangan, Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
7. Hasil evaluasi RPJP Kabupaten Kepulauan Anambas 2005-2025 digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJP Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode berikutnya.
8. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJP Kabupaten Kepulauan Anambas 2005-2025 kepada Bupati Kepulauan Anambas.
9. Bupati Kepulauan Anambas menyampaikan laporan kepada Gubernur Kepulauan Riau.

BAB VII

PENUTUP

RPJP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005 – 2025 ini menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah di Kabupaten Kepulauan Anambas. RPJP ini akan menjadi koridor bagi penyusunan RPJM Daerah periode lima tahunan dan menjadi pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyampaikan visi dan misi serta program daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan jangka panjang selama 20 tahun.

Disamping itu, RPJP Daerah menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun dinas dan instansi teknis lainnya. Serta pedoman bagi pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik serta memberikan arah pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.

Terwujudnya apa yang sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang ini tidak saja ditentukan oleh rencana yang sudah disusun tetapi sangat ditentukan oleh komitmen dan sikap mental penyelenggara pemerintahan dan dukungan masyarakat serta dunia usaha. Oleh karena itu, dokumen RPJP Daerah ini akan bermanfaat jika pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat secara bersama-sama berkeinginan untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang daerah ini.

Perubahan RPJP Daerah dapat dilakukan paling cepat sekali dalam lima tahun dan/ atau setelah lima tahun berlakunya RPJP Daerah ini dengan alasan yang disepakati oleh pihak yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paling lambat 6 bulan sebelum RPJP Daerah ini berakhir, Kepala Daerah yang melaksanakan pada akhir periode wajib menyusun dan menyelesaikan RPJP Daerah periode berikutnya.